



LKPJ

Tahun 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN**



DLHK Provinsi Banten

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada akhir tahun anggaran 2025 ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, dalam kaitan dengan hal ini bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi keterangan pertanggungjawaban, khususnya menyangkut lingkup pelaksanaan pembangunan Urusan Lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2025. Dalam LKPJ ini disampaikan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban, mencakup pelaksanaan program/kegiatan, capain kinerja, serta hambatan-hambatan yang dijumpai dan upaya pemecahan masalahnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen LKPJ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 diucapkan terima kasih dan kami harapkan LKPJ ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Semarang, Desember 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten

Dr. Awan Supawan, S.Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1006



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v

I Pendahuluan

1.1	Latar Belakang	2
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Tujuan dan Sasaran.....	6
1.4	Visi dan Misi.....	6
1.5	Data Umum /Gambaran Umum Daerah.....	10
	A. Data Geografis dan Potensi Sumberdaya Alam	10
	B. Data PNS/Sumber Daya Manusia (SDM) DLHK Provinsi Banten	12
	C. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan TA 2025	14
	D. Realisasi Belanja TA 2025.....	16

II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DLHK PROVINSI BANTEN TA 2025

2.1	Perubahan/Pergeseran Anggaran Sebelum Perubahan Perubahan Anggaran Tahun 2025.....	28
2.2	Perubahan Penjabaran Anggaran Melalui Perubahan Anggaran Tahun 2025	28

III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

3.1	Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan.....	46
	A. Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran.....	46



	B. Capaian Pelaksanaan Kinerja Program	53
	C. Capaian Pelaksanaan Kinerja Kegiatan	71
	D. Realisasi Pendapatan	107
	E. Permasalahan dan Solusi.....	108
	F. Analisis Kesesuaian kegiatan dengan Target Kinerja Program.....	111
3.2	Kebijakan Strategis yang ditetapkan	120
3.3	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	120
VI	Penutup	122



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten	7
Tabel 1.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DLHK Provinsi Banten	9
Tabel 1.3	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten	10
Tabel 1.4	Rencana Kawasan Lindung Provinsi Banten Tahun 2010-2030	11
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Jabatan Struktura di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	13
Tabel 1.6	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	13
Tabel 1.7	Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA 2025	16
Tabel 1.8	Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten sebelum dan sesudah perubahan Anggaran Tahun 2025	17
Tabel 1.9	Realisasi Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten Tahun 2025	23
Tabel 2.1	Rencana Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kehutanan Provinsi Banten Perubahan Anggaran Tahun 2025	29
Tabel 2.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada Perubahan Renja / Anggaran Tahun 2025	30
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025	46
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2025	72
Tabel 3.3	Realisasi Target Pendapatan Tahun 2025	107
Tabel 3.4	Kesesuaian dengan target kinerja program DLHK Tahun 2025	112
Tabel 3.5	Kebijakan Strategis yang ditetapkan	120
Tabel 3.6	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	120



Daftar Gambar

Gambar 1	Gambaran persentase pegawai berdasarkan kelongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.....	14
Gambar 2.	Hasil Perhitungan IKU Provinsi Banten.....	47
Gambar 3.	Hasil Perhitungan IKA Provinsi Banten	48
Gambar 4.	Hasil Perhitungan IKAL Provinsi Banten	49
Gambar 5.	Hasil Perhitungan IKTL Provinsi Banten	51

PENDAHULUAN

LKPJ TA-2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada pelaksanaannya, Gubernur diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membantu memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPj-OPD) guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Perda tersebut mengemukakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terdiri Kesekretariatan dan 4 bidang teknis yaitu Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan serta Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE & Pemberdayaan Masyarakat serta memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan dan 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan cilegon dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang serta Kelompok Jabatan fungsional (Penyuluh Kehutanan)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DLHK Provinsi Banten adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
8. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2025.

Adapun Sasarannya adalah tersusunnya data dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program pembangunan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya selama Tahun Anggaran 2026.

1.4. Visi dan Misi

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2025-2029 sama dengan Visi **Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029** yakni : **“Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”**.

Misi OPD tidak boleh terlepas dari Visinya. tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2025-2029, adalah Misi ke-1 (Satu) dan Misi ke-5 (Lima) yaitu:

1. Misi ke-1 : **Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif dan Tangguh.**
2. Misi ke-5 : **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan resiliensi Terhadap Bencana.**

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang mempengaruhinya

Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Sasaran dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan maupun mempermudah alokasi penempatan sumber daya yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal.

Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan resiliensi Terhadap Bencana	1. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup, kelestarian hutan dan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan	A. Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan
		B. Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
		C. Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)
Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif dan Tangguh	2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan kedepan. Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program maka diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tentunya mengacu pada tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2025-2029, akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dan pembangunan Provinsi Banten secara umum.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan serta indikatornya, agar dalam pelaksanaan dapat terukur dengan baik. Program yang disusun disesuaikan dengan bidang urusan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Secara lengkap strategi serta arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan pada Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DLHK Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan resiliensi Terhadap Bencana			
1. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup, kelestarian hutan dan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan	A. Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	Meningkatkan Kualitas Air, Air Laut dan Kualitas Udara	a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan, pengendalian Limbah b3, Pembinaan Penyuluhan Lingkungan dan Penegakan hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		2. Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Meningkatkan kualitas perencanaan hutan, melakukan rehabilitasi lahan kritis, penyediaan bibit tanaman untuk rehabilitasi lahan kritis, optimalisasi pengelolaan DAS, pembinaan industri kayu dan non kayu, serta penyuluhan kehutanan dan peningkatan peran serta masyarakat
	B. Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	3. Melakukan optimalisasi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah	a. Meningkatkan upaya pengendalian perubahan Iklim dan pengelolaan persampahan
	C. Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)	4. Melakukan optimalisasi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	a. Meningkatkan pelaksanaan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, Peningkatan kapasitas SDM dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem
Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif dan Tangguh			
2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi , efektivitas, dan akuntabel dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

1.5. Data Umum /Gambaran Umum Daerah

A. Data Geografis dan Potensi Sumberdaya Alam

Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 208.161,27 Ha, sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi. Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Namun demikian, potensi yang tinggi tersebut, belum dapat termanfaatkan dengan maksimal, bahkan kondisinya semakin mengalami tekanan sebagai akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, perambahan hutan, perburuan liar, perdagangan flora/fauna yang dilindungi.

Tabel 1.3. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten

No	Pengelola Kawasan Hutan	Konservasi	Lindung	Hutan Produksi		Grand Total
				Produksi Terbatas	Produksi Tetap	
1	BKSDA	6.269,80				6.269,80
2	BTNGHS	26.306,07	0,00	17,31	18,52	26.341,91
3	BTNUK	110.566,17				110.566,17
4	KHDPK	0,08	6.569,65	22.796,89	24.268,08	55.508,12
5	KPH Banten		3.826,18	12.175,59	21.594,21	37.595,98
6	MHA Kasepuhan Cibarani				489,48	489,48
7	MHA Kasepuhan Citedug	1.230,30		38,16		1.268,46
8	MHA Kasepuhan Cirompang	306,73				306,73
9	MHA Kasepuhan Cisit	1.283,09		683,39		1.966,48
10	MHA Kasepuhan Cisungsang	1.261,19		337,98		1.599,17
11	MHA Kasepuhan Citorek	593,63		1.052,92		1.646,55
12	MHA Kasepuhan Karang	462,27				462,27
13	MHA Kasepuhan Pasir Eurih	570,05		8,56		578,61
14	Provinsi Banten	2.471,51				2.471,51
15	KHDTK			1.873,43		
Grand Total		51.320,89	10.395,83	38.984,24	46.370,29	247.071,25

Sumber: Analisa Spasial Peta Kawasan Hutan, Peta KHDPK, Peta Penetapan Hutan Adat dan Peta KHDTK Carita, 2025

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Provinsi Banten meliputi; Hutan Produksi (HP) seluas 85.354,53 Ha, Hutan Lindung 10.395,83 Ha dan Hutan Konservasi 151.320,89 Ha.

Kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Banten terdiri dari dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Luas Taman Nasional Ujung Kulon adalah seluas 110.566,17 Ha, Sedangkan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terbagi dua Provinsi, yaitu Banten dan Jawa Barat dengan areal yang masuk di Provinsi Banten seluas 26.306,07 Ha. Kawasan konservasi lainnya adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam seluas 6.269,80 Ha, MHA Kasepuhan seluas 5.70726 Ha, dan Provinsi Banten seluas 2.471,51 Ha serta Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus seluas 0,08 Ha

Tabel 1.4 Rencana Kawasan Lindung Provinsi Banten Tahun 2010-2030

No	Kawasan Lindung	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1	Kawasan Hutan Lindung	10.395,83	4,45	SK. Menhutbun No. 491/Kpts-II/1999
2	Sempadan Pantai	3.677,61	1,58	Perda Banten No. 1 Tahun 2023
3	Sempadan Sungai	146,18	0,06	Perda Banten No. 1 Tahun 2023
4	Kawasan Sekitar Danau/Waduk	302,78	0,13	Perda Banten No. 1 Tahun 2023
5	Kawasan Sekitar Mata Air	787,00	0,34	
6	Kawasan Cagar Alam Rawa Danau	3.542,70	1,52	SK.3586/Menhut-VII/KUH/2014
7	Kawasan Cagar Alam Tukung Gede	1.519,50	0,65	SK.3622/Menhut-VII/KUH/2014
8	Kawasan Cagar Alam Pulau Dua	32,85	0,01	SK.3107/Menhut-VII/KUH/2014
9	Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon	105.694,46	45,28	SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014
10	Kawasan Taman Nasional Gn. Halimun Salak	32.013,40	13,71	SK 327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 (ubah Fungsi)
11	Kawasan Taman Hutan Raya Banten	2.471,51	1,06	SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014 dan SK.813/MENLHK/SETJEN/pLA.2 / 8 / 2022
12	Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang	528,15	0,23	55/Kpts-II/93

No	Kawasan Lindung	Luas		Keterangan
		Ha	%	
13	Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangiang	720,00	0,31	698/Kpts-II/1991
14	Kawasan Rawan Bencana	66.451,53	28,47	
15	Kawasan Hak Ulayat Adat Baduy	5.136,58	2,20	Perda Lebak No. 32 Tahun 2001
Total		233.420,07		

Sumber: DLHK Banten, 2025

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dan berbagai tipe vegetasi khas serta merupakan perwakilan tipe Ekosistem Hutan Hujan Dataran rendah yang tersisa dan terluas di Pulau Jawa. Gejala alamnya yang unik serta panorama yang asri dan alami di berbagai tempat, secara keseluruhan merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata alam. Di dalamnya terdapat satwa spesifik endemic langka yaitu badak bercula satu (*Rhinoceros sundaicus*). Selain hal tersebut di atas Provinsi Banten memiliki Cagar Alam Rawa Danau yang merupakan kawasan penyedia air baku dan satu-satunya reservoir air di wilayah Provinsi Banten Bagian Barat.

B. Data PNS/Sumber Daya Manusia (SDM) DLHK Provinsi Banten

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber Daya Manusia OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi ASN yaitu : PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada tahun 2025 sebanyak 414 orang yaitu pegawai **PNS** (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 131 orang dan PPPK (Penuh Waktu dan Paruh Waktu) sebanyak 283 orang. Adapun rincian jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II	1	Kepala Dinas
2	Esselon III	9	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	15	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional	12	Fungsional Hasil Penyetaraan
5	Fungsional	5	Penyuluh Kehutanan/Arsiparis
6	Fungsional Umum	87	Pelaksana/ASN
	Jumlah PNS	131	
7	PPPK Penuh Waktu	206	
8	PPPK Paruh Waktu	77	
	Jumlah PPPK	283	
	Jumlah Total	414	

Sumber: DLHK Banten, 2025

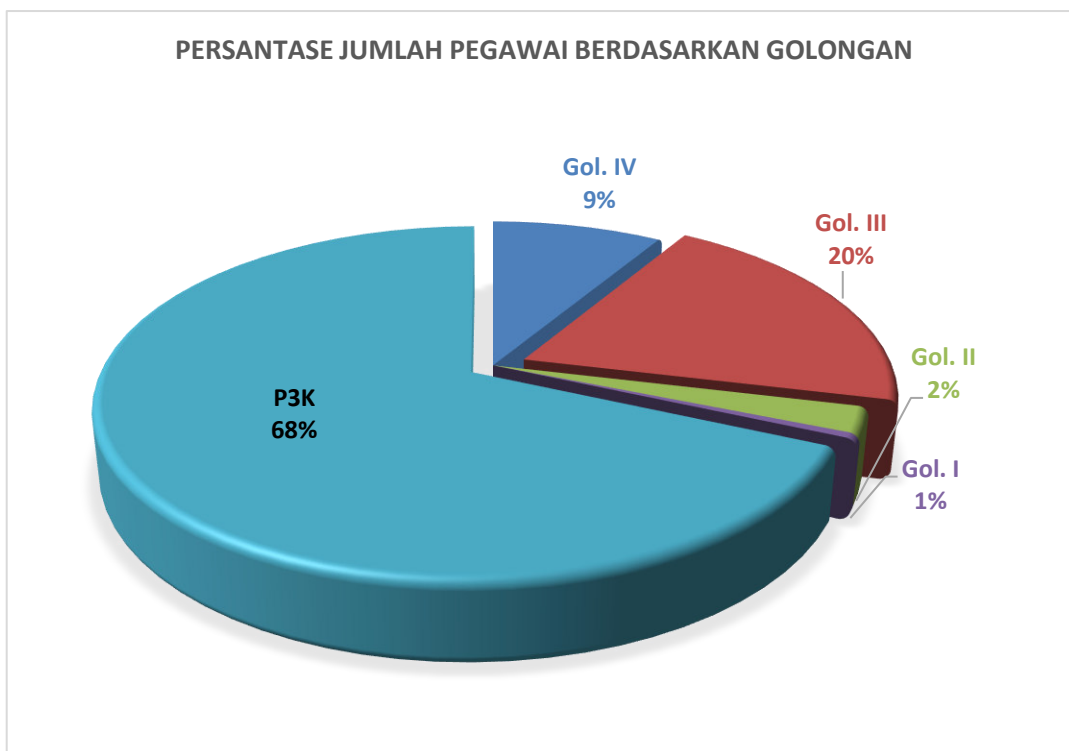
Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	1
2	Sekretaris	1	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	3	0	0	0	3
4	Kepala CDLHK / UPTD	5	0	0	0	5
5	Kepala Sub Bagian	3	3	0	0	6
6	Kepala Seksi	3	9	0	0	12
7	Penyuluh	3	1	0	0	4
8	Fungsional Murni	0	1	0	0	1
9	Fungsional hasil penyetaraan	9	3	0	0	12
10	Pelaksana / PNS	8	66	10	2	86
11	Pelaksana / P3K	0	0	0	0	206
12	Pelaksana / P3K Paruh Waktu	0	0	0	0	77
Jumlah		36	83	10	2	414

Sumber: DLHK Banten, 2025

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 36 orang (8,7%), Golongan III sebanyak 83 orang (20%), Golongan II sebanyak 10 orang (2,4%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (0,5%). Secara grafis disajikan sebagai berikut :



Gambar 1. Gambaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025.

C. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan TA 2025

Target Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum Perubahan Anggaran (APBD Murni TA 2025) adalah sebesar **Rp 316.120.000,-** (Tiga ratus enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp.270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Retribusi Pemakaian Gedung Perkantoran/ Ruang Serba Guna/ aula (TAHURA) sebesar Rp.2.000.000,- Retribusi Pemakaian Ruangan (kantin) target sebesar Rp. 6.120.000,- (Enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Retribusi pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (TAHURA) target sebesar Rp. 38.000.000,-.

Adapun Target Pendapatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 **335.420.000,-** (Tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. **312.141.500,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus rupiah)** atau 93,1 %, terdiri dari retribusi pemakaian laboratorium realisasi sebesar Rp. 246.512.500,- atau sebesar 91,3,% Retribusi Pemakaian

Ruangan (kantin) realisasi sebesar Rp. 6.120.000,- atau 100% dan Realisasi Retribusi dari Tahura terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi sebesar Rp 51.233.000,- atau sebesar Rp 103,5% dan Retribusi Pemakaian Gedung Perkantoran/ Ruang Serba Guna/ aula sebesar Rp. 8.276.000,- atau 84,4%

Beberapa kendala terkait pencapaian/Realisasi pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain :

- a. Alokasi anggaran pengadaan bahan kimia pada tahun 2025 belum memadai dengan jumlah Parameter Kualitas Lingkungan yang telah terakreditasi dan teregistrasi (89 Parameter) sehingga ada beberapa parameter yang tidak bisa dilayani karena keterbatasan bahan kimia pada tahun berjalan sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target Retribusi Pendapatan Laboratorium.
- b. Alokasi anggaran maintenance peralatan laboratorium dan Peralatan Sampling Kualitas Air dan Udara Ambien belum memadai dengan jumlah peralatan laboratorium dan peralatan sampling yang dimiliki sehingga ada beberapa peralatan laboratorium dan peralatan sampling yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki tidak dapat dipelihara dengan baik pada tahun berjalan sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target Retribusi Pendapatan Laboratorium
- c. Jumlah Peralatan Sampling yang dimiliki khususnya Peralatan Sampling Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan sangat kurang hanya 1 (Satu) Set, dimana Permintaan sampling kualitas udara ambien dan Kebisingan pada bulan Desember tidak bisa terlayani semua karena keterbatasan Peralatan Sampling sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target Retribusi Pendapatan Laboratorium.
- d. Target pemanfaatan aset tidak tercapai target yaitu 80 % yang di karenakan Karena di perubahan Anggaran baru dilaksanakan rehabilitasi pembangunan gedung dan sarana (cottage penginapan, camping ground, café). Namun untuk Keseluruhan target Tahura 2025 jika digabung target Aset dan

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan olahraga realisasi tahun sudah melebihi target dari Rp. 59.300.000 realisasi sebesar Rp. 59.509.000,-

Beberapa tindak lanjut yang akan dilaksanakan terkait permasalahan yang terjadi antara lain : perlunya peningkatan anggaran pengadaan bahan kimia dan *maintenance* peralatan laboratorium dan Peralatan Sampling Kualitas Air dan Udara Ambien serta pengadaan sarana dan prasarana Peralatan Sampling yang dimiliki khususnya Peralatan Sampling Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran pendapatan tahun anggaran 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

Tabel.1.7 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA 2025

No	Kode rek	Uraian Pendapatan	Target APBD Murni (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		Lebih/(kurang) (Rp)
					(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	316.120.000	335.420.000	312.141.500	93,1%	-Rp23.278.500,00
1	4.1.02.02.12.0001	Kantin	6.120.000	6.120.000	6.120.000	100,0%	Rp0,00
2	4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	38.000.000	49.500.000	51.233.000	103,5%	Rp1.733.000,00
	4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah					
3	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemakaian Laboratorium	270.000.000	270.000.000	246.512.500	91,3%	-Rp23.487.500,00
4	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemakaian Gedung Perkantoran/ Ruang Serba Guna/ aula (TAHURA)	2.000.000	9.800.000	8.276.000	84,4%	-Rp1.524.000,00

D. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Dukungan anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Tahun Anggaran 2025 APBD Murni adalah sebesar **Rp 77.234.605.000,-** (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan Rincian **Belanja Operasi Rp 69.916.968.256,-** (Enam puluh sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan **Belanja Modal sebesar Rp. 7.317.636.744,-** (Tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta

enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Jumlah Program yang dilaksanakan pada tahun Anggaran 2024 (APBD Murni) dilaksanakan melalui 15 Program dan 55 kegiatan

Dalam APBD Perubahan TA 2025 terjadi Perubahan Pagu Anggaran menjadi sebesar **Rp. 69.838.668.805,-** (Enam puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) dengan rincian **Belanja Operasi** menjadi **Rp. 67.506.201.907,-** (Enam puluh tujuh milyar lima ratus enam juta dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dan **Belanja Modal** menjadi Rp. **2.332.466.898,-** (Dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan jumlah Program yang dilaksanakan sebanyak 15 Program dan 52 Kegiatan

Adapun Rincian Program, Kegiatan dan alokasi anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8. Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten sebelum dan sesudah perubahan Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		APBD Murni	APBD Perubahan	
1	2	3	4	5
	2.11.3.28.0.00.02.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp61.377.702.500,00	Rp59.237.281.705,00	(Rp2.140.420.795,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp56.926.702.500,00	Rp55.772.179.705,00	(Rp1.154.522.795,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rp56.926.702.500,00	Rp55.772.179.705,00	(Rp1.154.522.795,00)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp42.896.369.500,00	Rp45.161.696.205,00	Rp2.265.326.705,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp520.000.000,00	Rp479.494.000,00	(Rp40.506.000,00)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp30.882.713.800,00	Rp36.586.078.800,00	Rp5.703.365.000,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp8.640.000,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp55.000.000,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp311.000.000,00	Rp296.647.000,00	(Rp14.353.000,00)
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp9.387.926.000,00	Rp6.671.026.705,00	(Rp2.716.899.295,00)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.731.089.700,00	Rp1.064.809.700,00	(Rp666.280.000,00)

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		APBD Murni	APBD Perubahan	
1	2	3	4	5
II	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Rp350.000.000,00	Rp262.500.000,00	(Rp87.500.000,00)
8	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Rp350.000.000,00	Rp262.500.000,00	(Rp87.500.000,00)
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp4.228.333.000,00	Rp3.150.798.500,00	(Rp1.077.534.500,00)
9	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp4.228.333.000,00	Rp3.150.798.500,00	(Rp1.077.534.500,00)
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp115.000.000,00	Rp93.800.000,00	(Rp21.200.000,00)
10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Rp115.000.000,00	Rp93.800.000,00	(Rp21.200.000,00)
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp80.000.000,00	Rp121.550.000,00	Rp41.550.000,00
11	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp80.000.000,00	Rp121.550.000,00	Rp41.550.000,00
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp150.000.000,00	Rp82.280.000,00	(Rp67.720.000,00)
12	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Rp150.000.000,00	Rp82.280.000,00	(Rp67.720.000,00)
VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp465.000.000,00	Rp375.405.000,00	(Rp89.595.000,00)
13	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp465.000.000,00	Rp375.405.000,00	(Rp89.595.000,00)
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp55.000.000,00	Rp41.250.000,00	(Rp13.750.000,00)
14	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp55.000.000,00	Rp41.250.000,00	(Rp13.750.000,00)
IX	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp50.000.000,00	Rp35.650.000,00	(Rp14.350.000,00)
15	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Rp50.000.000,00	Rp35.650.000,00	(Rp14.350.000,00)
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp200.000.000,00	Rp113.635.000,00	(Rp86.365.000,00)

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		APBD Murni	APBD Perubahan	
1	2	3	4	5
16	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Rp200.000.000,00	Rp113.635.000,00	(Rp86.365.000,00)
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp8.337.000.000,00	Rp6.333.615.000,00	(Rp2.003.385.000,00)
17	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Rp8.337.000.000,00	Rp6.333.615.000,00	(Rp2.003.385.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp4.451.000.000,00	Rp3.465.102.000,00	(Rp985.898.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Rp4.451.000.000,00	Rp3.465.102.000,00	(Rp985.898.000,00)
XII	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp1.691.000.000,00	Rp1.208.448.000,00	(Rp482.552.000,00)
18	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Rp186.000.000,00	Rp113.080.000,00	(Rp72.920.000,00)
19	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Rp55.000.000,00	Rp32.830.000,00	(Rp22.170.000,00)
20	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp130.000.000,00	Rp88.740.000,00	(Rp41.260.000,00)
21	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Rp900.000.000,00	Rp670.158.000,00	(Rp229.842.000,00)
22	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Rp420.000.000,00	Rp303.640.000,00	(Rp116.360.000,00)
XIII	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rp885.000.000,00	Rp763.825.000,00	(Rp121.175.000,00)
23	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rp885.000.000,00	Rp763.825.000,00	(Rp121.175.000,00)
XIV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Rp925.000.000,00	Rp596.529.000,00	(Rp328.471.000,00)
24	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp925.000.000,00	Rp596.529.000,00	(Rp328.471.000,00)
XV	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Rp950.000.000,00	Rp896.300.000,00	(Rp53.700.000,00)
25	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp950.000.000,00	Rp896.300.000,00	(Rp53.700.000,00)
	2.11.3.28.0.00.02.0001 - Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang	Rp1.833.206.000,00	Rp1.387.058.000,00	(Rp446.148.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp348.206.000,00	Rp323.960.000,00	(Rp24.246.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rp348.206.000,00	Rp323.960.000,00	(Rp24.246.000,00)
IA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp348.206.000,00	Rp323.960.000,00	(Rp24.246.000,00)

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		APBD Murni	APBD Perubahan	
1	2	3	4	5
PROVINSI				
26	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp77.000.000,00	Rp61.994.000,00	(Rp15.006.000,00)
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp216.812.000,00	Rp207.572.000,00	(Rp9.240.000,00)
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp54.394.000,00	Rp54.394.000,00	Rp0,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Rp1.485.000.000,00	Rp1.063.098.000,00	(Rp421.902.000,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		Rp1.485.000.000,00	Rp1.063.098.000,00	(Rp421.902.000,00)
XIIA	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp1.330.000.000,00	Rp951.519.000,00	(Rp378.481.000,00)
29	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp1.320.000.000,00	Rp946.148.000,00	(Rp373.852.000,00)
30	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Rp10.000.000,00	Rp5.371.000,00	(Rp4.629.000,00)
XIIIA	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rp155.000.000,00	Rp111.579.000,00	(Rp43.421.000,00)
31	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Rp10.000.000,00	Rp5.345.000,00	(Rp4.655.000,00)
32	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rp145.000.000,00	Rp106.234.000,00	(Rp38.766.000,00)
2.11.3.28.0.00.02.0002 - Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon		Rp1.634.521.000,00	Rp1.255.479.500,00	(Rp379.041.500,00)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Rp309.521.000,00	Rp273.478.500,00	(Rp36.042.500,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		Rp309.521.000,00	Rp273.478.500,00	(Rp36.042.500,00)
IB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp309.521.000,00	Rp273.478.500,00	(Rp36.042.500,00)
33	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp84.000.000,00	Rp69.234.000,00	(Rp14.766.000,00)
34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp135.106.000,00	Rp113.829.500,00	(Rp21.276.500,00)
35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp90.415.000,00	Rp90.415.000,00	Rp0,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Rp1.325.000.000,00	Rp982.001.000,00	(Rp342.999.000,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		Rp1.325.000.000,00	Rp982.001.000,00	(Rp342.999.000,00)
XIIB	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp1.170.000.000,00	Rp872.450.000,00	(Rp297.550.000,00)
36	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp1.160.000.000,00	Rp865.006.000,00	(Rp294.994.000,00)

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		APBD Murni	APBD Perubahan	
1	2	3	4	5
37	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Rp10.000.000,00	Rp7.444.000,00	(Rp2.556.000,00)
XIIIB	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rp155.000.000,00	Rp109.551.000,00	(Rp45.449.000,00)
38	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Rp10.000.000,00	Rp6.170.000,00	(Rp3.830.000,00)
39	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rp145.000.000,00	Rp103.381.000,00	(Rp41.619.000,00)
	2.11.3.28.0.00.02.0003 - UPTD Laboratorium Lingkungan	Rp1.082.000.000,00	Rp1.135.789.600,00	Rp53.789.600,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp1.082.000.000,00	Rp1.135.789.600,00	Rp53.789.600,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rp1.082.000.000,00	Rp1.135.789.600,00	Rp53.789.600,00
IC	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp585.400.000,00	Rp491.202.000,00	(Rp94.198.000,00)
40	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp295.400.000,00	Rp277.702.000,00	(Rp17.698.000,00)
41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp290.000.000,00	Rp213.500.000,00	(Rp76.500.000,00)
IIIA	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp496.600.000,00	Rp644.587.600,00	Rp147.987.600,00
42	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Rp409.600.000,00	Rp601.287.600,00	Rp191.687.600,00
43	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp87.000.000,00	Rp43.300.000,00	(Rp43.700.000,00)
	2.11.3.28.0.00.02.0004 - UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Rp1.434.675.500,00	Rp1.192.901.500,00	(Rp241.774.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp429.675.500,00	Rp365.928.500,00	(Rp63.747.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rp429.675.500,00	Rp365.928.500,00	(Rp63.747.000,00)
ID	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp429.675.500,00	Rp365.928.500,00	(Rp63.747.000,00)
44	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp141.870.000,00	Rp126.870.000,00	(Rp15.000.000,00)
45	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp63.312.500,00	Rp63.312.500,00	Rp0,00
46	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp224.493.000,00	Rp175.746.000,00	(Rp48.747.000,00)

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		APBD Murni	APBD Perubahan	
1	2	3	4	5
	Daerah			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp1.005.000.000,00	Rp826.973.000,00	(Rp178.027.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Rp1.005.000.000,00	Rp826.973.000,00	(Rp178.027.000,00)
XIIC	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp1.005.000.000,00	Rp826.973.000,00	(Rp178.027.000,00)
47	Perbenihan Tanaman Hutan	Rp1.005.000.000,00	Rp826.973.000,00	(Rp178.027.000,00)
	2.11.3.28.0.00.02.0005 - UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Rp9.872.500.000,00	Rp5.630.158.500,00	(Rp4.242.341.500,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp9.002.500.000,00	Rp4.893.716.500,00	(Rp4.108.783.500,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rp9.002.500.000,00	Rp4.893.716.500,00	(Rp4.108.783.500,00)
IE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp9.002.500.000,00	Rp4.893.716.500,00	(Rp4.108.783.500,00)
48	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp299.842.000,00	Rp271.136.500,00	(Rp28.705.500,00)
49	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp5.860.761.000,00	Rp2.201.938.000,00	(Rp3.658.823.000,00)
50	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp241.724.000,00	Rp195.469.000,00	(Rp46.255.000,00)
51	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.600.173.000,00	Rp2.225.173.000,00	(Rp375.000.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp870.000.000,00	Rp736.442.000,00	(Rp133.558.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Rp870.000.000,00	Rp736.442.000,00	(Rp133.558.000,00)
XIIIC	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rp870.000.000,00	Rp736.442.000,00	(Rp133.558.000,00)
52	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Rp870.000.000,00	Rp736.442.000,00	(Rp133.558.000,00)
Jumlah Total		Rp77.234.605.000,00	Rp69.838.668.805,00	(Rp7.395.936.195,00)

Jumlah realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 68.335.691.254,- (97,85%) dengan realisasi fisik sebesar **106,96%** terdiri dari Belanja Operasi dengan pagu sebesar Rp. 67.506.201.415,- realisasi sebesar Rp 66.016.474.094,- (97,79%) dan Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp2.332.466.898,- realisasi sebesar Rp2.319.217.260,- (99,43%) Adapun Realisasi fisik dan keuangan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun anggaran 2025 selengkapnya dapat di lihat pada tabel 1.9 berikut ini:

Tabel 1.9. Realisasi Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
	Unit INDUK	59.237.281.705,00	58.113.833.278,00	98,10	123,34	(1.123.448.427,00)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.161.696.205,00	44.214.084.704,00	97,90	100	(947.611.501,00)
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	479.494.000,00	478.077.512,00	99,70	100	(1.416.488,00)
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	36.586.078.800,00	35.818.870.514,00	97,90	100	(767.208.286,00)
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00	100	0,00
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	55.000.000,00	54.953.745,00	99,92	100	(46.255,00)
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	296.647.000,00	295.313.622,00	99,55	100	(1.333.378,00)
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.671.026.705,00	6.510.651.517,00	97,60	100	(160.375.188,00)
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.064.809.700,00	1.047.577.794,00	98,38	100	(17.231.906,00)
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	262.500.000,00	261.206.500,00	99,51	100	(1.293.500,00)
8	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PROVINSI	262.500.000,00	261.206.500,00	99,51	100	(1.293.500,00)
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.150.798.500,00	3.125.020.386,00	99,18	93,49	(25.778.114,00)
9	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUGAN HIDUP	3.150.798.500,00	3.125.020.386,00	99,18	100	(25.778.114,00)
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	93.800.000,00	93.335.310,00	99,50	100	(464.690,00)
10	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI	93.800.000,00	93.335.310,00	99,50	100	(464.690,00)
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	121.550.000,00	118.558.190,00	97,54	100	(2.991.810,00)
11	PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	121.550.000,00	118.558.190,00	97,54	100	(2.991.810,00)
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	82.280.000,00	79.955.000,00	97,17	100	(2.325.000,00)
12	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	82.280.000,00	79.955.000,00	97,17	100	(2.325.000,00)
VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	97,40	100	(9.763.038,00)
13	PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	375.405.000,00	365.641.962,00	97,40	100	(9.763.038,00)

No	Program/Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	41.250.000,00	41.069.136,00	99,56	100	(180.864,00)
14	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	41.250.000,00	41.069.136,00	99,56	100	(180.864,00)
IX	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.650.000,00	35.629.800,00	99,94	145,59	(20.200,00)
15	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH PROVINSI	35.650.000,00	35.629.800,00	99,94	145,59	(20.200,00)
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	113.635.000,00	109.490.000,00	96,35	100	(4.145.000,00)
16	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI	113.635.000,00	109.490.000,00	96,35	100	(4.145.000,00)
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.333.615.000,00	6.310.041.826,00	99,63	179,16	(23.573.174,00)
17	PENANGANAN SAMPAH DI TPA/TPST REGIONAL	6.333.615.000,00	6.310.041.826,00	99,63	139,58	(23.573.174,00)
XII	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.208.448.000,00	1.175.772.041,00	97,30	126,08	(32.675.959,00)
18	RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK)	113.080.000,00	104.276.500,00	92,21	100	(8.803.500,00)
19	PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	32.830.000,00	26.515.000,00	80,76	100	(6.315.000,00)
20	PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	88.740.000,00	86.026.500,00	96,94	100	(2.713.500,00)
21	PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HBBK)	670.158.000,00	660.616.541,00	98,58	100	(9.541.459,00)
22	PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI	303.640.000,00	298.337.500,00	98,25	100	(5.302.500,00)
XIII	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	763.825.000,00	743.973.822,00	97,40	100	(19.851.178,00)
23	PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM	763.825.000,00	743.973.822,00	97,40	100	(19.851.178,00)
XIV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	596.529.000,00	579.239.601,00	97,10	105,77	(17.289.399,00)
24	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	596.529.000,00	579.239.601,00	97,10	100	(17.289.399,00)
XV	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	896.300.000,00	860.815.000,00	96,04	300	(35.485.000,00)
25	PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	896.300.000,00	860.815.000,00	96,04	100	(35.485.000,00)
	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang	1.387.058.000,00	1.323.575.266,00	95,42	132,09	(63.482.734,00)
IA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	323.960.000,00	312.005.860,00	96,31	100	(11.954.140,00)

No	Program/Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7
26	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	61.994.000,00	58.584.280,00	94,50	100	(3.409.720,00)
27	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	207.572.000,00	200.469.680,00	96,58	100	(7.102.320,00)
28	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	54.394.000,00	52.951.900,00	97,35	100	(1.442.100,00)
XIIA	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	951.519.000,00	904.738.506,00	95,08	196,26	(46.780.494,00)
29	PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	946.148.000,00	899.620.506,00	95,08	100	(46.527.494,00)
30	PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI	5.371.000,00	5.118.000,00	95,29	97,84	(253.000,00)
XIIIA	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	111.579.000,00	106.830.900,00	95,74	100	(4.748.100,00)
31	PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN/ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN (APPENDIX) CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES) UNTUK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	5.345.000,00	4.910.000,00	91,86	100	(435.000,00)
32	PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM	106.234.000,00	101.920.900,00	95,94	100	(4.313.100,00)
	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon	1.255.479.500,00	1.146.057.827,00	91,28	92,61	(109.421.673,00)
IB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	273.478.500,00	243.838.940,00	89,16	100	(29.639.560,00)
33	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	69.234.000,00	66.236.351,00	95,67	100	(2.997.649,00)
34	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	113.829.500,00	87.326.849,00	76,72	100	(26.502.651,00)
35	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.415.000,00	90.275.740,00	99,85	100	(139.260,00)
XIIB	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	872.450.000,00	799.366.445,00	91,62	77,82	(73.083.555,00)
36	PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	865.006.000,00	792.993.565,00	91,67	100	(72.012.435,00)
37	PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI	7.444.000,00	6.372.880,00	85,61	138,14	(1.071.120,00)
XIIIB	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	109.551.000,00	102.852.442,00	93,89	100	(6.698.558,00)
38	PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN/ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN (APPENDIX) CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES) UNTUK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	6.170.000,00	5.987.724,00	97,05	100	(182.276,00)
39	PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM	103.381.000,00	96.864.718,00	93,70	100	(6.516.282,00)
	UPTD Laboratorium Lingkungan	1.135.789.600,00	1.114.845.828,00	98,16	97,4	(20.943.772,00)
IC	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	491.202.000,00	483.766.492,00	98,49	100	(7.435.508,00)
40	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	277.702.000,00	271.727.322,00	97,85	100	(5.974.678,00)

No	Program/Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7
41	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	213.500.000,00	212.039.170,00	99,32	100	(1.460.830,00)
IIIA	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	644.587.600,00	631.079.336,00	97,90	94,8	(13.508.264,00)
42	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	601.287.600,00	595.658.410,00	99,06	100	(5.629.190,00)
43	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	43.300.000,00	35.420.926,00	81,80	100	(7.879.074,00)
	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1.192.901.500,00	1.107.429.828,00	92,83	96,33	(85.471.672,00)
ID	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	365.928.500,00	325.541.998,00	88,96	100	(40.386.502,00)
44	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	126.870.000,00	123.363.367,00	97,24	100	(3.506.633,00)
45	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	63.312.500,00	32.958.461,00	52,06	100	(30.354.039,00)
46	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175.746.000,00	169.220.170,00	96,29	100	(6.525.830,00)
XIIC	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	826.973.000,00	781.887.830,00	94,55	92,67	(45.085.170,00)
47	PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	826.973.000,00	781.887.830,00	94,55	97,5	(45.085.170,00)
	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	5.630.158.500,00	5.529.949.327,00	98,22	100	(100.209.173,00)
IE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.893.716.500,00	4.827.848.735,00	98,65	100	(65.867.765,00)
48	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	271.136.500,00	266.976.789,00	98,47	100	(4.159.711,00)
49	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.201.938.000,00	2.186.111.586,00	99,28	100	(15.826.414,00)
50	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	195.469.000,00	178.009.221,00	91,07	100	(17.459.779,00)
51	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.225.173.000,00	2.196.751.139,00	98,72	100	(28.421.861,00)
XIIIC	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	736.442.000,00	702.100.592,00	95,34	100	(34.341.408,00)
52	PENGLOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) PROVINSI	736.442.000,00	702.100.592,00	95,34	100	(34.341.408,00)
Jumlah Total		69.838.668.805,00	68.335.691.354,00	97,85	106,96	(1.502.977.451,00)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DLHK PROVINSI BANTEN TA 2025

LKPJ TA-2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN 2025**

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Perubahan/Pergeseran Anggaran Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025

Sebelum perubahan anggaran Tahun 2025 tidak terjadi Perubahan/optimalisasi anggaran (efisiensi anggaran) namun dinamika optimalisasi serta perubahan anggaran prosesnya dilaksanakan pada tahapan perubahan anggaran tahun 2025.

2.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Melalui Perubahan Anggaran Tahun 2025

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten melaksanakan penyesuaian/perubahan Anggaran Tahun 2024 antara lain : (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD, (b) Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan sehingga diperlukan beberapa penyesuaian anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan serta penyesuaian jumlah anggaran pada beberapa kegiatan, terkait hal-hal tersebut diatas perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian diantaranya perubahan pergeseran, pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Penyesuaian yang dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 diharapkan tetap mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Selengkapnya Rencana

Target Pendapatan dan Belanja serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Perubahan Anggaran Tahun 2025

No	Kode rek	Uraian Pendapatan	Jumlah Target Pendapatan (Rp)		Lebih/(kurang) (Rp)
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	8
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	316.120.000	335.420.000	Rp19.300.000,00
1	4.1.02.02.12.0001	Kantin	6.120.000	6.120.000	Rp0,00
2	4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	38.000.000	49.500.000	Rp11.500.000,00
	4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah			
3	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemakaian Laboratorium	270.000.000	270.000.000	Rp0,00
4	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemakaian Gedung Perkantoran/ Ruang Serba Guna/ aula (TAHURA)	2.000.000	9.800.000	Rp7.800.000,00

Tabel 2.2. Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Rp61.377.702.500,00	Rp59.237.281.705,00	(Rp2.140.420.795,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp56.926.702.500,00	Rp55.772.179.705,00	(Rp1.154.522.795,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp56.926.702.500,00	Rp55.772.179.705,00	(Rp1.154.522.795,00)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp42.896.369.500,00	Rp45.161.696.205,00	Rp2.265.326.705,00
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp520.000.000,00	Rp479.494.000,00	(Rp40.506.000,00)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp88.598.000,00	Rp88.598.000,00	Rp0,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp12.470.000,00	Rp12.470.000,00	Rp0,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp12.570.000,00	Rp12.570.000,00	Rp0,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp9.662.000,00	Rp9.662.000,00	Rp0,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp9.662.000,00	Rp9.662.000,00	Rp0,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp56.700.000,00	Rp56.700.000,00	Rp0,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp199.294.000,00	Rp173.478.000,00	(Rp25.816.000,00)
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp18.490.000,00	Rp11.870.000,00	(Rp6.620.000,00)
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp80.300.000,00	Rp72.230.000,00	(Rp8.070.000,00)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Rp32.254.000,00	Rp32.254.000,00	Rp0,00
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp30.882.713.800,00	Rp36.586.078.800,00	Rp5.703.365.000,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp30.260.935.000,00	Rp36.056.200.000,00	Rp5.795.265.000,00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp591.778.800,00	Rp473.938.800,00	(Rp117.840.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN				PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp5.000.000,00	Rp12.880.000,00	Rp7.880.000,00
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp5.000.000,00	Rp13.580.000,00	Rp8.580.000,00
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp5.000.000,00	Rp14.480.000,00	Rp9.480.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp8.640.000,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp8.640.000,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp55.000.000,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp311.000.000,00	Rp296.647.000,00	(Rp14.353.000,00)
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2.000.000,00	Rp24.800.000,00	Rp22.800.000,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp80.000.000,00	Rp43.597.000,00	(Rp36.403.000,00)
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp25.000.000,00	Rp24.250.000,00	(Rp750.000,00)
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp9.387.926.000,00	Rp6.671.026.705,00	(Rp2.716.899.295,00)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp2.795.926.000,00	Rp1.695.346.000,00	(Rp1.100.580.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN				PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp6.592.000.000,00	Rp4.975.680.705,00	(Rp1.616.319.295,00)
	7			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.731.089.700,00	Rp1.064.809.700,00	(Rp666.280.000,00)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp187.210.000,00	Rp187.210.000,00	Rp0,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp195.631.000,00	Rp195.631.000,00	Rp0,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp15.712.000,00	Rp15.712.000,00	Rp0,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.332.536.700,00	Rp666.256.700,00	(Rp666.280.000,00)
				PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Rp350.000.000,00	Rp262.500.000,00	(Rp87.500.000,00)
	8			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Rp350.000.000,00	Rp262.500.000,00	(Rp87.500.000,00)
				Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Rp200.000.000,00	Rp157.080.000,00	(Rp42.920.000,00)
				Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Rp150.000.000,00	Rp105.420.000,00	(Rp44.580.000,00)
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp4.228.333.000,00	Rp3.150.798.500,00	(Rp1.077.534.500,00)
	9			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Rp4.228.333.000,00	Rp3.150.798.500,00	(Rp1.077.534.500,00)
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp60.000.000,00	Rp42.740.000,00	(Rp17.260.000,00)
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Rp2.575.333.000,00	Rp2.043.148.500,00	(Rp532.184.500,00)
				Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Rp1.193.000.000,00	Rp771.170.000,00	(Rp421.830.000,00)
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp350.000.000,00	Rp264.790.000,00	(Rp85.210.000,00)
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Rp50.000.000,00	Rp28.950.000,00	(Rp21.050.000,00)
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp115.000.000,00	Rp93.800.000,00	(Rp21.200.000,00)
	10			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Rp115.000.000,00	Rp93.800.000,00	(Rp21.200.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN				PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp115.000.000,00	Rp93.800.000,00	(Rp21.200.000,00)
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp80.000.000,00	Rp121.550.000,00	Rp41.550.000,00
	11			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp80.000.000,00	Rp121.550.000,00	Rp41.550.000,00
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp50.000.000,00	Rp45.360.000,00	(Rp4.640.000,00)
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Rp30.000.000,00	Rp76.190.000,00	Rp46.190.000,00
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp150.000.000,00	Rp82.280.000,00	(Rp67.720.000,00)
	12			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Rp150.000.000,00	Rp82.280.000,00	(Rp67.720.000,00)
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp150.000.000,00	Rp82.280.000,00	(Rp67.720.000,00)
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp465.000.000,00	Rp375.405.000,00	(Rp89.595.000,00)
	13			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp465.000.000,00	Rp375.405.000,00	(Rp89.595.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN				PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Rp465.000.000,00	Rp375.405.000,00	(Rp89.595.000,00)
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp55.000.000,00	Rp41.250.000,00	(Rp13.750.000,00)
		14		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp55.000.000,00	Rp41.250.000,00	(Rp13.750.000,00)
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Rp10.000.000,00	Rp7.500.000,00	(Rp2.500.000,00)
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Rp45.000.000,00	Rp33.750.000,00	(Rp11.250.000,00)
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp50.000.000,00	Rp35.650.000,00	(Rp14.350.000,00)
		15		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Rp50.000.000,00	Rp35.650.000,00	(Rp14.350.000,00)
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp50.000.000,00	Rp35.650.000,00	(Rp14.350.000,00)
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp200.000.000,00	Rp113.635.000,00	(Rp86.365.000,00)
		16		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Rp200.000.000,00	Rp113.635.000,00	(Rp86.365.000,00)
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Rp100.000.000,00	Rp55.720.000,00	(Rp44.280.000,00)
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Rp100.000.000,00	Rp57.915.000,00	(Rp42.085.000,00)
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp8.337.000.000,00	Rp6.333.615.000,00	(Rp2.003.385.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
	17	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Rp8.337.000.000,00	Rp6.333.615.000,00	(Rp2.003.385.000,00)
			Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Rp8.237.000.000,00	Rp6.243.765.000,00	(Rp1.993.235.000,00)
			Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Rp100.000.000,00	Rp89.850.000,00	(Rp10.150.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp4.451.000.000,00	Rp3.465.102.000,00	(Rp985.898.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			Rp4.451.000.000,00	Rp3.465.102.000,00	(Rp985.898.000,00)
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Rp1.691.000.000,00	Rp1.208.448.000,00	(Rp482.552.000,00)
	18	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Rp186.000.000,00	Rp113.080.000,00	(Rp72.920.000,00)
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Rp186.000.000,00	Rp113.080.000,00	(Rp72.920.000,00)
	19	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Rp55.000.000,00	Rp32.830.000,00	(Rp22.170.000,00)
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Rp55.000.000,00	Rp32.830.000,00	(Rp22.170.000,00)
	20	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Rp130.000.000,00	Rp88.740.000,00	(Rp41.260.000,00)
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Rp130.000.000,00	Rp88.740.000,00	(Rp41.260.000,00)
	21	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Rp900.000.000,00	Rp670.158.000,00	(Rp229.842.000,00)
			Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Rp20.000.000,00	Rp12.705.000,00	(Rp7.295.000,00)
			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Rp880.000.000,00	Rp657.453.000,00	(Rp222.547.000,00)
	22	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Rp420.000.000,00	Rp303.640.000,00	(Rp116.360.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN				PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
				Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Rp285.000.000,00	Rp192.800.000,00	(Rp92.200.000,00)
				Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Rp135.000.000,00	Rp110.840.000,00	(Rp24.160.000,00)
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			Rp885.000.000,00	Rp763.825.000,00	(Rp121.175.000,00)
		23	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Rp885.000.000,00	Rp763.825.000,00	(Rp121.175.000,00)
				Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Rp885.000.000,00	Rp763.825.000,00	(Rp121.175.000,00)
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			Rp925.000.000,00	Rp596.529.000,00	(Rp328.471.000,00)
		24	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Rp925.000.000,00	Rp596.529.000,00	(Rp328.471.000,00)
				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Rp520.000.000,00	Rp338.737.000,00	(Rp181.263.000,00)
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Rp155.000.000,00	Rp75.505.000,00	(Rp79.495.000,00)
				Penyiapan Perhutanan Sosial	Rp250.000.000,00	Rp182.287.000,00	(Rp67.713.000,00)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			Rp950.000.000,00	Rp896.300.000,00	(Rp53.700.000,00)
		25	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Rp950.000.000,00	Rp896.300.000,00	(Rp53.700.000,00)
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Rp860.000.000,00	Rp873.928.000,00	Rp13.928.000,00
				Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Rp90.000.000,00	Rp22.372.000,00	(Rp67.628.000,00)
B	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang				Rp1.833.206.000,00	Rp1.387.058.000,00	(Rp446.148.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp348.206.000,00	Rp323.960.000,00	(Rp24.246.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp348.206.000,00	Rp323.960.000,00	(Rp24.246.000,00)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp348.206.000,00	Rp323.960.000,00	(Rp24.246.000,00)
	26	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp77.000.000,00	Rp61.994.000,00	(Rp15.006.000,00)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp26.000.000,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp30.000.000,00	Rp14.994.000,00	(Rp15.006.000,00)
	27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp216.812.000,00	Rp207.572.000,00	(Rp9.240.000,00)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp46.812.000,00	Rp46.812.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp170.000.000,00	Rp160.760.000,00	(Rp9.240.000,00)
	28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp54.394.000,00	Rp54.394.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp42.214.000,00	Rp42.214.000,00	Rp0,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp12.180.000,00	Rp12.180.000,00	Rp0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp1.485.000.000,00	Rp1.063.098.000,00	(Rp421.902.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			Rp1.485.000.000,00	Rp1.063.098.000,00	(Rp421.902.000,00)
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Rp1.330.000.000,00	Rp951.519.000,00	(Rp378.481.000,00)
	29	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Rp1.320.000.000,00	Rp946.148.000,00	(Rp373.852.000,00)
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp865.000.000,00	Rp558.364.000,00	(Rp306.636.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN				PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
				Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp300.000.000,00	Rp288.970.000,00	(Rp11.030.000,00)
				Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Rp35.000.000,00	Rp19.354.000,00	(Rp15.646.000,00)
				Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Rp120.000.000,00	Rp79.460.000,00	(Rp40.540.000,00)
	30	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			Rp10.000.000,00	Rp5.371.000,00	(Rp4.629.000,00)
				Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Rp10.000.000,00	Rp5.371.000,00	(Rp4.629.000,00)
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				Rp155.000.000,00	Rp111.579.000,00	(Rp43.421.000,00)
	31	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			Rp10.000.000,00	Rp5.345.000,00	(Rp4.655.000,00)
				Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Rp10.000.000,00	Rp5.345.000,00	(Rp4.655.000,00)
	32	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			Rp145.000.000,00	Rp106.234.000,00	(Rp38.766.000,00)
				Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Rp145.000.000,00	Rp106.234.000,00	(Rp38.766.000,00)
C	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon				Rp1.634.521.000,00	Rp1.255.479.500,00	(Rp379.041.500,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp309.521.000,00	Rp273.478.500,00	(Rp36.042.500,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Rp309.521.000,00	Rp273.478.500,00	(Rp36.042.500,00)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp309.521.000,00	Rp273.478.500,00	(Rp36.042.500,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
	33	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp84.000.000,00	Rp69.234.000,00	(Rp14.766.000,00)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp30.000.000,00	Rp15.234.000,00	(Rp14.766.000,00)
	34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp135.106.000,00	Rp113.829.500,00	(Rp21.276.500,00)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp85.106.000,00	Rp63.829.500,00	(Rp21.276.500,00)
	35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp90.415.000,00	Rp90.415.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp77.000.000,00	Rp77.000.000,00	Rp0,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp13.415.000,00	Rp13.415.000,00	Rp0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp1.325.000.000,00	Rp982.001.000,00	(Rp342.999.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			Rp1.325.000.000,00	Rp982.001.000,00	(Rp342.999.000,00)
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Rp1.170.000.000,00	Rp872.450.000,00	(Rp297.550.000,00)
	36	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Rp1.160.000.000,00	Rp865.006.000,00	(Rp294.994.000,00)
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp1.010.000.000,00	Rp754.091.000,00	(Rp255.909.000,00)
			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Rp10.000.000,00	Rp5.915.000,00	(Rp4.085.000,00)
			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Rp140.000.000,00	Rp105.000.000,00	(Rp35.000.000,00)
	37	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Rp10.000.000,00	Rp7.444.000,00	(Rp2.556.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN				PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
				Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Rp10.000.000,00	Rp7.444.000,00	(Rp2.556.000,00)
				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rp155.000.000,00	Rp109.551.000,00	(Rp45.449.000,00)
		38		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Rp10.000.000,00	Rp6.170.000,00	(Rp3.830.000,00)
				Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Rp10.000.000,00	Rp6.170.000,00	(Rp3.830.000,00)
		39		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rp145.000.000,00	Rp103.381.000,00	(Rp41.619.000,00)
				Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Rp145.000.000,00	Rp103.381.000,00	(Rp41.619.000,00)
D	UPTD Laboratorium Lingkungan				Rp1.082.000.000,00	Rp1.135.789.600,00	Rp53.789.600,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp1.082.000.000,00	Rp1.135.789.600,00	Rp53.789.600,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Rp1.082.000.000,00	Rp1.135.789.600,00	Rp53.789.600,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp585.400.000,00	Rp491.202.000,00	(Rp94.198.000,00)
		40		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp295.400.000,00	Rp277.702.000,00	(Rp17.698.000,00)
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp60.789.400,00	Rp60.789.400,00	Rp0,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp182.810.600,00	Rp182.810.600,00	Rp0,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp44.800.000,00	Rp27.102.000,00	(Rp17.698.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
	41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp290.000.000,00	Rp213.500.000,00	(Rp76.500.000,00)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp240.000.000,00	Rp163.500.000,00	(Rp76.500.000,00)
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Rp496.600.000,00	Rp644.587.600,00	Rp147.987.600,00
	42	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		Rp409.600.000,00	Rp601.287.600,00	Rp191.687.600,00
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Rp250.000.000,00	Rp125.260.000,00	(Rp124.740.000,00)
			Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Rp35.000.000,00	Rp312.779.600,00	Rp277.779.600,00
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Rp124.600.000,00	Rp163.248.000,00	Rp38.648.000,00
	43	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Rp87.000.000,00	Rp43.300.000,00	(Rp43.700.000,00)
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp87.000.000,00	Rp43.300.000,00	(Rp43.700.000,00)
E	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan			Rp1.434.675.500,00	Rp1.192.901.500,00	(Rp241.774.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp429.675.500,00	Rp365.928.500,00	(Rp63.747.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			Rp429.675.500,00	Rp365.928.500,00	(Rp63.747.000,00)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rp429.675.500,00	Rp365.928.500,00	(Rp63.747.000,00)
	44	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp141.870.000,00	Rp126.870.000,00	(Rp15.000.000,00)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp16.870.000,00	Rp16.870.000,00	Rp0,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN				PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp30.000.000,00	Rp15.000.000,00	(Rp15.000.000,00)
	45	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp63.312.500,00	Rp63.312.500,00	Rp0,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp63.312.500,00	Rp63.312.500,00	Rp0,00
	46	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp224.493.000,00	Rp175.746.000,00	(Rp48.747.000,00)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp176.717.000,00	Rp127.970.000,00	(Rp48.747.000,00)
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp47.776.000,00	Rp47.776.000,00	Rp0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp1.005.000.000,00	Rp826.973.000,00	(Rp178.027.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				Rp1.005.000.000,00	Rp826.973.000,00	(Rp178.027.000,00)
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Rp1.005.000.000,00	Rp826.973.000,00	(Rp178.027.000,00)
	47	Perbenihan Tanaman Hutan			Rp1.005.000.000,00	Rp826.973.000,00	(Rp178.027.000,00)
				Sertifikasi Sumber Benih	Rp105.000.000,00	Rp20.150.000,00	(Rp84.850.000,00)
				Sertifikasi Mutu Benih	Rp5.000.000,00	Rp2.855.000,00	(Rp2.145.000,00)
				Sertifikasi Mutu Bibit	Rp35.000.000,00	Rp18.370.000,00	(Rp16.630.000,00)
				Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Rp5.000.000,00	Rp3.800.000,00	(Rp1.200.000,00)
				Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Rp850.000.000,00	Rp777.998.000,00	(Rp72.002.000,00)
				Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Rp5.000.000,00	Rp3.800.000,00	(Rp1.200.000,00)
F	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten				Rp9.872.500.000,00	Rp5.630.158.500,00	(Rp4.242.341.500,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp9.002.500.000,00	Rp4.893.716.500,00	(Rp4.108.783.500,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Rp9.002.500.000,00	Rp4.893.716.500,00	(Rp4.108.783.500,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rp9.002.500.000,00	Rp4.893.716.500,00	(Rp4.108.783.500,00)
	48	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp299.842.000,00	Rp271.136.500,00	(Rp28.705.500,00)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.740.000,00	Rp8.055.000,00	(Rp2.685.000,00)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp134.930.000,00	Rp158.897.500,00	Rp23.967.500,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp103.352.000,00	Rp78.380.000,00	(Rp24.972.000,00)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp5.640.000,00	Rp4.564.000,00	(Rp1.076.000,00)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp45.180.000,00	Rp21.240.000,00	(Rp23.940.000,00)
	49	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp5.860.761.000,00	Rp2.201.938.000,00	(Rp3.658.823.000,00)
			Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp162.017.600,00	Rp162.017.600,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp456.899.000,00	Rp456.899.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp5.860.761.000,00	Rp1.583.021.400,00	(Rp4.277.739.600,00)
	50	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp241.724.000,00	Rp195.469.000,00	(Rp46.255.000,00)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp241.724.000,00	Rp195.469.000,00	(Rp46.255.000,00)
	51	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp2.600.173.000,00	Rp2.225.173.000,00	(Rp375.000.000,00)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp223.416.000,00	Rp205.516.000,00	(Rp17.900.000,00)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp2.376.757.000,00	Rp2.019.657.000,00	(Rp357.100.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp870.000.000,00	Rp736.442.000,00	(Rp133.558.000,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			Rp870.000.000,00	Rp736.442.000,00	(Rp133.558.000,00)
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			Rp870.000.000,00	Rp736.442.000,00	(Rp133.558.000,00)
	52	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Rp870.000.000,00	Rp736.442.000,00	(Rp133.558.000,00)
			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Rp20.000.000,00	Rp12.740.000,00	(Rp7.260.000,00)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN				PAGU (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	
				Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
				Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Rp60.000.000,00	Rp48.310.000,00	(Rp11.690.000,00)
				Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Rp70.000.000,00	Rp53.510.000,00	(Rp16.490.000,00)
				Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
				Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Rp450.000.000,00	Rp406.680.000,00	(Rp43.320.000,00)
				Penataan kawasan Tahura Provinsi	Rp250.000.000,00	Rp195.202.000,00	(Rp54.798.000,00)
Jumlah Total					Rp77.234.605.000	Rp69.838.668.805	(7.395.936.195,00)

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

LKPJ TA-2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN 2025**

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan (IKU DLHK)

A. Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah menyelenggarakan bidang urusan pemerintah daerah terdiri dari: **(a) urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Lingkungan hidup, (b) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan.**

Secara umum pelaksanaan Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2025 berjalan dengan baik. Target realisasi serta capaian Indikator kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Pencapaian Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Udara (IKU)	64,27	65,58	102,04%
		Indeks Kualitas Air (IKA)	67,53	71,3	105,58%
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	83,06	85,73	103,21%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,84	62,59	101,21%
		(Satuan Nilai)			
2	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Persentase)	9,8	10,06	102,65%
3	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor <i>Forestry And Other Land Use (Folu)</i>	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Persentase)	41,67	39,31	94,34%

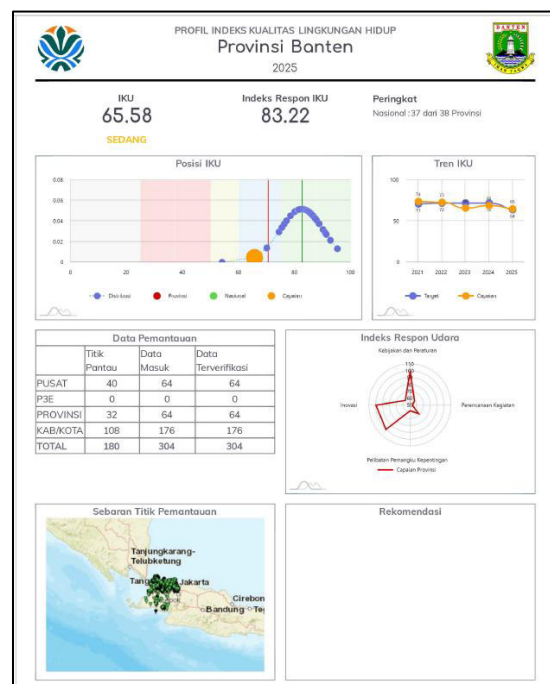
Sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan air laut dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem dengan indikator sasaran yaitu:

a. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, Adapun Rumus Perhitungan IKU yaitu :

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$

Indeks Kualitas Udara di Provinsi Banten pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 64,27 berdasarkan hasil pemantauan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Udara untuk Provinsi Banten sebesar 65,58 (capaian terhadap target 102,04%)



Gambar 2. Hasil Perhitungan IKU Provinsi Banten

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Adapun Rumus Perhitungan IKA yaitu:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata)

Indeks Kualitas Air di Provinsi Banten pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 67,53 berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Air di Provinsi Banten adalah 71,53 (capaian terhadap target 105,58%)



Gambar 3. Hasil Perhitungan IKA Provinsi Banten

c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Adapun Rumus Perhitungan IKAL yaitu:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat	$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ Q_i : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i, W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke i, n : Jumlah parameter kualitas air laut

Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Banten pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 83,06 berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Banten adalah 85,73 (capaian terhadap target 103,21%)



Gambar 4. Hasil Perhitungan IKAL Provinsi Banten

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Sasaran Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun Rumus perhitungan IKTL adalah sebagai berikut :

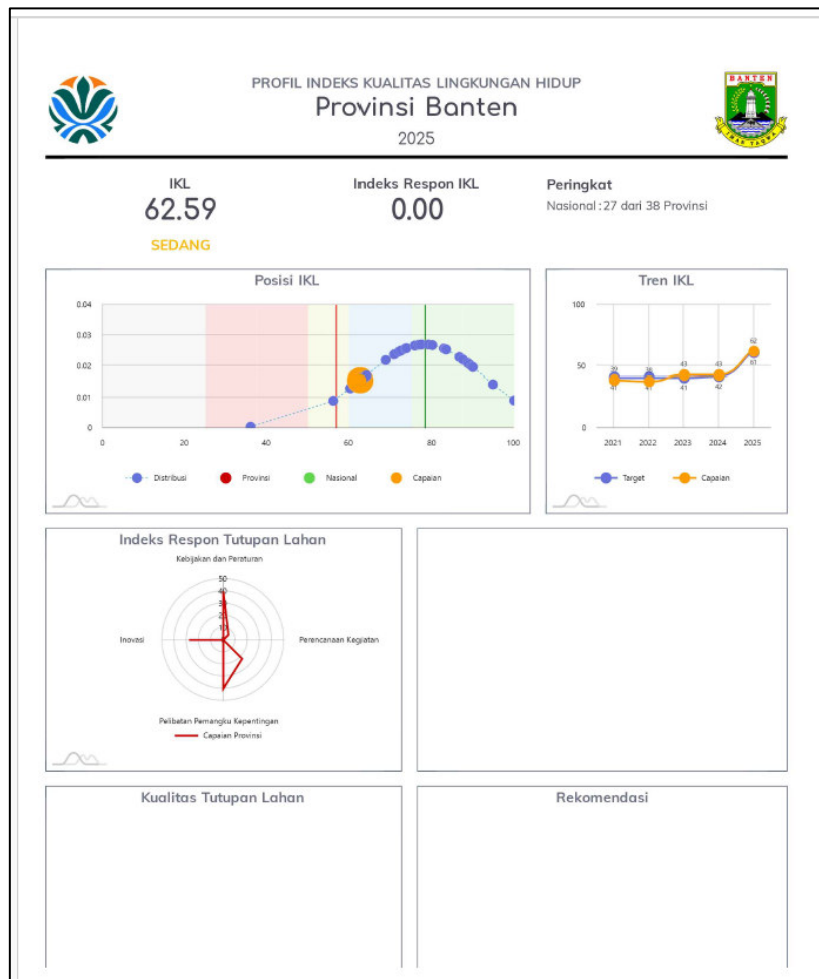
$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$$

dimana,

TL : Tutupan lahan

C : Koefisien kelas tutupan lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Banten pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 61,84 berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Banten adalah 62,59 (capaian terhadap target 101,21%)



Gambar 5. Hasil Perhitungan IKTL Provinsi Banten

e. Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Limbah

Sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah dengan indikator sasaran Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah.

Adapun Rumus perhitungan Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor limbah menggunakan rumus dari Aksara Bappenas.

Target Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah berdasarkan Renstra 2025 – 2029 pada Tahun 2025 sebesar 9,8% dan diperoleh capaian Nilai Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Limbah di Provinsi Banten sebesar 10,06% (capaian terhadap target 102,65%)

f. Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

Sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor *Forestry And Other Land Use (Folu)* dengan indikator Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan.

Adapun Rumus perhitungan Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan menggunakan rumus dari Aksara Bappenas.

Target Capaian Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan berdasarkan Renstra 2025 – 2029 pada Tahun 2025 sebesar 41,67% dan diperoleh capaian Nilai Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Limbah di Provinsi Banten sebesar 39,31% (capaian terhadap target 94,34%)

B. Capaian Pelaksanaan Kinerja Program

Capaian kinerja tercapai dikarenakan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada program dapat mendukung capaian target kinerja yang ditetapkan. Berikut penjelasan capaian setiap program dan kegiatan :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas. Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Rumus perhitungan indikator yang digunakan adalah Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang berkualitas = $\frac{\Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)}}{\Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang divalidasi yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)}} \times 100\%$.

a. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

Capaian Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 ini dapat tercapai sebesar 100% (Prosentase Capaian 100%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang berkualitas = $\frac{\Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)}}{\Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang divalidasi yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)}} \times 100\%$	Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100%	1. Dokumen Rekomendasi Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 2. Dokumen Rekomendasi Validasi KLHS RPJMD Kota Tangerang tahun 2025-2029 3. Dokumen Rekomendasi Validasi KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2029 4. Dokumen Rekomendasi Validasi KLHS RTRW Kota Tangerang Selatan 5. Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Banten terdapat 5 Dokumen	= 5/5 x 100%	100	100

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Rumus perhitungan yang digunakan Σ lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dibagi target lokasi 4 tahun dikali 100. Target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 71 % Capaian tahun 2025 adalah 66,66% (Prosentase Capaian 93,49%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	Capaian %
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup = Σ lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dibagi target lokasi 4 tahun	Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah persentase dari pencapaian upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	BIDANG PSLB3PP	KEPALA BIDANG PSLB3PP	71%	1. Realisasi upaya adaptasi perubahan iklim melalui pembinaan program komunitas iklim di 30 lokasi. 2. Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Provinsi Tingkat sebanyak 52 Lokasi 3. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebanyak 100 Lokasi Total capaian realisasi = $30+52+100 = 182$ Lokasi Target Lokasi 4 tahun adalah : 1. Target pencegahan pencemaran 220 lokasi 2. Target penanggulangan pencemaran 13 titik 3. Target Pemulihan Pencemaran/proklam 60 titik jadi total target 275 Lokasi	$= (182/275) \times 100$ $= 66,66\%$	66,66%	93,49%

- 2) Indikator Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan. Rumus perhitungan yang digunakan Indikator Kerja Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan $IK = (\% IK \text{ Peningkatan Kompetensi} + \% IK \text{ Pelayanan}) / (\text{Total } \% IK) \times 100 = \%$. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 22,5% , Realisasi pada tahun 2025 adalah 21,33% (Prosentase Capaian 94,80%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	Capaian %
2a	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	Indikator Kerja peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan $IK = (\% IK \text{ Peningkatan Kompetensi} + \% IK \text{ Pelayanan}) / (\text{Total } \% IK) \times 100\%$	Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan adalah Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Parameter Kualitas Lingkungan dan Pelayanan Pengujian Parameter Lingkungan Kepada Masyarakat	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	22,50%	IK Peningkatan Kompetensi terdiri dari : - IK Lingkup Akreditasi = $(5 \text{ parameter} / 8 \text{ parameter}) \times 21,8 = 1,36$ - IK Pembinaan Mutu = $(6 \text{ orang} / 100 \text{ Orang}) \times 21,8 = 1,30$ IK Pelayan terdiri dari : - IK Pengujian Internal = $(25 \text{ sampel} / 600 \text{ sampel}) \times 21,8 = 0,90$ - IK Pengujian Eksternal = $(50 \text{ Sampel} / 1000 \text{ Sampel}) \times 21,8 = 1,09$	$IK = (1,36+1,30+0,90+1,09) / 21,8 \times 100\%$ $IK = 4,65/21,8$ $IK = 21,33\%$	21,33%	94,80%

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ini adalah :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)
3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah Persentase Pencapaian Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah presentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun.

Rumus perhitungan indicator yang digunakan adalah Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati = $(\Sigma \text{ rencana induk pengelolaan kehati yang disusun} + \Sigma \text{ jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitasnya dalam pengelolaan kehati} + \Sigma \text{ dokumen laporan sarana dan prasarana pengelolaan kehati yang dikelola}) \text{ tahun berjalan dibagi target pengelolaan 14 dokumen dalam 4 tahun dikali } 100\%$.

Target Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Hidup pada tahun 2025 adalah sebanyak 14,28 Persen

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Hidup ini adalah :

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Tahun 2025 ini adalah sebesar 14,28% (Prosentase Capaian 100%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	Capaian %
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati = $(\Sigma \text{ rencana induk pengelolaan kehati yang disusun} + \Sigma \text{ jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitasnya dalam pengelolaan kehati} + 2 \text{ dokumen laporan sarana dan prasarana pengelolaan kehati yang dikelola}) \text{ tahun berjalan dibagi target pengelolaan 14 dokumen dalam 4 tahun dikali } 100\%$	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah presentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun	BIDANG PSLB3PP	KEPALA BIDANG PSLB3PP	14%	1. Subkegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi sebanyak 2 Dokumen Target 14 Dokumen dalam 4 tahun	$= \frac{2}{14} \times 100\% = 14,28\%$	14,28%	100%

4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Indikator Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH adalah Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (%). Persentase jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang ditetapkan oleh Kementerian LHK dalam upaya pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup setiap tahun.

Rumus perhitungan indicator yang digunakan adalah Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100%.

Target Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH pada tahun 2025 adalah sebanyak 11.76 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH ini adalah :

1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Capaian Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH pada Tahun 2025 ini adalah : 11,76% (Prosentase Capaian 100%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (%)	= Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100%	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah presentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun	BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	11,76%	1. MHA Cibedug 2. MHA Cisungang 3. MHA Cirompang 4. MHA Citorek 5. MHA Cistitu Target Realisasi 2 MHA Jumlah MHA Potensial sebanyak 17	= 2/17 x 100% = 11,76%	11,76%	100,00%

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Pnyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Indikator Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%). Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga.

Rumus perhitungan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi jumlah target lembaga tiap tahun yang akan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup x 100%.

Target Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun 2025 adalah sebanyak 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

Capaian Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada Tahun 2025 ini adalah 100% (prosentase capaian 100%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	= Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi jumlah target lembaga tiap tahun yang akan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup x 100%	lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga	BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100%	1. Sub keg Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye LH sebanyak 50 org. berlokasi di Pasar Anyar Kampung Berkilir Kota Tangerang. Realisasi capaian = $50/50 \times 100\% = 100\%$ 2. Sub Keg Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH dengan realisasi 2 lembaga yaitu Bank Sampah Ciceri Jaya Berseri (Sumurpicing Kec Serang) dan Bank Sampah Al Malik (Kec Pontang, Kab Serang). Realisasi Capaian = $2/2 \times 100 = 100\%$	= $(100\% + 100\%) / 2 = 100\%$	100%	100%

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga/Kab.Kota). Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga, Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan.

Rumus perhitungan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga + Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan.

Target Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun 2025 adalah sebanyak 68 Lembaga.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Capaian Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada Tahun 2025 ini adalah : 99 Sekolah Adiwiyata (Prosentase capaian 145,59%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	Capaian %
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga/ Kab.Kota)	= Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga + jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga, jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	68	1. Sekolah adiwiyata provinsi (SAP) sebanyak 56 sekolah 2. sekolah adiwiyata Nasional (SAN) sebanyak 30 Sekolah 3. sekolah adiwiyata mandiri (SAM) sebanyak 13 Sekolah	= 99 Sekolah Adiwiyata	= 99 Sekolah Adiwiyata	145,59%

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup (%). Banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup adalah meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan :

1. Memiliki dokumen dan perizinan dibidang lingkungan hidup secara lengkap dan belum habis masa berlakunya.
2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup.
3. Mengirimkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin sesuai peraturan.

Rumus perhitungan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah

$$=((\text{Jumlah industri yang diawasi} - \text{jumlah industri yang tidak taat}))/(\text{Jumlah industri yang diawasi}) \times 100\%$$

Target Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2025 adalah 90 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah :

1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Tahun 2025 adalah 111% (Prosentase capaian sebesar 123%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	Capaian %
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	= jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH nya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di kali 100%	Banyaknya pelaku usaha /kegiatan yang dilaksanakan pembinaan dan Pengawasan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	90%	Jumlah Persetujuan lingkungan : 82 Jumlah Rincian Teknis B3 : 8 1. Terdapat 90 pelaku usaha yang izin lingkungan dan izin PPLH nya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2. Telah dilakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap 100 pelaku usaha	= (82/100) x 100% = 90%	111%	123%

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator Program penanganan pengaduan lingkungan hidup adalah Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (%). Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan :

- a) Pemeriksaan kelengkapan pengaduan
- b) Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan
- c) Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan
- d) Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan

Rumus perhitungan Program penanganan pengaduan lingkungan hidup adalah Jumlah pengaduan yang masuk dikurangi jumlah pengaduan yang tidak selesai dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%

Target Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 adalah 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup adalah :

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Tahun 2025 ini adalah 100% (Prosentase Capaian 100%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (%)	$= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan : 1. Pemeriksaan kelengkapan pengaduan 2. Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan 3. Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan 4. Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan	BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100%	1. Jumlah Pengaduan yang masuk = 55 2. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti = 55	$= \frac{55}{55} \times 100\% = 100\%$	100%	100%

9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Indikator Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 (%).Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3

Rumus perhitungan Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah Persentase Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan

Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 = Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan.

Target Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada tahun 2025 adalah 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah :

1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Capaian Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada Tahun 2025 ini adalah 100% (Prosentase capaian 100%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	Persentase Dokumen Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 = Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan	Dokumen Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	BIDANG PSLB3PP	KEPALA BIDANG PSLB3PP	100%	1. Jumlah Permohonan fasilitas pemenuhan komitmen limbah B3 - Yang Masuk : 4 perusahaan - Yang ditindaklanjuti : 4 perusahaan Realisasi capaian = $4/4 \times 100\% = 100\%$ 2. Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 - Target koordinasi : 4 kali - Jumlah sinkronisasi yang dilaksanakan : 4 perusahaan Realisasi capaian = $4/4 \times 100\% = 100\%$	$= 100\% + 100\% / 2 = 100\%$	100%	100%

10. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Program Pengelolaan Persampahan adalah prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi (%). Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang ditangani x 100%

Rumus perhitungan Program Pengelolaan Persampahan adalah

$$= (\Sigma \text{ sampah kerjasama tahun } n) / (\Sigma \text{ Target Volume sampah ditangani Tahun } n) \times 100\%$$

Target Program Pengelolaan Persampahan pada tahun 2025 adalah 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Persampahan adalah :

1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Capaian Program Pengelolaan Persampahan pada Tahun 2025 ini adalah

179,16% (Prosentase capaian sebesar 179,16%)

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
10	Program Pengelolaan Persampahan	prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi (%)	Jumlah sampah kerjasama tahun n dibagi Jumlah target volume sampah yang dtangani tahun n x 100%	Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang dtangani x 100%	BIDANG PSLB3PP	KEPALA BIDANG PSLB3PP	100%	Jumlah sampah kerjasama pada tahun 2025 adalah sebanyak : - Sampah d tangani Banten Lama 116,18 ton - Sampah d tangani di Teluk Labuan 537,76 ton Total Realisasi Capaian = 653,94 Ton Target Volume sampah yang ditangani pada tahun 2025 adalah sebanyak 365 Ton	= (653,94 Ton/365 Ton) x 100% = 179,16%	179,16%	179,16%

11. Program Pengelolaan Hutan

Indikator Program Pengelolaan Hutan adalah:

- Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (%).
- Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah Lebak dan Tangerang.
- Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.
- Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat.

Rumus perhitungan Indikator Program Pengelolaan Hutan untuk masing masing indiKator adalah :

- Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (%) = $\frac{\text{Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit management Hasil Hutan Kayu \& Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun}}{100\%}$.
- Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah Lebak dan Tangerang adalah Jumlah Lahan yang terehabilitasi = Σ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT
- Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah Jumlah Lahan yang terehabilitasi = Σ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC
- Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat adalah Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat

atau lembaga dengan rumus perhitungan Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat dibagi Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia dikali 100%

Target Indikator Program Pengelolaan Hutan pada tahun 2025 untuk masing masing indikator adalah

- a. Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (25 %).
- b. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah Lebak dan Tangerang (2.500 Ha).
- c. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (2.500 Ha).
- d. Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat (90%).

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Hutan adalah :

1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
3. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara;
4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
5. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun;
6. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK T)Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun (CDLHK LT)
7. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)
8. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun (CDLHK PSC)
9. Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD SPTH)

Capaian Program Pengelolaan Hutan pada tahun 2025 untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut :

- a. Capaian persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan adalah sebesar 31,52 % dengan prosentase capaian sebesar 126,08%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	
11	Program Pengelolaan Hutan	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (%)	Jumlah dokumen perencanaan hutan tahun ke n + jumlah dokumen pemanfaatan hutan tahun ke n + jumlah unit manajemen HHK tahun ke n + jumlah unit manajemen HHBK tahun ke n dibagi target 4 tahun	Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit management Hasil Hutan Kayu & Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun x 100%	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	25%	1. Realisasi Dokumen perencanaan hutan : 4 Dokumen 2. Realisasi dokumen pemanfaatan hutan : 3. Realisasi unit manajemen HHK : 2 Unit 4. Realisasi Unit Manajemen HHBK : 23 Unit Manajemen Target 4 Tahun 1. Dokumen Perencanaan = 20 Dokumen 2. Dokumen Pemanfaatan Hutan = 16 Dokumen 3. Target Unit Manajemen HHK = 40 Unit Manajemen 4. Target Unit Manajemen HHBK = 16 Unit Manajemen	$= \frac{(4+2+23)}{(20+16+40+16)} \times 100\%$	31,52%	126,08%

b. Capaian luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah Lebak dan Tangerang adalah seluas 4.906,61 Ha dengan prosentase capaian sebesar 196,26%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	
11a	Program Pengelolaan Hutan	Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang	Jumlah Lahan yang ter rehabilitasi = Σ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang ter rehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang ter rehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Rersapan, Gullyplug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah lebak dan tangerang	CDK LT	KEPALA CDK LT	2500 Ha	Jumlah pohon yang ditanam = 1.645.216 batang atau seluas 4.906,61 Ha	4.906,61 Ha	4.906,61 Ha	196,26%

c. Capaian Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah seluas 1.945,55 Ha dengan prosentase capaian sebesar 77,82%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	
11b	Program Pengelolaan Hutan	Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Jumlah Lahan yang ter rehabilitasi = Σ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman (vegetatif) dan kegiatan penunjangnya wilayah pandeglang serang cilegon	CDK PSC	KEPALA CDK PSC	2500 Ha	Jumlah Bibit tertanam seluas 1945,55 Ha	1945,55 Ha	1945,55 Ha	77,82%

d. Capaian persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat adalah 83,40% dengan prosentase capaian sebesar 92,67%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	
11c	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat = $\frac{\text{Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat}}{\text{Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia dikali 100\%}}$	Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	UPTD SPTH	KEPALA UPTD SPTH	90%	- Jumlah bibit Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat sebanyak 208.502 batang - Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia sebanyak 250.000 batang	$= \frac{208.502}{250.000} \times 100\% = 83,4\%$	83,40%	92,67%

12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Indikator Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun (%).

Adapun Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi 5 DAS Prioritas di Provinsi Banten.

Rumus perhitungan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah:

$$\frac{\text{Jumlah DAS yang ditangani Tahun N}}{\text{Jumlah Keseluruhan DAS Prioritas}} \times 100\%$$

Target Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada tahun 2025 adalah 20%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah :

1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Capaian Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Tahun 2025 ini adalah sebesar 60% dengan Prosentase capaian sebesar 300%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
12	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	Jumlah DAS yang ditangani Tahun N dibagi Jumlah Keseluruhan DAS Prioritas dikali 100%	Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi 5 DAS Prioritas di Provinsi Banten	BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20%	Jumlah DAS yang ditangani : DAS Cijung, Cidanau dan Cibanten DAS Prioritas yaitu : Cidurian, Cijung, Cidanau, Cibanten, Cisdane	= 3/5 x 100 = 60%	60%	300%

13. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Indikator Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya adalah:

- a. Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun
- b. Persentase Pengelolaan TAHURA Banten
- c. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang.
- d. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon

Rumus perhitungan Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk masing masing indicator adalah :

- a. Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %
- b. Persentase Pengelolaan TAHURA Banten = Rata-rata Persentase Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
- c. Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun di wilayah LT
- d. Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun di wilayah PSC

Target Indikator Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pada tahun 2024 untuk masing masing indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun 28,57%.
- b. Persentase Pengelolaan TAHURA Banten 100 %
- c. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang 12 Kelompok
- d. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon 12 Kelompok

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya adalah :

1. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
2. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
3. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES (*Convension On*

International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)

4. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)
5. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES (*Convension On International Trade In Endangered Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)
6. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)

Capaian Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pada tahun 2025 untuk masing masing indikator adalah :

- a. Capaian Indikator Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani per Tahun adalah sebesar 28.57% dengan prosentase capaian sebesar 100%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
13	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Meningkatnya Fungsi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %	Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang ditangani setiap tahun dibagi 14 kawasan ekosistem bernilai penting di provinsi banten	BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	28,57%	Jumlah lokasi : yang ditangani sebanyak 4 KEE (Taman Kehati Kaduberem, Lokasi mangrove center banten, Taman kehati Maja, Hutan Adat Meranti kesepuhan kuranji) = 4/14 x 100% = 28.57% Target Lokasi : 14 Lokasi (kawasan daerah penyangga ekosistem penting di provinsi banten)	= 4/14 x 100% = 28,57%	28,57%	100%

- b. Capaian persentase Pengelolaan TAHURA Banten capaian kinerja nya sebesar 100% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
13a	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura	Pengelolaan tahura meliputi pengelolaan hutan konservasi untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, pelestarian budaya dan potensi flora, fauna serta sarana prasarana penunjangnya.	TAHURA	KEPALA UPTD TAHURA BANTEN	100%	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura = 50% + 50% = 100%	= 50% + 50% = 100%	100%	100%

- c. Capaian indikator jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang adalah 12 kelompok dengan prosentase capaian sebesar 100%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	
13b	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang	CDK LT	KEPALA CDK LT	12 Kelompok	Pemberdayaan Masyarakat pada kawasan bernilai ekosistem penting: 1. KTH Mulya Tani, Ciakar 2. KTH Alam Jaya, Karoya 3. KTH Bocah Gunung, Cileles 4. KTH Rasamulya, Wanasalam 5. KTH Surya Makmur, Malimping 6. KTH Sumber Asih, Cijaku 7. KTH Muda Mandiri, Malimping 8. KTH Mufakat, Banjarsari 9. KTH Sumber Alam, Cihara 10. KTH Karya Mukti, Cijaku 11. KTH Mulyasari, Wanasalam 12. KTH Bukit Tunas, Panggarangan	12 Kelompok	12 Kelompok	100%

- d. Capaian indikator Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang adalah 12 kelompok dengan prosentase capaian sebesar 100%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	
13c	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	CDK PSC	KEPALA CDK PSC	12 Kelompok	Pemberdayaan Masyarakat pada kawasan bernilai ekosistem penting: 1. KTH Tunas Baru, Anyer 2. KTH Salam Sejahtera, Kan. Pandeglang 3. KTH Kopi Batu Lawang 4. KTH Utes Berkah, Kab. Pandeglang 5. KTH Harapan Bangsa, Carita Kab. Pandeglang 6. KTH Sejahtera, Carita 7. KTH Jari Tunggal, Carita 8. KTH Wana Lestari, Labuan 9. KTH Putra Sindang Laya, Labuan 10. KTH Bina Lestari, Panimbang 11. KTH Triguna Laksana, Sobang 12. KPPAD Budi Daya Ikan dan Udang	12 Kelompok	12 Kelompok	100%

14. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan

Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan adalah Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok). Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan (KTH), Forest Managemen Unit (FMU), Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial.

Rumus perhitungan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan adalah Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat = Σ KTH + FMU + Σ Penyuluh + Σ Kelompok Perhutanan Sosial.

Target Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan pada tahun 2025 adalah 52 Kelompok.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan

adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Capaian Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan pada Tahun 2025 ini adalah 55 kelompok dengan prosentase capaian sebesar 105,77%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	
14	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok)	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat = Σ KTH + FMU + Σ Penyuluh + Σ Kelompok Perhutanan Sosial	Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan (KTH), Forest Managemen Unit (FMU), Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial	BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	52 Kelompok	1. Jumlah KTH : 47 Kelompok 2. Jumlah FMU : 0 Kelompok 3. Jumlah Penyuluh : 1 Orang 4. Jumlah Kelompok PS : 7 Kelompok Total 55 Kelompok	= 47 + 0 + 1 + 7 = 55 Kelompok	55 Kelompok	105,77%

15. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu.

Rumus perhitungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah = Σ Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi /Jumlah Kegiatan yang diampu

Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2025 adalah 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)
14. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laborototium Lingkungan)
15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laborototium Lingkungan)
16. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)
17. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)
18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)
19. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
20. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
21. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
22. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Tahun 2025 ini adalah sebesar 100% dengan Prosentase capaian sebesar 100%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai / Hasil	
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	$= \sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi} / \text{Jumlah Kegiatan yang diampu}$	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	DINAS LHK	SEKRETARIS DINAS LHK	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 7 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (7)	= 700/7	100%	100%
						KEPALA CDK LEBAK TANGERANG	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 3 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	= 300/3	100%	100%
						KEPALA CDK PANDEGLANG SERANG CILEGON	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 3 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	= 300/3	100%	100%
						KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 2 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (2)	= 200/2	100%	100%
						KEPALA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 3 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	= 300/3	100%	100%
						KEPALA UPTD TAHURA	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 4 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (4)	= 400/4	100%	100%

C. Capaian Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan/Keluaran dan sub kegiatan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Piihan Bidang Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
TRIWULAN : 4
APBD : APBD Perubahan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Saaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi sld Triwulan ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.3.28.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDIK)					59.237.281.705,00	32,31		19.145.779.771,00	31,72		10.664.350.087,00	98,19	55,70	96,06		47.803.591.581,40		80,70		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					55.772.179.705,00	32,17		17.951.687.782,00	31,55		9.720.852.434,00	98,07	54,15	96,00		44.586.929.417,40		79,94		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		45.161.696.205,00	27,39		12.379.137.557,00	27,15		9.229.275.619,00	99,10	74,56	99,14		40.141.998.690,83		88,89		
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		100,00		479.494.000,00	40,68		195.035.390,00	40,68		469.709.660,00	100,00	75,81	99,73		469.709.660,00	99,73	97,96		
2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		4,00	88.598.000,00	4,41	2,00	3.905.190,00	4,41	0,00	1.150.000,00	100,00	29,45	100,00	2,00	88.292.810,00		99,66		
	Dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 (Dokumen)		100,00	1,00	53.398.000,00	0,35	0,00	185.190,00	0,35	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	53.212.810,00	100,00	99,65	kegiatan sudah terlaksana sesuai rencana di angkas ,target anggaran Rp. 185.190 adalah sisa dari ATK dan masuk ke dalam silpa TA 2025.	sudah berkoordinasi dengan keuangan
	Dokumen Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2026 (Dokumen)		100,00	1,00	24.520.000,00	3,14	1,00	770.000,00	3,14	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	24.400.000,00	100,00	99,51	kegiatan sudah terlaksana sesuai rencana di angkas ,target anggaran Rp. 120.000 adalah sisa dari ATK dan masuk ke dalam silpa TA 2025.	sudah berkoordinasi dengan keuangan
	Dokumen Rencana Kerja Perubahan DLHK Provinsi Banten Tahun 2025 (Dokumen)		100,00	1,00	5.360.000,00	55,14	1,00	2.960.000,00	55,14	0,00	1.150.000,00	100,00	38,98	100,00	0,00	5.360.000,00	100,00	100,00	tidak ada target kegiatan	
	Dokumen Analisa Risiko Kegiatan DLHK Provinsi Banten Tahun 2026 (Dokumen)		100,00	1,00	5.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	5.330.000,00	100,00	100,00	tidak ada target kegiatan	
2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		1,00	12.470.000,00	78,35	1,00	9.770.000,00	78,35	0,00	1.570.000,00	100,00	16,07	100,00	0,00	11.470.000,00		91,98		
	Dokumen RKA SKPD (Dokumen)		100,00	1,00	12.470.000,00	78,35	1,00	9.770.000,00	78,35	0,00	1.570.000,00	100,00	16,07	100,00	0,00	11.470.000,00	100,00	91,98	tidak ada target kegiatan	
2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		1,00	12.570.000,00	78,04	1,00	9.810.000,00	78,04	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	10.999.900,00		87,51		
	Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)		100,00	1,00	12.570.000,00	78,04	1,00	9.810.000,00	78,04	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	10.999.900,00	100,00	87,51	kegiatan sudah terlaksana , target Rp.100 sisa dari atk dan masuk ke dalam lap.silpa	sudah berkoordinasi dengan keuangan
2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		1,00	9.662.000,00	100,00	1,00	9.662.000,00	100,00	1,00	12.060.010,00	100,00	124,82	100,00	1,00	12.060.010,00		124,82		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	18	20	21
	Dokumen DPA SKPD (Dokumen)		100,00	1,00	9.662.000,00	100,00	1,00	9.662.000,00	100,00	1,00	12.060.010,00	100,00	124,82	100,00	1,00	12.060.010,00	100,00	124,82	kegiatan rapat sudah terlaksana dan kegiatan honor lembur belum di cairkan dikarenakan belum ada surat edaran dr dptkad	sudah berkoordinasi dengan keuangan
2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		1,00	9.662.000,00	100,00	1,00	9.662.000,00	100,00	1,00	6.362.000,00	100,00	65,85	100,00	1,00	9.662.000,00		100,00		
	Dokumen Perubahan DPA SKPD (Dokumen)		100,00	1,00	9.662.000,00	100,00	1,00	9.662.000,00	100,00	1,00	6.362.000,00	100,00	65,85	100,00	1,00	9.662.000,00	100,00	100,00	tidak ada target kegiatan	koordinasi dengan keuangan
2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Satuan: Laporan)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		16,00	56.700.000,00	36,70	6,00	20.801.400,00	36,70	6,00	11.949.550,00	100,00	57,45	100,00	16,00	54.098.050,00		95,41		
	Laporan Triwulan Realisasi Fisik dan Keuangan (Laporan)		100,00	4,00	25.500.000,00	50,98	2,00	13.000.100,00	50,98	2,00	6.749.850,00	100,00	51,92	100,00	4,00	25.499.650,00	100,00	100,00	kegiatan sudah dilaksanakan sesuai angkas hanya masih menunggu proses penransferan	sudah berkoordinasi dengan keuangan
	Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan (Laporan)		100,00	12,00	31.200.000,00	25,02	4,00	7.801.300,00	25,02	4,00	5.195.700,00	100,00	66,85	100,00	12,00	28.598.400,00	100,00	91,66	kegiatan sudah terlaksana , masih menunggu proses penransferan	koordinasi dengan keuangan
2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		14,00	173.478.000,00	63,84	10,00	110.750.000,00	63,84	10,00	107.273.890,00	100,00	96,86	100,00	14,00	170.001.890,00		98,00		
	Laporan Perjanjian Kinerja, IKU, dan RKT Murni dan Perubahan DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	5.580.000,00	45,70	1,00	2.550.000,00	45,70	1,00	4.649.550,00	100,00	182,34	100,00	1,00	7.679.550,00	100,00	137,63	kegiatan sudah terlaksana di bulan november tetapi masuk ke dalam ira desember	sudah berkoordinasi dengan keuangan
	Laporan Rencana Aksi DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	3.930.000,00	49,62	1,00	1.950.000,00	49,62	1,00	1.950.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	3.930.000,00	100,00	100,00	kegiatan sudah dilaksanakan	-
	Laporan SAKIP (Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kerja) (Laporan)		100,00	1,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	1.650.000,00	100,00	100,00	-	-
	Laporan Monitoring dan Evaluasi untuk Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kerja (Laporan)		100,00	1,00	62.164.000,00	32,48	1,00	20.196.000,00	32,48	1,00	15.093.440,00	100,00	74,73	100,00	1,00	57.061.440,00	100,00	91,79	kegiatan sudah terlaksana sesuai angkas , tetapi ada beberapa kegiatan yang masuk ke LRA Di bulan desember	sudah berkoordinasi dengan keuangan
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	4.160.000,00	100,00	1,00	4.160.000,00	100,00	1,00	4.160.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	4.160.000,00	100,00	100,00	kegiatan rapat sudah dilaksanakan , tetapi belum dilakukan proses penransferan dikarenakan penransferan akan dilakukan tanggal 19 desember, dan untuk laporan LKJIP masih dalam tahap Penyusunan dan perhitungan realisasi program dan sasaran DLHK TA 2025.	sudah berkoordinasi dengan keuangan
	Laporan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	4.200.000,00	100,00	1,00	4.200.000,00	100,00	1,00	4.200.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	4.200.000,00	100,00	100,00	kegiatan sudah terlaksana sesuai angkas	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	4.073.000,00	100,00	1,00	4.073.000,00	100,00	1,00	4.073.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	4.073.000,00	100,00	100,00	rapat sudah dilaksanakan, hanya saja belum dilakukan proses penransferan karena proses penransferan akan dilaksanakan tanggal 19 desember, untuk laporan LKPJ masih dalam proses perhitungan realisasi program dan sasaran karena baru bisa dihitung jika seluruh kegiatan DLHK sudah dilaksanakan , biasanya bisa dihitung di minggu ke4 bulan desember	koordinasi dengan keuangan
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	4.073.000,00	100,00	1,00	4.073.000,00	100,00	1,00	4.073.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	4.073.000,00	100,00	100,00	rapat sudah dilaksanakan, dan masuk ke dalam LRA Desember, untuk laporan LPPD masih dalam proses perhitungan realisasi program dan sasaran karena baru bisa dihitung jika seluruh kegiatan DLHK sudah dilaksanakan , biasanya bisa dihitung di minggu ke4 bulan desember	koordinasi dengan keuangan
	Laporan SPIP DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	4.441.000,00	100,00	1,00	4.441.000,00	100,00	1,00	4.440.900,00	100,00	100,00	100,00	1,00	4.440.900,00	100,00	100,00		
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	60.577.000,00	100,00	1,00	60.577.000,00	100,00	1,00	60.434.000,00	100,00	99,76	100,00	1,00	60.434.000,00	100,00	99,76	kegiatan berbentuk kontrak dan laporan sudah di susun tetapi pencairan baru bisa dilakukan tanggal 15 desember 2025, dikarenakan tanggal selesai pekerjaan tanggal 12 desember 2025.	koordinasi dengan keuangan
	Laporan Reformasi Birokrasi DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	4.530.000,00	100,00	1,00	4.530.000,00	100,00	1,00	4.200.000,00	100,00	92,72	100,00	1,00	4.200.000,00	100,00	92,72	kegiatan sudah dilakukan di bulan november dan sudah masuk ke dalam ira bulan november	koordinasi dengan keuangan
	Laporan Inovasi DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	5.010.000,00	100,00	100,00	tidak ada target kinerja	
	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	3.390.000,00	100,00	100,00	tidak ada target kinerja	-
	Laporan Penyusunan Laporan Evaluasi Peta Proses Bisnis (Laporan)		100,00	1,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	5.700.000,00	100,00	100,00	tidak ada target kinerja	-
2.11.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Satuan: Data)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		1,00	11.870.000,00	58,05	1,00	6.890.000,00	58,05	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	11.806.800,00		99,47		
	Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		100,00	1,00	11.870.000,00	58,05	1,00	6.890.000,00	58,05	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	11.806.800,00	100,00	99,47	kegiatan sudah dilaksanakan, dan buku sudah di buat adapun target keuangan itu adalah sisa slipa dari Penggandaan	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	17	18	19	20	21
2.11.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Berita)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		3,00	72.230.000,00	0,33	0,00	240.100,00	0,33	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3,00	71.989.900,00		99,67		
	Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		100,00	1,00	32.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	31.820.000,00	100,00	98,97	-	-
	Berita Acara Forum Data Bidang LHK (Berita Acara)		100,00	1,00	19.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	19.180.000,00	100,00	97,96	-	-
	Berita Acara Forum RENGTRA DLHK Tahun 2025-2029 (Berita Acara)		100,00	1,00	20.500.000,00	1,17	0,00	240.100,00	1,17	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	20.989.900,00	100,00	102,39	kegiatan sudah selesai dilaksanakan, adapun target anggaran adalah sisa sisa dari pengandaan	-
2.11.01.1.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		4,00	32.254.000,00	41,99	4,00	13.544.700,00	41,99	4,00	7.499.700,00	100,00	55,37	95,97	4,00	29.328.300,00		90,93		
	Dokumen Pengarusutamaan Gender (PUG) (Dokumen)		100,00	1,00	5.730.000,00	23,56	1,00	1.350.100,00	23,56	1,00	0,00	100,00	0,00	77,31	1,00	4.379.900,00	77,31	76,44	kegiatan telah dilaksanakan, target anggaran Rp.100 adalah sisa dari pengandaan	
	Dokumen Penanggulangan Kemiskinan (Stunting) (Dokumen)		100,00	1,00	9.354.000,00	35,10	1,00	3.283.300,00	35,10	1,00	1.800.000,00	100,00	54,82	100,00	1,00	9.669.700,00	100,00	103,38	kegiatan sudah dilaksanakan di bulan november	berkoordinasi dengan keuangan
	okumen Rencana Kerja Penanggulangan Pencemaran Lingkungan (Dokumen)		100,00	1,00	7.880.000,00	46,97	1,00	3.701.300,00	46,97	1,00	3.699.800,00	100,00	99,96	100,00	1,00	7.398.800,00	100,00	93,89	kegiatan sudah dilaksanakan hanya belum dilakukan proses penstransferan dikarenakan proses penstransferan akan dilakukan pada tanggal 19 desember 2025	berkoordinasi dengan keuangan
	Dokumen Penyusunan Rencana Aksi Perhutanan Sosial (Dokumen)		100,00	1,00	9.290.000,00	56,07	1,00	5.210.000,00	56,07	1,00	1.999.900,00	100,00	38,39	100,00	1,00	7.879.900,00	100,00	84,82	kegiatan sudah dilaksanakan hanya belum dilakukan proses penstransferan dikarenakan proses penstransferan akan dilakukan pada tanggal 19 desember 2025	berkoordinasi dengan keuangan
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		100,00		36.586.078.800,00	26,02		9.523.861.374,00	26,02		32.915.212.164,83	100,00	80,10	100,00		32.915.212.164,83	100,00	89,97		
2.11.01.1.02.0001 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: bulan)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		12,00	36.056.200.000,00	25,88	3,00	9.336.266.374,00	25,88	3,00	7.443.574.788,00	100,00	79,73	100,00	12,00	32.399.077.694,83		89,86		
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (132 orang x 12 bulan) (Bulan)		100,00	12,00	36.056.200.000,00	25,88	3,00	9.336.266.374,00	25,88	3,00	7.443.574.788,00	100,00	79,73	100,00	12,00	32.399.077.694,83	100,00	89,86	Pembayaran TPPNS Beban Kerja Berdasarkan Kinerja Bulan Desember 2025 belum bisa dibayarkan	Pembayaran TPPNS Beban Kerja Berdasarkan Kinerja Bulan Desember 2025 akan dibayarkan sesuai arahan BPKAD pada tanggal 31 Desember 2025
2.11.01.1.02.0002 Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH., M.Si		12,00	473.938.800,00	33,50	4,00	159.430.000,00	33,50	4,00	156.988.650,00	100,00	98,47	100,00	12,00	463.617.850,00		97,82		
	Pembayaran Honorarium Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DOKUMEN)		100,00	12,00	473.938.800,00	33,50	4,00	159.430.000,00	33,50	4,00	156.988.650,00	100,00	98,47	100,00	12,00	463.617.850,00	100,00	97,82	Tidak ada permasalahan	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dama Sumapradja, SH., M.Si		2,00	12.880.000,00	61,20	1,00	7.880.000,00	61,20	0,00	7.680.000,00	100,00	97,46	100,00	1,00	12.547.500,00		97,42		
	Rapat Persiapan Sosialisasi Tata Laksana penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd (dokumen)		100,00	2,00	12.880.000,00	61,20	1,00	7.880.000,00	61,20	0,00	7.680.000,00	100,00	97,46	100,00	1,00	12.547.500,00	100,00	97,42	Tidak ada target kinerja	-
2.11.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dama Sumapradja, SH., M.Si		1,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	4.902.500,00		98,05		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (dokumen)		100,00	1,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	4.902.500,00	100,00	98,05	Tidak ada target kinerja	-
2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Budi Dama Sumapradja, SH., M.Si		2,00	13.580.000,00	63,20	1,00	8.580.000,00	63,20	1,00	8.578.620,00	100,00	99,98	100,00	2,00	13.513.620,00		99,51		
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)		100,00	2,00	13.580.000,00	63,20	1,00	8.580.000,00	63,20	1,00	8.578.620,00	100,00	99,98	100,00	2,00	13.513.620,00	100,00	99,51	Tidak ada permasalahan	-
2.11.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Budi Dama Sumapradja, SH., M.Si		2,00	14.480.000,00	65,50	1,00	9.480.000,00	65,50	1,00	9.480.000,00	100,00	100,00	100,00	2,00	14.430.000,00		99,65		
	Rapat pelaksanaan hasil evaluasi Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		100,00	2,00	14.480.000,00	65,50	1,00	9.480.000,00	65,50	1,00	9.480.000,00	100,00	100,00	100,00	2,00	14.430.000,00	100,00	99,65	Tidak ada target kinerja	-
2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Budi Dama Sumapradja, SH., M.Si		1,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	2.175.000,00		43,50		
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)		100,00	1,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	2.175.000,00	100,00	43,50	Tidak ada target kinerja	-
2.11.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Budi Dama Sumapradja, SH., M.Si		1,00	5.000.000,00	44,50	0,00	2.225.000,00	44,50	0,00	2.175.000,00	100,00	97,75	100,00	1,00	4.948.000,00		98,96		
	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)		100,00	1,00	5.000.000,00	44,50	0,00	2.225.000,00	44,50	0,00	2.175.000,00	100,00	97,75	100,00	1,00	4.948.000,00	100,00	98,96	Tidak ada target kinerja	-
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)		100,00		8.640.000,00	51,39		4.440.000,00	51,39		6.300.000,00	100,00	0,00	100,00		6.300.000,00	100,00	72,92		
2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		3,00	8.640.000,00	51,39	1,00	4.440.000,00	51,39	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	6.300.000,00		72,92		
	Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		100,00	3,00	8.640.000,00	51,39	1,00	4.440.000,00	51,39	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	6.300.000,00	100,00	72,92	- Tidak ada target aktifitas kegiatan	- Tidak ada Target di bulan Desember
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah (Persen)		100,00		55.000.000,00	0,00		0,00	0,00		54.953.745,00	NaN	NaN	0,00		54.953.745,00	0,00	99,92		
2.11.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan: Dokumen)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		1,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	1,00	4.957.144,00		99,14		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		100,00	1,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	1,00	4.957.144,00	0,00	99,14	Tidak Ada Target Realisasi	-
2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		6,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	6,00	49.996.601,00		99,99		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)		100,00	6,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	6,00	49.996.601,00	0,00	99,99	Tidak Ada Target Kinerja.	-
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)		100,00		296.647.000,00	28,09		83.306.580,00	25,46		295.313.622,00	90,64	68,21	39,84		295.313.622,00	39,84	99,55		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ugar Jatnika, SE, M.D		1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	1,00	19.741.500,00		98,71		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)		100,00	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	1,00	19.741.500,00	0,00	98,71	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN TARGET KINERJA	-
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ugar Jatnika, SE, M.D		6,00	100.000.000,00	8,39	0,00	8.390.000,00	8,39	0,00	0,00	100,00	0,00	9,89	6,00	99.432.373,00		99,43		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)		100,00	6,00	100.000.000,00	8,39	0,00	8.390.000,00	8,39	0,00	0,00	100,00	0,00	9,89	6,00	99.432.373,00	9,89	99,43	TIDAK ADA TARGET KINERJA DAN TARGET REALISASI	-
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ugar Jatnika, SE, M.D		6,00	80.000.000,00	45,49	2,00	36.385.000,00	45,49	0,00	22.740.060,00	100,00	62,50	45,49	4,00	79.841.820,00		99,80		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)		100,00	6,00	80.000.000,00	45,49	2,00	36.385.000,00	45,49	0,00	22.740.060,00	100,00	62,50	45,49	4,00	79.841.820,00	45,49	99,80	Tidak ada permasalahan apapun pada sub kegiatan ini	-
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ugar Jatnika, SE, M.D		2,00	24.800.000,00	91,99	1,00	22.812.000,00	91,99	0,00	22.801.065,00	100,00	99,95	92,59	1,00	24.772.020,00		99,89		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)		100,00	2,00	24.800.000,00	91,99	1,00	22.812.000,00	91,99	0,00	22.801.065,00	100,00	99,95	92,59	1,00	24.772.020,00	92,59	99,89	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN TARGET KINERJA	-
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Edwin Ugar Jatnika, SE, M.D		10,00	2.000.000,00	29,72	2,00	594.680,00	29,72	0,00	387.000,00	100,00	65,08	81,82	8,00	1.881.000,00		94,05		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)		100,00	10,00	2.000.000,00	29,72	2,00	594.680,00	29,72	0,00	387.000,00	100,00	65,08	81,82	8,00	1.881.000,00	81,82	94,05	TIDAK ADA TARGET KINERJA DAN TARGET REALISASI	-
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Edwin Ugar Jatnika, SE, M.D		12,00	43.597.000,00	11,26	3,00	4.908.000,00	11,26	0,00	849.000,00	100,00	17,30	93,27	9,00	43.588.000,00		99,98		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		100,00	12,00	43.597.000,00	11,26	3,00	4.908.000,00	11,26	0,00	849.000,00	100,00	17,30	93,27	9,00	43.588.000,00	93,27	99,98	TIDAK ADA TERGET REALISASI DAN TARGET KINERJA	-
2.11.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Edwin Ugar Jatnika, SE, M.D		1,00	2.000.000,00	8,34	0,00	166.900,00	8,34	0,00	0,00	100,00	0,00	8,34	1,00	1.811.909,00		90,60		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		100,00	1,00	2.000.000,00	8,34	0,00	166.900,00	8,34	0,00	0,00	100,00	0,00	8,34	1,00	1.811.909,00	8,34	90,60	Target tidak di Realisasi karena sisa dari anggaran yg tidak terpakai	-
2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan: Dokumen)	Edwin Ugar Jatnika, SE, M.D		3,00	24.250.000,00	41,44	1,00	10.050.000,00	9,28	0,00	10.045.000,00	22,39	99,95	26,75	3,00	24.245.000,00		99,98		
	Pelaksanaan Sistem Administrasi Persuratan (Dokumen)		100,00	1,00	1.860.000,00	3,23	0,00	60.000,00	3,23	0,00	60.000,00	100,00	100,00	3,23	2,00	1.860.000,00	3,23	100,00	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN TARGET KINERJA	-
	Pelaksanaan Pengelolaan Website (Dokumen)		100,00	1,00	2.700.000,00	18,52	0,00	500.000,00	18,52	0,00	500.000,00	100,00	100,00	18,52	1,00	2.700.000,00	18,52	100,00	TIDAK ADA TARGET REALISASI DAN TARGET KINERJA	-
	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID)/PPID (Dokumen)		100,00	1,00	19.690.000,00	48,19	1,00	9.480.000,00	8,58	0,00	9.485.000,00	17,80	99,95	30,10	0,00	19.685.000,00	30,10	99,97	Tidak ada permasalahan apapun pada sub kegiatan ini	-
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100,00		6.671.026.705,00	27,01		1.803.669.713,00	25,47		5.993.480.585,00	94,28	71,59	98,35		5.993.480.585,00	98,35	89,84		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Gi		3,00	1.695.346.000,00	58,92	1,00	998.875.548,00	58,92	0,00	680.990.962,00	100,00	68,18	100,00	2,00	1.430.674.517,00		84,39		
	Belanja Tagihan Listrik (Laporan)		100,00	1,00	410.794.600,00	32,43	0,00	133.224.248,00	32,43	0,00	105.773.562,00	100,00	79,40	100,00	1,00	383.494.117,00	100,00	93,35	OK	OK
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Laporan)		100,00	1,00	1.283.516.000,00	67,36	0,00	864.616.000,00	67,36	0,00	574.182.000,00	100,00	66,41	100,00	1,00	1.046.145.000,00	100,00	81,51	PERMADALAHAN YANG DIHADAPI ADALAH PENYAMPAIAN BUKTI TAYANG YANG TERLAMBAT KARENA MENGEJAR BERITA DENGAN DASAR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI OPO DLHK.	SEGERA FOLLOW UP SEMUA KEGIATAN YANG BELUM DAN AKAN DILAKSANAKAN OLEH OPO DAN MENYAMPAIKAN KE PERUBAHAN MEDIA AGAR MEMENUHI MATERI KEGIATAN UNTUK BUKTI TAYANG YANG DILAPORKAN.
	' Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Laporan)		100,00	1,00	1.035.400,00	100,00	1,00	1.035.400,00	100,00	0,00	1.035.400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.035.400,00	100,00	100,00	TIDAK ADA TARGET	TIDAK ADA TARGET
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Gi		10,00	4.975.680.705,00	16,14	1,00	804.794.065,00	14,07	0,00	610.206.908,00	87,16	75,82	97,79	12,00	4.562.806.068,00		91,70		
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olah Raga (Laporan)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	ANGGARAN DIEFISIENSI	ANGGARAN DIEFISIENSI
	Honorarium Jasa Pengolahan Sampah (Laporan)		100,00	1,00	169.069.110,00	66,85	1,00	114.629.110,00	5,85	0,00	8.640.000,00	8,75	7,54	36,41	2,00	65.676.000,00	36,41	38,85	OK	OK
	Honorarium Jasa Non ASN (Laporan)		100,00	8,00	4.800.111.595,00	14,38	0,00	690.164.965,00	14,38	0,00	601.566.908,00	100,00	87,16	100,00	9,00	4.491.930.068,00	100,00	93,58	ok	ok
	'Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Laporan)		100,00	1,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	60,00	1,00	5.200.000,00	60,00	80,00	ANGGARAN DIEFISIENSI	ANGGARAN DIEFISIENSI
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100,00		1.064.809.700,00	72,20		768.824.500,00	72,20		407.028.914,00	100,00	13,65	95,93		407.028.914,00	95,93	38,23		
2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Gi		28,00	187.210.000,00	26,69	3,00	49.975.500,00	26,69	0,00	54.692.500,00	100,00	109,44	90,29	11,00	184.933.300,00		98,78		
	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		100,00	13,00	161.869.000,00	28,38	3,00	43.110.500,00	28,38	0,00	50.103.500,00	100,00	116,22	100,00	7,00	162.168.300,00	100,00	100,20	- Tidak ada target aktifitas kegiatan	- Tidak ada Target di bulan Desember
	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		100,00	15,00	35.341.000,00	19,41	0,00	6.865.000,00	19,41	0,00	4.589.000,00	100,00	66,85	48,54	4,00	32.765.000,00	48,54	92,71	Tidak ada target aktifitas kegiatan	Tidak ada Target di bulan Desember
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Gi		12,00	195.631.000,00	28,30	1,00	55.378.300,00	28,30	0,00	45.688.028,00	100,00	82,50	89,93	1,00	195.430.138,00		99,90		
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		100,00	8,00	143.849.000,00	32,89	0,00	47.331.000,00	32,89	0,00	39.368.228,00	100,00	83,18	100,00	0,00	137.224.138,00	100,00	95,39	- Tidak ada target aktifitas dan kegiatan di bulan Desember	- Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Lapangan roda 4 di TA 2025 telah selesai dilaksanakan.
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		100,00	3,00	14.872.000,00	21,52	1,00	3.154.900,00	21,52	0,00	1.427.400,00	100,00	45,24	65,80	1,00	16.468.300,00	65,80	112,24	- Tidak ada target aktifitas dan kegiatan di bulan Desember	- Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Lapangan roda 3 di TA 2025 telah selesai dilaksanakan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	17	18	19	20	21
	Kendaraan Dinas Operasional 6 yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Unit)		100,00	1,00	37.110.000,00	13,18	0,00	4.892.400,00	13,18	0,00	4.892.400,00	100,00	100,00	60,46	0,00	41.737.700,00	60,46	112,47	- Tidak ada target aktifitas dan kegiatan di bulan Desember	- Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan kendaraan Operasional/Lapangan roda 6 di TA 2025 telah selesai dilaksanakan.
2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		20,00	15.712.000,00	32,90	0,00	5.170.000,00	32,90	0,00	1.003.920,00	100,00	19,42	90,45	6,00	15.276.820,00		97,23		
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Unit)		100,00	14,00	9.488.000,00	35,05	0,00	3.326.000,00	35,05	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	6,00	9.372.900,00	100,00	98,79	- Tidak ada target aktifitas dan kegiatan di bulan Desember	- Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di TA 2025 telah selesai dilaksanakan.
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Unit)		100,00	6,00	6.224.000,00	29,62	0,00	1.844.000,00	29,62	0,00	1.003.920,00	100,00	54,44	75,90	0,00	5.903.920,00	75,90	94,86	- Tidak ada target aktifitas dan kegiatan di bulan Desember	- Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di TA 2025 telah selesai dilaksanakan.
2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		7,00	666.256.700,00	98,81	5,00	659.300.700,00	98,81	0,00	3.528.968,00	100,00	0,54	99,40	0,00	11.388.656,00		1,71		
	- (-)		0,00	0,00	0,00															
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Unit)		100,00	5,00	654.768.000,00	100,00	5,00	654.768.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	- adanya pekerjaan bongkar dan renovasi ulang karena hasil masih belum sesuai dengan RAB yang telah disepakati - Setelah di evaluasi Kondisi Progres pelaksanaan pekerjaan masih belum mencapai 100%/sudah beres sesuai dengan RAB, maka dari itu proses pembayaran pekerjaan tidak bisa dilakukan dan masuk dalam realisasi di bulan ini.	- Melakukan rapat Evaluasi dengan para Kontraktor/Penyedia. - Melakukan koordinasi dengan para Kontraktor/Penyedia untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan lebih intensif terhadap proses pelaksanaan pekerjaan.
	Pemeliharaan Bangunan Parkir Kendaraan Kantor (Unit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	Tidak ada target aktifitas kegiatan	Tidak ada Target di bulan Desember
	Pemeliharaan Tempat Parkir Kantor (Unit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	Tidak ada target aktifitas kegiatan	Tidak ada Target di bulan Desember
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use) (Unit)		100,00	2,00	11.488.700,00	30,75	0,00	3.532.700,00	30,75	0,00	3.528.968,00	100,00	99,89	65,38	0,00	11.388.656,00	65,38	99,13	target Anggaran sudah terealisasi pada bulan sebelumnya (Bulan November)	Tidak ada Target di bulan Desember
2.11.02 PROGRAM Pemertinaan LINGKUNGAN HIDUP			100,00		262.500.000,00	33,41		87.702.500,00	33,41		86.409.000,00	100,00	98,53	100,00		261.206.500,00		99,51		
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (Dokumen)		2,00		262.500.000,00	33,41		87.702.500,00	33,41		261.206.500,00	100,00	98,53	100,00		261.206.500,00	5.000,00	99,51		
2.11.02.1.02.0005 Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan (Satuan: Dokumen)	Inwan Setiawan, S.Hut., M.Si		1,00	157.080.000,00	54,96	1,00	86.332.500,00	54,96	1,00	85.239.000,00	100,00	98,73	100,00	1,00	155.986.500,00		99,30		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	20	21
	Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan KLHS (Dokumen)		100,00	1,00	157.080.000,00	54,96	1,00	86.332.500,00	54,96	1,00	85.239.000,00	100,00	99,73	100,00	1,00	155.986.500,00	100,00	99,30	Realisasi Anggaran sebesar Rp.155.986.500 (99,3%) dan Realisasi Fisik 100%. Efisiensi sebesar Rp. 1.093.500,- berasal dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.142.500,- dan Uang Transport Perjalanan Dinas Rp.320.000,- dan sisa kontrak penyusunan dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DSTLH) Provinsi Banten Rp.631.000,-	Koordinasi dengan Tim Kerja PEP dan Tim Kerja Keuangan terkait Laporan Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan KLHS Tahun 2025
2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Satuan: Dokumen)	Iwan Setiawan, S.Hut., M.Si		1,00	105.420.000,00	1,30	1,00	1.370.000,00	1,30	1,00	1.170.000,00	100,00	85,40	100,00	1,00	105.220.000,00		99,81		
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi KLHS (Dokumen)		100,00	1,00	105.420.000,00	1,30	1,00	1.370.000,00	1,30	1,00	1.170.000,00	100,00	85,40	100,00	1,00	105.220.000,00	100,00	99,81	Target anggaran Rp.200.000 pad bulan Desember merupakan Efisiensi dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.90.000,- dan Uang Transport Perjalan Dinas Rp.110.000,-	Koordinasi dengan Tim Kerja PEP dan Tim Kerja Keuangan terkait dengan Laporan Kinerja Pemantauan dan Evaluasi KLHS
2.11.08 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			100,00		3.150.798.500,00	14,51		457.075.965,00	9,91		269.654.679,00	68,32	59,00	68,97		2.912.729.716,00		92,44		
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (dokumen)		3,00		3.150.798.500,00	14,51		457.075.965,00	9,91		2.912.729.716,00	68,32	59,00	68,97		2.912.729.716,00	2.299,16	92,44		
2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST.,M.Si		3,00	42.740.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	42.209.431,00		98,76		
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)		100,00	3,00	42.740.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	42.209.431,00	100,00	98,76	Tidak ada target Kinerja	
2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Satuan: Laporan)	Ruli Riatno, ST.,M.Si		11,00	2.043.148.500,00	10,28	3,00	210.098.985,00	3,19	3,00	8.055.000,00	31,07	3,83	52,51	9,00	1.841.104.515,00		90,11		
	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kota Tangerang 8 lokasi (Laporan)		100,00	2,00	103.400.000,00	38,68	1,00	40.000.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	73,21	2,00	55.223.500,00	73,21	53,41	Tidak ada target	
	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kota Tangsel 10 lokasi (Laporan)		100,00	2,00	181.600.000,00	68,39	1,00	124.187.500,00	34,20	1,00	8.055.000,00	50,00	6,49	75,62	2,00	73.428.000,00	75,62	40,43	Tidak ada target	
	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kab. Tangerang 11 lokasi (Laporan)		100,00	2,00	121.200.000,00	18,73	1,00	22.706.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	51,17	2,00	78.828.000,00	51,17	65,04	Tidak ada target	
	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kota Serang 5 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	96.680.000,00	20,59	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	97.095.000,00	93,86	100,43	Tidak ada target	
	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kab. Serang 4 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	72,18	1,00	38.657.500,00	72,18	153,40	Tidak ada target	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kota Cilegon 1 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	146.868.500,00	1,27	0,00	1.862.485,00	1,27	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	144.458.515,00	100,00	98,36	Tidak ada masalah	
	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kab. Lebak 8 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	1.304.800.000,00	0,10	0,00	1.343.000,00	0,10	0,00	0,00	100,00	0,00	37,65	1,00	1.298.097.000,00	37,65	99,49	Tidak ada masalah	
	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kab. Pandeglang 5 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	63.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	80,13	1,00	55.317.000,00	80,13	87,25	Tidak ada target	
2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Bantuan: Laporan)	Ruli Riatno, ST.,M.Si		8,00	771.170.000,00	21,87	3,00	168.644.000,00	21,87	2,00	154.000.000,00	100,00	91,32	100,00	7,00	742.530.091,00		96,29		
	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kota Tangerang 6 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	185.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	224.601.000,00	100,00	121,25	Tidak ada target	
	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kota Tangsel 2 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	37.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	68.700.000,00	100,00	183,51	Tidak ada target	
	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kab. Tangerang 9 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	313.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	260.429.091,00	100,00	82,99	Tidak ada target	
	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kota Serang 2 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	33.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	8.700.000,00	100,00	26,34	Tidak ada target	
	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kab. Serang 3 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	82.170.000,00	59,80	0,00	49.138.000,00	59,80	0,00	41.000.000,00	100,00	83,44	100,00	1,00	67.100.000,00	100,00	81,66	Tidak ada target	
	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kota Cilegon 1 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	3.894.000,00	100,00	1,00	3.894.000,00	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	Tidak ada masalah	
	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kab. Lebak 3 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	49.548.000,00	100,00	1,00	49.548.000,00	100,00	1,00	48.200.000,00	100,00	97,28	100,00	1,00	48.200.000,00	100,00	97,28	Tidak ada target	
	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim melalui pembinaan teknis di Kab. Pandeglang 4 lokasi (Laporan)		100,00	1,00	66.064.000,00	100,00	1,00	66.064.000,00	100,00	0,00	64.800.000,00	100,00	98,09	100,00	0,00	64.800.000,00	100,00	98,09	Tidak ada target	
2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan In (Bantuan: Lokasi)	Ruli Riatno, ST.,M.Si		14,00	264.790.000,00	27,73	14,00	73.400.000,00	27,73	14,00	105.639.679,00	100,00	143,52	100,00	14,00	260.908.679,00		98,53		
	Data dan informasi kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air(5 Lokasi), Indeks Kualitas Udara (8 Lokasi), Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem gambut dan Indeks Kualitas Laut (1 Lokasi)) (Lokasi)		100,00	14,00	264.790.000,00	27,73	14,00	73.400.000,00	27,73	14,00	105.639.679,00	100,00	143,52	100,00	14,00	260.908.679,00	100,00	98,53	Tidak ada masalah	
2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Bantuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST.,M.Si		1,00	28.950.000,00	17,04	1,00	4.933.000,00	17,04	1,00	1.960.000,00	100,00	39,73	74,60	1,00	25.977.000,00		89,73		
	Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) (Dokumen)		100,00	1,00	28.950.000,00	17,04	1,00	4.933.000,00	17,04	1,00	1.960.000,00	100,00	39,73	74,60	1,00	25.977.000,00	74,60	89,73	Tidak ada target	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			100,00		93.800.000,00	84,69		79.437.000,00	76,22		74.850.000,00	90,00	94,23	91,53		87.963.000,00		93,78		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi c/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.04.1.01 Pengelolaan Kelembagaan Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Hayati Provinsi (Persen)		100,00		93.800.000,00	84,69		79.437.000,00	76,22		87.963.000,00	90,00	94,23	91,53		87.963.000,00	91,53	93,78		
2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kelembagaan Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST.,M.Si		1,00	93.800.000,00	84,69	1,00	79.437.000,00	76,22	1,00	74.850.000,00	90,00	94,23	91,53	2,00	87.963.000,00		93,78		
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kelembagaan Hayati Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	93.800.000,00	84,69	1,00	79.437.000,00	76,22	1,00	74.850.000,00	90,00	94,23	91,53	2,00	87.963.000,00	91,53	93,78	Tidak ada target	
2.11.06 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			100,00		121.550.000,00	45,95		55.849.240,00	45,95		0,00	100,00	0,00	90,09		67.520.000,00		55,55		
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (dokumen)		2,00		121.550.000,00	45,95		55.849.240,00	45,95		67.520.000,00	100,00	0,00	90,09		67.520.000,00	4.504,50	55,55		
2.11.05.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Ruli Riatno, ST.,M.Si		5,00	45.360.000,00	10,69	0,00	4.847.000,00	10,69	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4,00	40.880.000,00		90,12		
	Fasilitas Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)		100,00	5,00	45.360.000,00	10,69	0,00	4.847.000,00	10,69	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4,00	40.880.000,00	100,00	90,12	Tidak ada atget untuk Fasilitas Persetujuan/ izin Pengumpulan Limbah B3	-
2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST.,M.Si		1,00	76.190.000,00	66,94	0,00	51.002.240,00	66,94	0,00	0,00	100,00	0,00	84,19	1,00	26.640.000,00		34,97		
	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kevenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ (Dokumen)		100,00	1,00	76.190.000,00	66,94	0,00	51.002.240,00	66,94	0,00	0,00	100,00	0,00	84,19	1,00	26.640.000,00	84,19	34,97	Tidak ada target kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 pada bulan desember 2025	-
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			100,00		82.280.000,00	13,48		11.095.000,00	11,72		8.770.000,00	86,93	79,04	74,54		86.820.000,00		105,52		
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)		100,00		82.280.000,00	13,48		11.095.000,00	11,72		86.820.000,00	86,93	79,04	74,54		86.820.000,00	74,54	105,52		
2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Satuan: Badan Usaha)	Iwan Setiawan, S.Hut., M.Si		100,00	82.280.000,00	13,48	24,00	11.095.000,00	11,72	24,00	8.770.000,00	86,93	79,04	74,54	68,00	86.820.000,00		105,52		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Badan Usaha)		100,00	100,00	82.280.000,00	13,48	24,00	11.095.000,00	11,72	24,00	8.770.000,00	86,93	79,04	74,54	68,00	86.820.000,00	74,54	105,52	Peleaksanaan kegiatan berjalan tanpa kendala. Anggaran telah sepenuhnya terserap pada bulan sebelumnya. Evidence pengawasan tidak tercantum karena pengawasan yang dilakukan bersifat tidak langsung, dengan rangkumannya disertakan dalam laporan akhir tahun yang memuat capaian kegiatan sepanjang tahun.	Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup telah diampirkan pada Gdrive.
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			100,00		375.405.000,00	2,60		9.763.038,00	0,00		0,00	0,00	0,00	99,08		365.641.962,00		97,40		
2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan (lembaga)		4,00		375.405.000,00	2,60		9.763.038,00	0,00		365.641.962,00	0,00	0,00	99,08		365.641.962,00	1.477,01	97,40		
2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan (Satuan: Dokumen)	Iwan Setiawan, S.Hut., M.Si		4,00	375.405.000,00	2,60	0,00	9.763.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	4,00	365.641.962,00		97,40		
	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan 2 Kelompok MHA Cibedug (Dokumen)		100,00	1,00	79.881.000,00	2,44	0,00	1.952.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	1,00	123.670.962,00	7,51	154,82	Tidak ada target capaian target keuangan Rp. 1.952.607 merupakan slipa belanja yang tidak di serap	
	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan 2 Kelompok MHA Citsungang (Dokumen)		100,00	1,00	73.881.000,00	2,64	0,00	1.952.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80.657.000,00	0,00	109,17	Tidak ada target capaian target keuangan Rp. 1.952.607 merupakan slipa belanja yang tidak di serap	
	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan 2 Kelompok MHA Citsungang (Dokumen)		100,00	1,00	73.881.000,00	2,64	0,00	1.952.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	1,00	80.657.000,00	97,36	109,17	Tidak ada target capaian target keuangan Rp. 1.952.607 merupakan slipa belanja yang tidak di serap	
	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan 2 Kelompok MHA Cilete dan 2 Kelompok MHA Cilete (Dokumen)		100,00	1,00	147.762.000,00	2,64	0,00	3.905.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	1,00	80.657.000,00	97,36	54,59	Tidak ada target capaian target keuangan Rp. 1.952.607 merupakan slipa belanja yang tidak di serap	
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100,00		41.250.000,00	81,95		33.804.000,00	81,82		33.623.136,00	99,84	99,46	99,87		41.069.136,00		99,55		
2.11.08.1.01 Penyeleenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)		100,00		41.250.000,00	81,95		33.804.000,00	81,82		41.069.136,00	99,84	99,46	99,87		41.069.136,00		99,55		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	17	18	19	20	21
2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Satuan: Orang)	Iwan Setiawan, S.Hut., M.Si		50,00	7.500.000,00	0,72	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	50,00	7.448.000,00		99,28		
	Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang Terlibat Dalam Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi (Orang)		100,00	50,00	7.500.000,00	0,72	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	50,00	7.448.000,00	99,28	99,28	Tidak ada target	
2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Dumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Satuan: Lembaga)	Iwan Setiawan, S.Hut., M.Si		2,00	33.750.000,00	100,00	2,00	33.750.000,00	100,00	0,00	33.623.136,00	100,00	99,62	100,00	0,00	33.623.136,00		99,62		
	Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Terkait PPLH (Lembaga)		100,00	2,00	33.750.000,00	100,00	2,00	33.750.000,00	100,00	0,00	33.623.136,00	100,00	99,62	100,00	0,00	33.623.136,00	100,00	99,62	Tidak ada target kegiatan Realisasi keuangan Rp. 23.118.136,- belum tercatat di LRA, masuk ke UP Nihil	
2.11.08 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100,00		35.650.000,00	0,05		20.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	63,30		35.629.800,00		99,94		
2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Lembaga/)		68,00		35.650.000,00	0,05		20.200,00	0,00		35.629.800,00	0,00	0,00	63,30		35.629.800,00	93,09	99,94		
2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Satuan: Entitas)	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Satuan: Entitas)	Iwan Setiawan, S.Hut., M.Si		75,00	35.650.000,00	0,05	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	25,00	35.629.800,00		99,94		
	Dunia Pendidikan yang Dinilai Kinerjanya Dalam Rangka PPLH (Entitas)		100,00	75,00	35.650.000,00	0,05	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	25,00	35.629.800,00	63,30	99,94	Tidak ada target capaian target keuangan Rp. 20.200 merupakan slipa belanja yang tidak di serap	
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			100,00		113.635.000,00	21,96		24.955.000,00	21,96		18.270.000,00	100,00	73,21	97,13		118.490.000,00		104,27		
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi (Persen)		100,00		113.635.000,00	21,96		24.955.000,00	21,96		118.490.000,00	100,00	73,21	97,13		118.490.000,00	97,13	104,27		
2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi (Satuan: Perkara)	Iwan Setiawan, S.Hut., M.Si		20,00	55.720.000,00	27,61	7,00	15.382.500,00	27,61	7,00	12.040.000,00	100,00	78,27	100,00	18,00	60.657.500,00		108,86		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Penerapan Sanksi Administratif Kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Taat dan Menjadi Kewenangan Provinsi (Perkara)		100,00	20,00	55.720.000,00	27,61	7,00	15.382.500,00	27,61	7,00	12.040.000,00	100,00	78,27	100,00	18,00	60.657.500,00	100,00	108,86	Pelaksanaan kegiatan berjalan tanpa kendala. Realisasi anggaran belum tercatat karena masih dalam proses pengajuan. Bimtek telah dilaksanakan pada bulan November dengan bukti unggah tersedia pada tautan November. Pada bulan ini juga disampaikan laporan akhir tahun yang merangkum keseluruhan capaian kegiatan.	-
2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani (Satuan: Pengaduan)	Iwan Gefawan, S.Hut., M.Si		20,00	57.915.000,00	16,52	7,00	9.572.500,00	16,52	7,00	6.230.000,00	100,00	65,08	94,37	14,00	57.832.500,00		99,86		
	Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (PPLH) Tingkat Provinsi (Pengaduan)		100,00	20,00	57.915.000,00	16,52	7,00	9.572.500,00	16,52	7,00	6.230.000,00	100,00	65,08	94,37	14,00	57.832.500,00	94,37	99,86	Pelaksanaan kegiatan berjalan tanpa kendala. Realisasi anggaran belum tercatat karena masih dalam proses pengajuan. Audiensi telah dilaksanakan pada bulan November dengan bukti unggah tersedia pada tautan November. Pada bulan ini juga disampaikan laporan akhir tahun yang merangkum keseluruhan capaian kegiatan.	-
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			100,00		6.333.615.000,00	75,97		4.812.848.262,00	74,83		0,00	98,51	0,00	89,68		467.860.612,56		7,39		
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Persen)		100,00		6.333.615.000,00	75,97		4.812.848.262,00	74,83		467.860.612,56	98,51	0,00	89,68		467.860.612,56	89,68	7,39		
2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Satuan: Ton)	Ruli Riarno, ST.,M.Si		303,00	6.243.765.000,00	76,08	303,00	4.751.610.762,00	75,14	0,00	0,00	98,76	0,00	90,13	0,00	434.720.612,56		6,96		
	Sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Ton)		100,00	303,00	6.243.765.000,00	76,08	303,00	4.751.610.762,00	75,14	0,00	0,00	98,76	0,00	90,13	0,00	434.720.612,56	90,13	6,96	Pengelolaan kebersihan banten lama sudah selesai pengeloaannya oleh DLHK	untuk TA 2026 Pengelolaan Banten lama dilaksanakan oleh Dinas PUPR
2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Satuan: Dokumen)	Ruli Riarno, ST.,M.Si		1,00	89.850.000,00	68,16	1,00	61.237.500,00	53,47	0,00	0,00	78,45	0,00	58,14	0,00	33.140.000,00		36,88		
	Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)		100,00	1,00	89.850.000,00	68,16	1,00	61.237.500,00	53,47	0,00	0,00	78,45	0,00	58,14	0,00	33.140.000,00	58,14	36,88	Rapat Koordinasi IKPO pada triwulan IV untuk update data IKPO melalui SIPON sudah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2025. Namun Masih ada beberapa kabupaten Kota, yg pengisian data SIPON nya masih lengkap	akan dilakukan koordinasi dengan kabupaten kota, agar lebih kooperatif dalam melakukan data IKPO di SIPON
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					3.465.102.000,00	34,46		1.194.091.989,00	34,46		943.497.653,00	100,00	79,01	97,03		3.216.662.164,00		92,83		
3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		1.208.448.000,00	23,05		278.589.371,00	23,05		250.386.912,00	100,00	89,88	98,71		1.182.400.041,00		97,84		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuall pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuall pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (dokumen)		2,00		113.080.000,00	17,98		20.330.000,00	17,98		110.946.500,00	100,00	78,70	100,00		110.946.500,00	5.000,00	98,11		
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Satuan: Dokumen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		3,00	113.080.000,00	17,98	3,00	20.330.000,00	17,98	3,00	16.000.000,00	100,00	78,70	100,00	3,00	110.946.500,00		98,11		
	Dokumen Rencana Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) (Dokumen)		100,00	1,00	52.350.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	54.546.500,00	100,00	104,20	realisasi fisik sudah sesuai dengan target kinerja.	
	Dokumen Rencana Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Unit KPH 2025 (Dokumen)		100,00	1,00	26.150.000,00	8,83	1,00	2.310.000,00	8,83	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	23.840.000,00	100,00	91,17	1. realisasi fisik sudah sesuai dengan target kinerja. 2. pada Bulan Desember tidak ada target keuangan, nominal tersebut diatas merupakan SILPA kegiatan (sisa anggaran yang tidak digunakan dari sisa belanja honorarium narasumber)	
	Sosialisasi Perhutanan Sosial (Dokumen)		100,00	1,00	34.580.000,00	52,11	1,00	18.020.000,00	52,11	1,00	16.000.000,00	100,00	88,79	100,00	1,00	32.560.000,00	100,00	94,16	1. realisasi fisik sudah sesuai dengan target kinerja. 2. pada Bulan Desember tidak ada target keuangan, nominal tersebut diatas merupakan SILPA kegiatan (sisa anggaran yang tidak digunakan dari belanja honorarium narasumber)	
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (dokumen)		1,00		32.830.000,00	44,21		14.515.000,00	44,21		26.515.000,00	100,00	56,49	100,00		26.515.000,00	10.000,00	80,76		
3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Pertanin Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Satuan: Dokumen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		1,00	32.830.000,00	44,21	1,00	14.515.000,00	44,21	1,00	8.200.000,00	100,00	56,49	100,00	1,00	26.515.000,00		80,76		
	Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)		100,00	1,00	32.830.000,00	44,21	1,00	14.515.000,00	44,21	1,00	8.200.000,00	100,00	56,49	100,00	1,00	26.515.000,00	100,00	80,76	1. realisasi fisik sudah sesuai dengan target kinerja. 2. pada Bulan Desember tidak ada target keuangan, nominal tersebut diatas merupakan SILPA kegiatan (sisa anggaran yang tidak digunakan dari belanja honorarium narasumber dan belanja perjalanan dinas)	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Tersedianya dokumen rencana Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Perset)		1,00		88.740.000,00	3,05		2.713.500,00	3,05		85.984.500,00	100,00	0,00	84,21		85.984.500,00	8.420,67	98,89		
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Satuan: Dokumen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		1,00	88.740.000,00	3,05	1,00	2.713.500,00	3,05	1,00	0,00	100,00	0,00	84,21	1,00	85.984.500,00		98,89		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Dokumen RTRNL 2025 (Dokumen)		100,00	1,00	88.740.000,00	3,05	1,00	2.713.500,00	3,05	1,00	0,00	100,00	0,00	84,21	1,00	85.984.500,00	84,21	96,89	1. realisasi fisik sudah sesuai dengan target kinerja. 2. pada Bulan Desember tidak ada target keuangan, nominal tersebut diatas merupakan SILPA kegiatan (jika anggaran yang tidak digunakan dari sisa belanja honorarium narasumber)	
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi (Unit)		19,00		670.158.000,00	21,98		147.289.371,00	21,98		660.616.541,00	100,00	93,52	100,00		660.616.541,00	526,32	98,58		
3.28.03.1.06.0006 Fasilitas PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi (Satuan: Unit)	Tubagus Asep Setiawan, ST		1,00	12.705.000,00	100,00	1,00	12.705.000,00	100,00	1,00	12.185.000,00	100,00	95,91	100,00	1,00	12.185.000,00		95,91		
	Pelaksanaan Fasilitas PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar (Unit Manajemen)		100,00	1,00	12.705.000,00	100,00	1,00	12.705.000,00	100,00	1,00	12.185.000,00	100,00	95,91	100,00	1,00	12.185.000,00	100,00	95,91	- Tidak ada target anggaran	-
3.28.03.1.06.0008 Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Pemegang PBPHH yang test dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Satuan: Unit)	Tubagus Asep Setiawan, ST		20,00	657.453.000,00	20,48	4,00	134.593.371,00	20,48	4,00	125.561.912,00	100,00	93,30	100,00	23,00	648.431.541,00		98,63		
	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Pengolahan HHBK Aren (Unit Manajemen)		100,00	1,00	43.972.500,00	1,09	0,00	480.190,00	1,09	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	43.492.310,00	100,00	98,91	- Target anggaran sebesar Rp. 480.190 tidak dapat direalisasikan/digunakan karena merupakan SILPA dari Belanja ATK, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	- Berkoordinasi dengan bagian keuangan dan telah masuk dalam laporan SILPA
	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Pengolahan HHBK Jamur Tiram (Unit Manajemen)		100,00	2,00	59.478.500,00	0,85	0,00	507.304,00	0,85	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,00	59.971.196,00	100,00	99,15	- Target anggaran sebesar Rp. 507.304 tidak dapat direalisasikan/digunakan karena merupakan SILPA dari Belanja ATK, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Sewa Mebel dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	- Berkoordinasi dengan bagian keuangan dan telah masuk dalam laporan SILPA
	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Pengolahan HHBK Budidaya Lebah Madu (Unit Manajemen)		100,00	4,00	125.646.000,00	0,26	0,00	324.400,00	0,26	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4,00	125.321.600,00	100,00	99,74	- Target anggaran sebesar Rp. 324.400 tidak dapat direalisasikan/digunakan karena merupakan SILPA dari Belanja ATK, Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	- Berkoordinasi dengan bagian keuangan dan telah masuk dalam laporan SILPA

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan dan Penatausahaan HHBK (Unit Manajemen)		100,00	13,00	428.356.000,00	31,12	4,00	133.271.477,00	31,12	4,00	125.561.912,00	100,00	94,22	100,00	13,00	420.646.435,00	100,00	98,20	- Target anggaran sebesar Rp. 6.805.477 tidak dapat direalisasikan/digunakan karena merupakan SILPA (sampai dengan Triwulan III) dari Belanja ATK, Belanja Barang untuk Disediakan kepada Masyarakat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Sewa Mebel dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Total SILPA sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 7.709.565	- Berkoordinasi dengan bagian keuangan dan telah masuk dalam laporan SILPA
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Per (Unit)		2,00		303.640.000,00	30,87		93.742.500,00	30,87		298.337.500,00	100,00	94,34	99,48		298.337.500,00	4.973,75	98,25		
3.28.03.1.07.0005 Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindak lanjutnya berupa pengenaan sanksi Administratif (Satuan: Unit)	Tubagus Asep Setiawan, ST		301,00	192.800.000,00	45,68	301,00	98.078.500,00	45,68	301,00	84.740.000,00	100,00	96,21	99,17	301,00	189.461.500,00		98,27		
	Kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindak Lanjutnya berupa sanksi Administratif (Unit Management)		100,00	301,00	192.800.000,00	45,68	301,00	98.078.500,00	45,68	301,00	84.740.000,00	100,00	96,21	99,17	301,00	189.461.500,00	99,17	98,27	Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kendala dan sudah sesuai dengan target kinerja berdasarkan DPA perubahan TA 2025. Realisasi keuangan pada bulan desember sebesar Rp. 33.260.000,-. Sedangkan sisa anggaran Rp. 3.338.500,- merupakan SILPA dari sub Kegiatan dari Belanja Honorarium Narasumber, Belanja Makan Minum dan Belanja Perjalanan Dinas.	Tindak Lanjut : Pelaksanaan telah disesuaikan dengan rencana kegiatan pada DPA Kegiatan TA. 2025
3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (Satuan: Unit)	Tubagus Asep Setiawan, ST		10,00	110.840.000,00	5,11	10,00	5.664.000,00	5,11	10,00	3.700.000,00	100,00	65,32	100,00	10,00	108.876.000,00		98,23		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPHH (Kayu dan HHBK) skala kecil dan menengah (Unit Management)		100,00	10,00	110.840.000,00	5,11	10,00	5.664.000,00	5,11	10,00	3.700.000,00	100,00	65,32	100,00	10,00	108.876.000,00	100,00	98,23	Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kendala dan sudah sesuai dengan target kinerja berdasarkan DPA berdasarkan DPA perubahan TA 2025. Realisasi keuangan pada bulan Desember sebesar Rp. 3.700.000,- Sedangkan sisa anggaran Rp. 1.964.000,- merupakan SILPA dari sub Kegiatan dari Belanja Tenaga Ahli, Belanja Makan Minum dan Belanja Perjalanan Dinas.	Pelaksanaan telah disesuaikan dengan rencana kegiatan pada DPA Kegiatan TA. 2025
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		763.825.000,00	40,22		307.205.978,00	40,22		141.510.000,00	100,00	46,06	99,77		598.129.022,00		78,31		
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bermalai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bermalai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Persen)		100,00		763.825.000,00	40,22		307.205.978,00	40,22		598.129.022,00	100,00	46,06	99,77		598.129.022,00	99,77	78,31		
3.28.04.1.03.0005 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bermalai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bermalai Ekosistem Penting yang Dikekui (Satuan: Ha)	Adib Solihin, ST,MT., M.Si		40,00	763.825.000,00	40,22	10,00	307.205.978,00	40,22	0,00	141.510.000,00	100,00	46,06	99,77	30,00	598.129.022,00		78,31		
	Daerah penyangga di kawasan bermalai ekosistem penting yang dikekui (Ha)		100,00	40,00	763.825.000,00	40,22	10,00	307.205.978,00	40,22	0,00	141.510.000,00	100,00	46,06	99,77	30,00	598.129.022,00	99,77	78,31	tidak ada kendala	-
3.28.06 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			100,00		596.529.000,00	32,17		191.861.640,00	32,17		170.650.741,00	100,00	89,94	100,00		575.318.101,00		96,44		
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Persen)		100,00		596.529.000,00	32,17		191.861.640,00	32,17		575.318.101,00	100,00	89,94	100,00		575.318.101,00	100,00	96,44		
3.28.06.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Satuan: Kelompok)	Adib Solihin, ST,MT., M.Si		13,00	338.737.000,00	4,29	13,00	14.523.400,00	4,29	13,00	3.830.000,00	100,00	26,37	100,00	13,00	328.043.600,00		96,84		
	Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)		100,00	13,00	338.737.000,00	4,29	13,00	14.523.400,00	4,29	13,00	3.830.000,00	100,00	26,37	100,00	13,00	328.043.600,00	100,00	96,84	Sesuai target kinerja bulan Desember dengan melakukan monitoring dan evaluasi kelompok tani hutan sebanyak 1x dan Pelaporan berupa fotocopy laporan	Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan anggaran perubahan tahun 2025
3.28.06.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas (Satuan: Orang)	Adib Solihin, ST,MT., M.Si		60,00	75.505.000,00	1,79	0,00	1.352.240,00	1,79	0,00	270.000,00	100,00	19,57	100,00	0,00	74.422.760,00		98,57		
	Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas (Orang)		100,00	60,00	75.505.000,00	1,79	0,00	1.352.240,00	1,79	0,00	270.000,00	100,00	19,57	100,00	0,00	74.422.760,00	100,00	98,57	Sesuai target kinerja bulan Desember dengan melakukan pelaporan berupa fotocopy laporan	Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan anggaran perubahan tahun 2025
3.28.06.1.01.0006 Penyilapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang dilapikan untuk Perhutanan Sosial (Satuan: Hektar)	Adib Solihin, ST,MT., M.Si		25,00	182.287.000,00	96,55	25,00	175.986.000,00	96,55	25,00	166.550.741,00	100,00	94,64	100,00	25,00	172.851.741,00		94,82		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	6	8	7	8	8	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	20	21
	Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial (Hektar)		100,00	25,00	182.287.000,00	96,55	25,00	175.986.000,00	96,55	25,00	166.550.741,00	100,00	94,64	100,00	25,00	172.851.741,00	100,00	94,82	Desuai target kinerja bulan Desember dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial sebanyak 2x dan Pelaporan berupa fotocopy laporan	Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan anggaran perubahan tahun 2025
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			100,00		896.300.000,00	46,46		416.435.000,00	46,46		380.950.000,00	100,00	91,48	90,47		860.815.000,00		96,04		
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Persen)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Persen)		100,00		896.300.000,00	46,46		416.435.000,00	46,46		860.815.000,00	100,00	91,48	90,47		860.815.000,00	90,47	96,04		
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Satuan: Orang)	Adib Solihin, ST,MT., M.Si		920,00	873.928.000,00	47,13	460,00	411.898.000,00	47,13	460,00	376.650.000,00	100,00	91,44	90,23	920,00	838.680.000,00		95,97		
	Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang)		100,00	920,00	873.928.000,00	47,13	460,00	411.898.000,00	47,13	460,00	376.650.000,00	100,00	91,44	90,23	920,00	838.680.000,00	90,23	95,97	Realisasi anggaran pada bulan Desember adalah realisasi keuangan untuk kegiatan bulan November yang baru masuk dibulan Desember	Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan anggaran perubahan tahun 2025
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS (Satuan: Lembaga)	Adib Solihin, ST,MT., M.Si		1,00	22.372.000,00	20,28	1,00	4.537.000,00	20,28	1,00	4.300.000,00	100,00	94,78	100,00	1,00	22.135.000,00		98,94		
	Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS (Lembaga)		100,00	1,00	22.372.000,00	20,28	1,00	4.537.000,00	20,28	1,00	4.300.000,00	100,00	94,78	100,00	1,00	22.135.000,00	100,00	98,94	Realisasi keuangan untuk bulan Desember merupakan realisasi keuangan untuk kegiatan di bulan November yang masuk realisasi di Bulan Desember	Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan Anggaran Perubahan pada Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
SUB JUMLAH				2.227,00	59.237.281.705,00	82,81	1.257,00	19.145.779.771,00	81,72	914,00	10.664.350.087,00	98,19	55,70	86,08	1.696,00	47.803.591.581,40		80,70		
2.11.3.28.0.00.0001 CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG					1.387.058.000,00	44,82		621.800.426,00	19,44		2.432.340.924,00	43,37	391,18	71,13		3.196.485.168,00		230,45		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					323.960.000,00	58,88		190.760.064,00	55,92		177.368.924,00	94,97	92,98	88,74		309.455.530,00		95,52		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		323.960.000,00	58,88		190.760.064,00	55,92		177.368.924,00	94,97	92,98	88,74		309.455.530,00		95,52		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerahpada CDLHK Lebak Tangerang (Persen)		100,00		61.994.000,00	19,73		12.231.934,00	15,65		57.681.280,00	79,34	64,74	95,11		57.681.280,00	95,11	93,04		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		1,00	2.000.000,00	0,85	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	1,00	1.983.000,00		99,15		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1 Paket) (Paket)		100,00	1,00	2.000.000,00	0,85	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	1,00	1.983.000,00	99,15	99,15	Tidak ada target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		1,00	15.000.000,00	5,24	0,00	786.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	1,00	14.213.995,00		94,76		
	Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan (Paket)		100,00	1,00	15.000.000,00	5,24	0,00	786.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	1,00	14.213.995,00	94,76	94,76	Tidak ada target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmadi Ruznandar, S.Sos., M.Si		1,00	2.000.000,00	19,82	0,00	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	1,00	1.603.500,00		80,18		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi triwulan ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (1 Paket) (Paket)		100,00	1,00	2.000.000,00	19,82	0,00	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	1,00	1.603.500,00	80,18	80,18	Tidak ada target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.D		1,00	26.000.000,00	33,84	1,00	8.801.429,00	33,84	1,00	7.919.214,00	100,00	89,98	98,07	1,00	25.117.785,00		96,61		
	Bahan Logistik Kantor yang disediakan (1 Paket) (Paket)		100,00	1,00	26.000.000,00	33,84	1,00	8.801.429,00	33,84	1,00	7.919.214,00	100,00	89,98	98,07	1,00	25.117.785,00	98,07	96,61	Tidak ada masalah, kegiatan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.D		1,00	2.000.000,00	54,85	1,00	1.097.000,00	45,15	0,00	0,00	82,32	0,00	90,30	0,00	903.000,00		45,15		
	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (1 Paket) (Paket)		100,00	1,00	2.000.000,00	54,85	1,00	1.097.000,00	45,15	0,00	0,00	82,32	0,00	90,30	0,00	903.000,00	90,30	45,15	Tidak ada target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.D		12,00	14.994.000,00	7,56	3,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	9,00	13.860.000,00		92,44		
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 Laporan) (Laporan)		100,00	12,00	14.994.000,00	7,56	3,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	9,00	13.860.000,00	92,44	92,44	Tidak ada target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang (Persen)		100,00		207.572.000,00	78,22		162.353.030,00	75,21		199.356.350,00	96,16	95,63	96,63		199.356.350,00	96,63	96,04		
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.D		12,00	46.812.000,00	26,28	3,00	12.303.030,00	26,28	3,00	11.502.990,00	100,00	93,50	98,36	12,00	44.898.630,00		95,91		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (12 Laporan) (Laporan)		100,00	12,00	46.812.000,00	26,28	3,00	12.303.030,00	26,28	3,00	11.502.990,00	100,00	93,50	98,36	12,00	44.898.630,00	98,36	95,91	Tidak ada masalah, kegiatan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.D		1,00	160.760.000,00	93,34	1,00	150.050.000,00	89,46	0,00	143.747.720,00	95,84	95,80	96,12	0,00	154.457.720,00		96,08		
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor (1 Laporan) (Laporan)		100,00	1,00	160.760.000,00	93,34	1,00	150.050.000,00	89,46	0,00	143.747.720,00	95,84	95,80	96,12	0,00	154.457.720,00	96,12	96,08	Tidak ada target kinerja, anggaran belanja jasa tenaga kebersihan dan keamanan untuk tambahan kompensasi uang makan pegawai non ASN bulan November s.d Desember 2025 tidak di perap/realisasi karena pegawai jbs telah meninggal dunia.	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang (persen)		100,00		54.394.000,00	29,74		16.175.100,00	28,22		52.417.900,00	94,89	87,78	51,41		52.417.900,00	51,41	96,37		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.D		7,00	42.214.000,00	28,55	7,00	12.050.000,00	28,20	0,00	11.609.000,00	98,79	96,34	51,27	0,00	41.773.000,00		98,96		
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan roda 4 yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (2 Unit) (Unit)		100,00	2,00	31.554.000,00	25,88	2,00	8.165.000,00	25,88	0,00	8.025.000,00	100,00	98,29	51,20	0,00	31.414.000,00	51,20	99,56	Tidak ada target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan roda 2 yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (5 Unit) (Unit)		100,00	5,00	10.660.000,00	36,44	5,00	3.885.000,00	35,07	0,00	3.584.000,00	96,24	92,25	51,49	0,00	10.359.000,00	51,49	97,18	Tidak ada target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit) Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Ahmad Rusnandar, S.Sos., M.Si		17,00	12.180.000,00	33,87	17,00	4.125.100,00	28,29	0,00	2.590.000,00	83,52	62,79	51,89	0,00	10.644.900,00		87,40		
	Pemeliharaan Alat Pendingin (AC Split) yang dipelihara/direhabilitasi (5 Unit) (Unit)		100,00	6,00	3.816.000,00	30,74	6,00	1.172.500,00	25,00	0,00	850.000,00	81,33	72,49	49,72	0,00	3.493.500,00	49,72	91,55	Tidak ada target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
	Pemeliharaan Komputer/Laptop yang dipelihara/direhabilitasi (5 Unit) (Unit)		100,00	6,00	4.380.000,00	31,12	6,00	1.363.300,00	25,00	0,00	970.000,00	80,33	71,15	49,58	0,00	3.996.700,00	49,58	91,02	Tidak ada target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
	Pemeliharaan Printer yang dipelihara/direhabilitasi (5 Unit) (Unit)		100,00	5,00	3.984.000,00	39,89	5,00	1.589.300,00	35,05	0,00	770.000,00	87,87	48,45	56,50	0,00	3.164.700,00	56,50	79,44	Tidak ada target kinerja	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					1.063.098.000,00	40,54		431.040.362,00	8,32		2.254.972.000,00	20,53	523,15	65,76		2.887.029.638,00		271,57		
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		951.519.000,00	44,20		420.687.262,00	8,27		2.249.367.000,00	18,71	534,69	62,36		2.780.198.738,00		292,19		
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (COLHK-LT) (Persen)		100,00		946.148.000,00	44,43		420.434.262,00	8,32		2.775.080.738,00	18,72	535,01	62,43		2.775.080.738,00	62,43	293,30		
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan: Ha)	Dendi Setyawan, S.Hut., MM		710,00	558.364.000,00	22,87	150,00	127.757.262,00	3,37	0,00	0,00	14,74	0,00	80,50	560,00	430.606.738,00		77,12		
	Pembangunan Hutan Rakyat (Hektar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	Tidak Ada Target	Tidak Ada Output
	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 2 (Hektar)		100,00	100,00	63.562.000,00	100,00	100,00	63.562.000,00	2,33	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	2,33	0,00	Target realisasi dalam proses	koordinasi dengan subag keuangan
	Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 3 (Hektar)		100,00	50,00	37.796.000,00	100,00	50,00	37.796.000,00	7,67	0,00	0,00	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	7,67	0,00	Target realisasi dalam proses	koordinasi dengan subag keuangan
	Pembangunan Kebun Blot Desa (Hektar)		100,00	560,00	457.006.000,00	5,75	0,00	26.399.262,00	3,16	0,00	0,00	54,86	0,00	97,40	560,00	430.606.738,00	97,40	94,22	Target Realisasi masih dalam proses	Koordinasi dengan subag keuangan
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan: Ha)	Dendi Setyawan, S.Hut., MM		3,00	288.970.000,00	98,34	3,00	284.194.500,00	18,97	0,00	2.247.377.000,00	19,29	790,79	19,21	0,00	2.252.152.500,00		779,37		
	Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (Hektar)		100,00	3,00	288.970.000,00	98,34	3,00	284.194.500,00	18,97	0,00	2.247.377.000,00	19,29	790,79	19,21	0,00	2.252.152.500,00	19,21	779,37	Realisasi keuangan dalam proses pencairan	koordinasi dengan subag keuangan
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Satuan: Laporan)	Dendi Setyawan, S.Hut., MM		1,00	19.354.000,00	15,83	1,00	3.062.000,00	9,70	0,00	1.510.000,00	61,31	49,31	43,90	0,00	17.802.000,00		91,98		
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)		100,00	1,00	19.354.000,00	15,83	1,00	3.062.000,00	9,70	0,00	1.510.000,00	61,31	49,31	43,90	0,00	17.802.000,00	43,90	91,98	Target sudah tercapai	
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Satuan: Ha)	Dendi Setyawan, S.Hut., MM		2,00	79.460.000,00	6,82	0,00	5.420.500,00	3,98	0,00	480.000,00	58,36	8,86	97,16	1,00	74.519.500,00		93,78		
	Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan (Ha)		100,00	2,00	79.460.000,00	6,82	0,00	5.420.500,00	3,98	0,00	480.000,00	58,36	8,86	97,16	1,00	74.519.500,00	97,16	93,78	Target Sudah Sesuai	
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPPIH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi (Dokumen)		1,00		5.371.000,00	4,71		263.000,00	0,00		5.118.000,00	0,00	0,00	49,90		5.118.000,00	4.990,00	95,29		
3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan BPPIH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan BPPIH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Satuan: Laporan)	Yan Yan Royani, SE., S.Sos., MM		1,00	5.371.000,00	4,71	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	5.118.000,00		95,29		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Laporan pelaksanaan Pengawasan BPPIH (Kayu dan/atau HBBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)		100,00	1,00	5.371.000,00	4,71	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	5.118.000,00	49,90	95,29	Tidak ada realisasi	Masuk ke laporan GIPA
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		111.579.000,00	9,28		10.363.100,00	8,77		5.605.000,00	94,50	94,14	94,74		106.830.900,00		95,74		
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Le (Laporan)		1,00		5.345.000,00	54,16		2.895.000,00	43,50		4.910.000,00	80,32	84,97	89,34		4.910.000,00	8.934,00	91,86		
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Satuan: Laporan)	Yan Yan Royani, SE., S.Sos., MM		1,00	5.345.000,00	54,16	0,00	2.895.000,00	43,50	0,00	2.460.000,00	80,32	84,97	89,34	1,00	4.910.000,00		91,86		
	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Lebak dan Tangerang (Laporan)		100,00	1,00	5.345.000,00	54,16	0,00	2.895.000,00	43,50	0,00	2.460.000,00	80,32	84,97	89,34	1,00	4.910.000,00	89,34	91,86	Tidak ada realisasi	
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (COLHK LT) (Persen)		100,00		106.234.000,00	7,02		7.458.100,00	7,02		101.920.900,00	100,00	42,17	95,01		101.920.900,00	95,01	95,94		
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Satuan: Orang)	Yan Yan Royani, SE., S.Sos., MM		75,00	106.234.000,00	7,02	0,00	7.458.100,00	7,02	0,00	3.145.000,00	100,00	42,17	95,01	75,00	101.920.900,00		95,94		
	Mengadakan Bimbingan Teknis terkait kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Orang)		100,00	75,00	106.234.000,00	7,02	0,00	7.458.100,00	7,02	0,00	3.145.000,00	100,00	42,17	95,01	75,00	101.920.900,00	95,01	95,94	Tidak ada masalah dalam kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang	
SUB JUMLAH				847,00	1.387.058.000,00	44,82	187,00	621.800.426,00	19,44	4,00	2.432.340.924,00	43,37	391,18	71,18	662,00	3.196.485.169,00		230,45		
2.11.3.28.0.00.02.0002 CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, DAN CILEGON					1.265.479.500,00	42,66		535.671.405,00	32,26		291.789.300,00	75,61	54,47	65,11		982.961.905,00		78,29		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					273.478.500,00	20,46		55.994.780,00	20,46		46.598.610,00	100,00	83,22	87,08		234.486.840,00		85,74		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		273.478.500,00	20,46		55.994.780,00	20,46		46.598.610,00	100,00	83,22	87,08		234.486.840,00		85,74		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ada COLHK Pandeglang Serang Cilegon (Persen)		100,00		69.234.000,00	19,96		13.815.500,00	19,96		63.626.351,00	100,00	73,17	83,66		63.626.351,00	83,66	91,90		
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ugar Jatnika, SE, M.Si		1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	74,32	1,00	18.850.851,00		94,25		
	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor (Paket)		100,00	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	74,32	1,00	18.850.851,00	74,32	94,25	Tidak ada	Tidak ada
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ugar Jatnika, SE, M.Si		1,00	30.000.000,00	39,39	0,00	11.815.500,00	39,39	0,00	10.109.000,00	100,00	85,56	87,50	1,00	28.293.500,00		94,31		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		100,00	1,00	30.000.000,00	39,39	0,00	11.815.500,00	39,39	0,00	10.109.000,00	100,00	85,56	87,50	1,00	29.293.500,00	87,50	94,31	Tidak ada	Tidak ada
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Edwin Ugar Jatmika, SE, M.Si		1,00	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,99	0,00		0,00		
	Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Paket)		100,00	1,00	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,99	0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Edwin Ugar Jatmika, SE, M.Si		1,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,67	1.954.000,00		97,70		
	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)		100,00	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,67	1.954.000,00	100,00	97,70	Tidak ada	Tidak ada
2.11.01.1.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Edwin Ugar Jatmika, SE, M.Si		4,00	15.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	84,06	12,00	14.528.000,00		95,37		
	Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan (Laporan)		100,00	4,00	15.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	84,06	12,00	14.528.000,00	84,06	95,37	Tidak ada	Tidak ada
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		113.829.500,00	28,07		31.999.500,00	28,07		84.872.749,00	100,00	76,25	88,48		84.872.749,00	88,48	74,56		
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Edwin Ugar Jatmika, SE, M.Si		12,00	50.000.000,00	25,10	3,00	12.592.000,00	25,10	3,00	7.145.290,00	100,00	56,74	100,00	12,00	23.965.749,00		47,93		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		100,00	12,00	50.000.000,00	25,10	3,00	12.592.000,00	25,10	3,00	7.145.290,00	100,00	56,74	100,00	12,00	23.965.749,00	100,00	47,93	Tidak ada	Tidak ada
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Edwin Ugar Jatmika, SE, M.Si		12,00	63.829.500,00	30,40	3,00	19.407.500,00	30,40	3,00	17.255.000,00	100,00	88,91	79,46	12,00	60.907.000,00		95,42		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		100,00	12,00	63.829.500,00	30,40	3,00	19.407.500,00	30,40	3,00	17.255.000,00	100,00	88,91	79,46	12,00	60.907.000,00	79,46	95,42	Tidak ada	Tidak ada
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		90.415.000,00	11,26		10.179.780,00	11,26		85.987.740,00	100,00	118,76	87,95		85.987.740,00	87,95	95,10		
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Edwin Ugar Jatmika, SE, M.Si		9,00	77.000.000,00	13,22	0,00	10.179.780,00	13,22	0,00	11.744.320,00	100,00	115,37	85,85	9,00	72.689.940,00		94,40		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)		100,00	9,00	77.000.000,00	13,22	0,00	10.179.780,00	13,22	0,00	11.744.320,00	100,00	115,37	85,85	9,00	72.689.940,00	85,85	94,40	Tidak ada	Tidak ada
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ahmad Ruzanandar, S.Sos., M.Si		26,00	13.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	NaN		100,00	18,00	13.297.800,00		99,13		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		100,00	26,00	13.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	NaN		100,00	18,00	13.297.800,00	100,00	99,13	Tidak ada	Tidak ada
3.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					982.001.000,00	48,84		479.675.625,00	35,54		245.190.690,00	72,77	51,12	58,99		748.475.065,00		76,22		
3.08.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		872.450.000,00	43,31		377.858.125,00	38,81		245.190.690,00	89,61	64,89	65,20		740.742.565,00		84,90		
3.08.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PDC) (Persen)		100,00		865.006.000,00	42,82		370.414.125,00	39,14		740.742.565,00	91,41	66,19	65,76		740.742.565,00	65,76	85,63		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	17	18	19	20	21
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan: Ha)	Dendi Setyawan, S.Hut., MM		532,00	754.091.000,00	47,92	530,00	361.361.519,00	43,82	0,00	244.670.690,00	91,48	67,71	72,97	0,00	637.400.171,00		84,53		
	Pemeliharaan Sumber Mata Air (Ha)		100,00	2,00	142.421.000,00	4,20	0,00	5.983.588,00	4,20	0,00	900.000,00	100,00	15,04	89,00	0,00	136.667.412,00	89,00	95,95	1. Tidak ada permasalahan 2. Tidak ada target fisik dan keuangan.	Koordinasi dengan Kasubag PEP dan Keuangan DLHK, Prov. Banten
	Kebun Bibit Desa (KBD) (Ha)		100,00	480,00	378.935.000,00	32,89	480,00	124.662.931,00	32,89	0,00	68.000.000,00	100,00	54,55	58,51	0,00	322.962.069,00	58,51	85,23	1. Pembayaran pelayanan kebersihan (72 HOK) proses verifikasi surat pertanggungjawaban 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan ke kabupaten Gerang (3 orang x kegiatan) sudah realisasi 3. Koordinasi rapat evaluasi kegiatan (27 Orang x 1 Kegiatan) sudah realisasi	Koordinasi dengan Kasubag PEP dan Keuangan DLHK, Prov. Banten
	Pembangunan Hutan Rakyat (HR) (Ha)		100,00	50,00	232.735.000,00	99,13	50,00	230.715.000,00	85,85	0,00	175.770.690,00	86,60	76,19	86,72	0,00	177.790.690,00	86,72	76,39	1. koordinasi rapat evaluasi kegiatan (6 orang x 1 kegiatan) evlensi 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan ke kabupaten pandeglang (3 orang x 4 kegiatan) evlensi 3. Pembayaran pelayanan kebersihan (452 HOK) proses verifikasi surat pertanggungjawaban.	Koordinasi dengan Kasubag PEP dan Keuangan DLHK, Prov. Banten
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Satuan: Laporan)	Dendi Setyawan, S.Hut., MM		1,00	5.915.000,00	44,20	1,00	2.615.000,00	28,99	0,00	520.000,00	65,59	19,89	84,79	0,00	4.780.000,00		80,81		
	Jumlah laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan (Laporan)		100,00	1,00	5.915.000,00	44,20	1,00	2.615.000,00	28,99	0,00	520.000,00	65,59	19,89	84,79	0,00	4.780.000,00	84,79	80,81	1. Tidak ada permasalahan 2. Pelaporan laporan pertanggungjawaban sub kegiatan sudah realisasi bulan Juli 2025.	Koordinasi dengan kasubag PEP dan keuangan DLHK, Prov. Banten
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Satuan: Ha)	Dendi Setyawan, S.Hut., MM		4,00	105.000.000,00	6,14	4,00	6.437.606,00	6,14	0,00	0,00	100,00	0,00	12,89	0,00	98.562.394,00		93,87		
	Kebun Bibit Desa (KBD) Mangrove (Ha)		100,00	2,00	53.428.000,00	9,80	2,00	5.229.961,00	9,80	0,00	0,00	100,00	0,00	14,73	0,00	54.658.301,00	14,73	102,30	1. Tidak ada permasalahan 2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan KBD Mangrove 3. Pembayaran pelayanan kebersihan (10 HOK) belum realisasi masih proses verifikasi surat pertanggungjawaban.	Koordinasi dengan Kasubag PEP dan Keuangan DLHK, Prov. Banten

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan (Ha)		100,00	2,00	51.572.000,00	2,34	2,00	1.207.645,00	2,34	0,00	0,00	100,00	0,00	10,99	0,00	43.904.093,00	10,99	85,13	1. Monitoring dan evaluasi kegiatan ke kabupaten Serang (3 Orang x 1 kegiatan) sudah realisasi 100%. 2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan, sudah realisasi 100%	Koordinasi dengan Kasubag PEP dan Keuangan DLHK Prov. Banten
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi (Dokumen)		1,00		7.444.000,00	100,00		7.444.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Satuan: Laporan)	Yan Yan Royani, SE., S.Sos., MM		1,00	7.444.000,00	100,00	1,00	7.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH Kayu dan/atau HHBK untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi (Notulen)		100,00	1,00	7.444.000,00	100,00	1,00	7.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	melaksanakan kegiatan pada minggu kedua bulan desember karena terkendala revolving anggaran	melaksanakan kegiatan pada minggu kedua
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		109.551.000,00	92,94		101.818.500,00	9,55		0,00	10,28	0,00	9,55		7.732.500,00		7,06		
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pa (Laporan)		1,00		6.170.000,00	100,00		6.170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Satuan: Laporan)	Yan Yan Royani, SE., S.Sos., MM		1,00	6.170.000,00	100,00	0,00	6.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Notulen)		100,00	1,00	6.170.000,00	100,00	0,00	6.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan dilaksanakan minggu ke dua bulan desember karena terkendala revolving anggaran	melaksanakan kegiatan pada minggu kedua
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (DLHK PBC) (Persen)		100,00		103.381.000,00	92,52		95.648.500,00	10,12		7.732.500,00	10,94	0,00	10,12		7.732.500,00	10,12	7,48		
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Satuan: Orang)	Yan Yan Royani, SE., S.Sos., MM		75,00	103.381.000,00	92,52	50,00	95.648.500,00	10,12	0,00	0,00	10,94	0,00	10,12	25,00	7.732.500,00		7,48		
	Kelompok Masyarakat Sekitar KEE yang diberdayakan 50 Orang (Laporan)		100,00	75,00	103.381.000,00	92,52	50,00	95.648.500,00	10,12	0,00	0,00	10,94	0,00	10,12	25,00	7.732.500,00	10,12	7,48	Kegiatan dilaksanakan minggu ke dua bulan desember karena terkendala revolving anggaran	melaksanakan kegiatan pada minggu ke dua
SUB JUMLAH				681,00	1.255.479.500,00	42,88	592,00	535.671.405,00	32,28	6,00	291.789.300,00	75,51	54,47	86,11	91,66	962.961.905,00		78,29		
2.11.3.28.0.02.0003	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				1.135.789.600,00	35,89		409.404.718,00	35,73		380.301.200,00	99,55	92,89	96,72		965.352.741,00		84,99		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	17	18	19	20	21
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					1.135.789.600,00	35,89		409.404.718,00	35,73		380.301.200,00	99,55	92,89	96,72		965.352.741,00		84,99		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		491.202.000,00	7,38		38.101.925,00	7,02		35.893.900,00	95,06	94,20	91,32		438.312.534,00		89,23		
2.11.01.1.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Lab Lingkungan (Persen)		100,00		277.702.000,00	2,87		9.800.000,00	2,23		226.273.364,00	77,53	79,65	91,82		226.273.364,00	91,82	81,48		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.Si		1,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	0,00		0,00		
	Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)		100,00	1,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	- Tidak ada realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.Si		6,00	60.789.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	6,00	24.342.000,00		40,04		
	Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor (paket)		100,00	6,00	60.789.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	6,00	24.342.000,00	100,00	40,04	- Tidak ada realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor dibulan Desember	
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.Si		3,00	182.810.600,00	0,98	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00	0,00	99,33	99,02	2,00	180.776.896,00		98,89		
	Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)		100,00	3,00	182.810.600,00	0,98	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00	0,00	99,33	99,02	2,00	180.776.896,00	99,02	98,89	- tidak ada realisasi pekerjaan telah di kerjakan pada bulan oktober dan nopember 2025	
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.Si		1,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	1.988.468,00		99,42		
	Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)		100,00	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	1.988.468,00	100,00	99,42	- tidak ada realisasi pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan target	
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.Si		12,00	27.012.000,00	22,81	1,00	6.200.000,00	22,81	0,00	4.230.000,00	100,00	68,23	22,81	9,00	19.166.000,00		70,72		
	Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		100,00	12,00	27.012.000,00	22,88	1,00	6.200.000,00	22,88	0,00	4.230.000,00	100,00	68,23	22,88	8,00	19.166.000,00	22,88	70,94	- tidak ada realisasi kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		100,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	- tidak ada realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan (Persen)		100,00		213.500.000,00	13,25		28.301.925,00	13,25		212.039.170,00	100,00	99,34	90,68		212.039.170,00	90,68	99,32		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M.Si		10,00	90.000.000,00	56,60	7,00	28.301.925,00	56,60	7,00	28.087.900,00	100,00	99,34	56,60	11,00	49.778.700,00		99,56		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)		100,00	10,00	49.513.000,00	56,17	7,00	27.814.925,00	56,17	7,00	27.601.000,00	100,00	99,23	56,17	11,00	49.291.800,00	56,17	99,55	- tidak ada masalah pekerjaan telah dilaksanakan pada bulan november realisasi di bulan desember 2025	
	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Laporan)		100,00	0,00	487.000,00	100,00	0,00	487.000,00	100,00	0,00	486.900,00	100,00	99,98	100,00	0,00	486.900,00	100,00	99,98	- tidak ada permasalahan pekerjaan telah dilaksanakan	
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Ahmad Ruznandar, S.Sos., M.Si		44,00	163.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	101,10	36,00	162.260.470,00		99,24		
	Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)		100,00	44,00	162.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	101,11	36,00	161.065.000,00	101,11	99,24	- tidak ada realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada bulan desember 2025	
	Laporan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Laporan)		100,00	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	1.195.470,00	100,00	99,96	- tidak ada realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di bulan desember 2025	
2.11.08 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			100,00		644.587.600,00	57,62		371.302.793,00	57,61		344.407.300,00	99,99	92,76	100,83		527.040.207,00		81,76		
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan (Dokumen)		2,00		601.287.600,00	60,31		362.553.019,00	60,31		503.102.281,00	100,00	94,75	104,92		503.102.281,00	5.246,06	83,67		
2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Satuan: Paket)	Triana Saraswati, ST., MM		124,00	125.260.000,00	12,32	18,00	15.338.000,00	12,32	18,00	4.749.500,00	100,00	30,97	150,01	205,00	98.165.500,00		78,37		
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)		100,00	124,00	125.260.000,00	12,32	18,00	15.338.000,00	12,32	18,00	4.749.500,00	100,00	30,97	150,01	205,00	98.165.500,00	150,01	78,37		
2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Satuan: Unit)	Triana Saraswati, ST., MM		6,00	312.779.600,00	89,72	2,00	280.636.099,00	89,72	2,00	277.370.000,00	100,00	98,84	97,43	5,00	309.513.501,00		98,96		
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)		100,00	6,00	312.779.600,00	89,72	2,00	280.636.099,00	89,72	2,00	277.370.000,00	100,00	98,84	97,43	5,00	309.513.501,00	97,43	98,96		
2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Satuan: Dokumen)	Lia Mulawati, SKM		3,00	163.248.000,00	40,79	2,00	66.578.920,00	40,79	2,00	61.417.100,00	100,00	92,25	84,68	3,00	95.423.280,00		58,45		
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)		100,00	3,00	163.248.000,00	40,79	2,00	66.578.920,00	40,79	2,00	61.417.100,00	100,00	92,25	84,68	3,00	95.423.280,00	84,68	58,45	- Tidak ada target aktifitas kegiatan - Target Rp. 4.857.920 merupakan DILPA Kontrak dan belanja registrasi keanggotaan	- tidak ada target bulan desember
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten (Dokumen)		2,00		43.300.000,00	20,22		8.749.774,00	20,14		23.937.926,00	99,60	9,95	43,98		23.937.926,00	2.199,00	55,28		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Intas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Satuan: Laporan)	Lia Muliawati, SKM		2,00	43.300.000,00	20,22	1,00	8.749.774,00	20,14	1,00	870.700,00	99,60	9,95	43,98	3,00	23.937.926,00		55,28		
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Intas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (laporan)		100,00	2,00	43.300.000,00	20,22	1,00	8.749.774,00	20,14	1,00	870.700,00	99,60	9,95	43,98	3,00	23.937.926,00	43,98	55,28	tidak ada target bulanan	tidak ada target bulanan
SUB JUMLAH				212,00	1.135.789.600,00	36,88	31,00	409.404.718,00	36,78	30,00	380.301.200,00	99,55	92,89	86,72	282,00	965.352.741,00		84,99		
2.11.3.28.0.02.0004 UPTD BERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN					1.192.901.500,00	23,45		262.872.336,00	22,46		196.246.365,00	95,76	74,66	98,80		1.087.366.849,00		91,15		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					365.928.500,00	35,97		131.640.996,00	35,88		114.785.995,00	99,74	87,20	71,31		305.479.019,00		83,48		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		365.928.500,00	35,97		131.640.996,00	35,88		114.785.995,00	99,74	87,20	71,31		305.479.019,00		83,48		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD SPTH (Persen)		100,00		126.870.000,00	32,94		41.789.650,00	32,90		107.021.867,00	99,89	94,58	55,09		107.021.867,00		55,09	84,36	
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M. Di		1,00	16.000.000,00	42,40	1,00	6.783.550,00	42,10	0,00	6.130.530,00	99,29	90,37	70,40	1,00	15.689.480,00		98,06		
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)		100,00	1,00	16.000.000,00	42,40	1,00	6.783.550,00	42,10	0,00	6.130.530,00	99,29	90,37	70,40	1,00	15.689.480,00	70,40	98,06	Capaian penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini mencapai 98,06%. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan harga di marketplace (Plaza Banten)	telah konsultasi ke Subbag PEP dan Keuangan, sisa anggaran dijadikan slipa di akhir tahun anggaran
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M. Di		1,00	16.870.000,00	31,62	1,00	5.335.000,00	31,62	1,00	6.550.895,00	100,00	122,79	68,02	1,00	16.520.287,00		97,93		
	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		100,00	1,00	16.870.000,00	31,62	1,00	5.335.000,00	31,62	1,00	6.550.895,00	100,00	122,79	68,02	1,00	16.520.287,00	68,02	97,93	Capaian realisasi anggaran pada Sub keg penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 97,93% hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan harga di plaza banten	telah konsultasi dengan subbag PEP dan Keuangan agar sisa anggaran yang tersisa dijadikan slipa di akhir tahun anggaran.
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M. Di		2,00	75.000.000,00	32,46	1,00	24.341.500,00	32,46	1,00	21.771.500,00	100,00	89,44	46,16	1,00	56.068.500,00		74,76		
	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		100,00	2,00	75.000.000,00	32,46	1,00	24.341.500,00	32,46	1,00	21.771.500,00	100,00	89,44	46,16	1,00	56.068.500,00	46,16	74,76	Pada Sub Keg Penyediaan bahan logistik kantor tidak ada hambatan dalam realisasi penyerapan anggaran	terdapat slipa di akhir tahun dikarenakan terdapat PPPK yang diterima di OPD lain,
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jatmika, SE, M. Di		1,00	2.000.000,00	70,48	1,00	1.409.600,00	70,48	1,00	1.263.200,00	100,00	89,61	70,48	1,00	1.853.600,00		92,68		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		100,00	1,00	2.000.000,00	70,48	1,00	1.409.600,00	70,48	1,00	1.263.200,00	100,00	89,61	70,48	1,00	1.853.600,00	70,48	92,68	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan capaian realisasi anggaran sebesar 92,68% hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan harga di Plaza Banten.	Sudah koordinasi dengan Subbag Keuangan dan Subbag PEP, sisa anggaran yang masih ada dijadikan slipa di akhir tahun anggaran

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	6	8	7	8	8	10	11	12	13	14	16	18	17	18	19	20	21
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		1,00	2.000.000,00	28,00	1,00	560.000,00	28,00	1,00	560.000,00	100,00	100,00	94,00	1,00	2.000.000,00		100,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		100,00	1,00	2.000.000,00	28,00	1,00	560.000,00	28,00	1,00	560.000,00	100,00	100,00	94,00	1,00	2.000.000,00	94,00	100,00	Capaian realisasi anggaran pada sub keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tidak ada hambatan, sudah 100%	konsultasi dengan PEP
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		12,00	15.000.000,00	22,40	3,00	3.360.000,00	22,40	3,00	3.250.000,00	100,00	96,73	61,64	9,00	14.890.000,00		99,27		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		100,00	12,00	15.000.000,00	22,40	3,00	3.360.000,00	22,40	3,00	3.250.000,00	100,00	96,73	61,64	9,00	14.890.000,00	61,64	99,27	Sub keg penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada bulan ini sesuai dengan ROK, tetapi belum sesuai target dikarenakan biaya transportasi tidak sesuai dengan golongan yang melakukan perjalanan dinas.	konsultasi dengan PEP dan sisa anggaran yang tidak terserap dijadikan slipa akhir tahun anggaran
2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada (UPTD SPTH) (Persen)		100,00		63.312.500,00	23,00		14.560.006,00	22,54		29.244.982,00	98,00	44,60	97,41		29.244.982,00	97,41	46,19		
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		12,00	63.312.500,00	23,00	3,00	14.560.006,00	22,54	3,00	6.494.370,00	98,00	44,60	97,41	6,00	29.244.982,00		46,19		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		100,00	12,00	63.312.500,00	23,00	3,00	14.560.006,00	22,54	3,00	6.494.370,00	98,00	44,60	97,41	6,00	29.244.982,00	97,41	46,19	Pada sub keg penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada bulan desember tidak memenuhi target dikarenakan tagihan listrik mengalami penurunan.	Sisa anggaran dijadikan slipa pada akhir tahun anggaran
2.11.01.1.09.0001 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH (Persen)		100,00		175.746.000,00	42,84		75.291.330,00	42,84		169.212.170,00	100,00	91,33	73,62		169.212.170,00	73,62	96,28		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		9,00	127.970.000,00	36,96	3,00	47.305.700,00	36,96	3,00	41.257.500,00	100,00	87,21	75,00	6,00	121.921.800,00		96,27		
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Unit)		100,00	3,00	102.910.000,00	31,43	1,00	32.349.700,00	31,43	1,00	26.504.000,00	100,00	81,93	75,00	2,00	97.064.300,00	75,00	94,32	Pada sub keg pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan perorangan sudah sesuai dengan ROK tetapi tidak sesuai dengan target dikarenakan ada efisiensi dalam pemeliharaan kendaraan R4	sisa anggaran yang tidak terserap dijadikan slipa akhir tahun anggaran

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Unit)		100,00	6,00	26.060.000,00	59,68	2,00	14.956.000,00	59,68	2,00	14.753.500,00	100,00	98,65	75,00	4,00	24.857.500,00	75,00	99,19	pada sub keg pemeliharaan kend dinas operasional lapangan R2 bulan ini tidak memiliki target, akan tetapi ada belanja pembayaran pajak kendaraan yang belum terbayarkan pada bulan sebelum nya.	ada sisa akhir tahun anggaran dikarenakan adanya penyesuaian harga di market place
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Lembar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	Belanja ATK pada Sub Keg ini terkena efisiensi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2025	konsultasi dengan Subbag PEP
2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Edwin Ugar Jamika, SE, M.Si		14,00	47.776.000,00	59,59	3,00	27.985.630,00	59,59	3,00	27.508.000,00	100,00	99,29	69,91	10,00	47.290.370,00		98,98		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		100,00	14,00	47.776.000,00	59,59	3,00	27.985.630,00	59,59	3,00	27.508.000,00	100,00	99,29	69,91	10,00	47.290.370,00	69,91	98,98	Pada Sub Keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terdapat realisasi keuangan sebesar 26.973.000, realisasi fisik telah dilaksanakan di bulan November sesuai dengan target, dikarenakan proses pencatannya termasuk dalam GU nihil maka penginputan realisasi masuk dalam bulan Desember	Teah konsultasi ke Subbag Keuangan
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					826.973.000,00	17,91		131.231.350,00	16,52		81.460.370,00	92,22	62,07	110,96		781.887.830,00		94,55		
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		826.973.000,00	17,91		131.231.350,00	16,52		81.460.370,00	92,22	62,07	110,96		781.887.830,00		94,55		
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (Persen)		100,00		826.973.000,00	17,91		131.231.350,00	16,52		781.887.830,00	92,22	62,07	110,96		781.887.830,00	110,96	94,55		
3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)	Silfina, SP,MM		1,00	20.150.000,00	10,20	1,00	2.057.000,00	10,20	0,00	2.010.000,00	100,00	97,72	100,00	0,00	20.103.000,00		99,77		
	Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan (Sertifikat)		100,00	1,00	20.150.000,00	10,20	1,00	2.057.000,00	10,20	0,00	2.010.000,00	100,00	97,72	100,00	0,00	20.103.000,00	100,00	99,77	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember	-
3.28.03.1.09.0003 Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)	Silfina, SP,MM		1,00	2.855.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaN	NaN	32,40	1,00	2.841.000,00		99,51		
	Sertifikat Mutu Benih Tanaman Hutan (Sertifikat)		100,00	1,00	2.855.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaN	NaN	32,40	1,00	2.841.000,00	32,40	99,51	Tidak ada target kinerja di Bulan Desember	-
3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)	Silfina, SP,MM		3,00	18.370.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	NaN	NaN	100,00	3,00	18.342.500,00		99,85		
	Sertifikat Mutu Bibit Tanaman Hutan (Sertifikat)		100,00	3,00	18.370.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	NaN	NaN	100,00	3,00	18.342.500,00	100,00	99,85	Tidak ada target kinerja di bulan Desember	-
3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar (Satuan: Laporan)	Silfina, SP,MM		1,00	3.800.000,00	45,89	1,00	1.744.000,00	45,89	1,00	1.729.500,00	100,00	99,17	79,21	1,00	3.785.500,00		99,62		
	Laporan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit (Laporan)		100,00	1,00	3.800.000,00	45,89	1,00	1.744.000,00	45,89	1,00	1.729.500,00	100,00	99,17	79,21	1,00	3.785.500,00	79,21	99,62	Fiskal dan Keuangan telah terealisasi	-
3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan (Satuan: Batang)	Cecap Hery Sukmawan, SP		250.000,00	777.998.000,00	18,55	145.000,00	127.430.350,00	17,07	0,00	77.720.870,00	92,02	60,99	112,27	35.000,00	733.092.452,00		94,23		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Bibit berkualitas yang tersedia untuk rehabilitasi lahan (batang)		100,00	250.000,00	777.998.000,00	18,55	145.000,00	127.430.350,00	17,07	0,00	77.720.870,00	92,02	60,99	112,27	35.000,00	733.092.452,00	112,27	94,23	Kekurangan penyediaan bibit dikarenakan tidak dilaksanakannya pengambilan bibit dari PP Rumpin tahap ke 2, disebabkan bibit MPTG yang ada belum siap untuk disalurkan dan adanya penurunan jumlah bibit yang diproduksi dari 5 juta batang ke 600 ribu	Mengusulkan pemeliharaan yang intensif terhadap bibit muda untuk mencegah kematian akibat cuaca ekstrim di akhir tahun agar ketersediaan bibit yang ada tetap terjaga dengan baik hingga saatnya disalurkan
3.28.03.1.09.00.10 Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pen (Satuan: Unit)	Silfhia, SP,MM		1,00	3.800.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaN	NaN	43,56	1,00	3.723.378,00		97,98		
	Unit Usaha Berbasis Risiko (Unit Usaha)		100,00	1,00	3.800.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaN	NaN	43,56	1,00	3.723.378,00	43,56	97,98	Tidak ada target kinerja di Bulan Desember	-
SUB JUMLAH				250.060,00	1.192.901.500,00	28,46	145.024,00	262.872.336,00	22,48	22,00	196.246.365,00	95,76	74,65	88,80	35.042,00	1.087.366.849,00		91,15		
2.11.3.28.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN					5.630.159.500,00	86,64		4.872.339.573,00	84,60		438.438.680,00	97,65	9,00	95,92		1.184.851.611,00		21,04		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					4.893.716.500,00	92,39		4.515.649.123,00	90,04		347.594.680,00	97,46	7,70	95,77		713.806.057,00		14,59		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		4.893.716.500,00	92,39		4.515.649.123,00	90,04		347.594.680,00	97,46	7,70	95,77		713.806.057,00		14,59		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahanra Banten (Persen)		100,00		271.136.500,00	33,89		86.308.747,00	33,89		215.087.833,00	100,00	35,06	66,63		215.087.833,00	66,63	79,33		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jathika, SE, M.Si		1,00	8.055.000,00	1,11	0,00	89.500,00	1,11	0,00	0,00	100,00	0,00	1,11	1,00	7.965.500,00		98,89		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)		100,00	1,00	8.055.000,00	1,11	0,00	89.500,00	1,11	0,00	0,00	100,00	0,00	1,11	1,00	7.965.500,00	1,11	98,89	Anggaran yang tersedia dibulan Desember merupakan anggaran dari sisa negosiasi kontrak/ Pesanan	
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jathika, SE, M.Si		4,00	158.897.500,00	29,11	0,00	40.686.447,00	29,11	0,00	10.678.200,00	100,00	26,25	52,15	4,00	128.889.253,00		81,11		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)		100,00	1,00	75.471.500,00	52,98	0,00	39.985.935,00	52,98	0,00	10.678.200,00	100,00	26,70	72,14	1,00	46.163.765,00	72,14	61,17	Anggaran yang tersedia dibulan Desember merupakan anggaran slipa dari sisa hasil negosiasi kontrak/ pesanan	-
	Penyediaan Kertas dan Cover (Paket)		100,00	1,00	17.244.000,00	0,59	0,00	102.000,00	0,59	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	17.142.000,00	100,00	99,41	Anggaran yang tersedia dibulan Desember merupakan anggaran slipa dari sisa hasil negosiasi kontrak/ pesanan	-
	Penyediaan Bahan Komputer (Paket)		100,00	1,00	5.064.000,00	1,15	0,00	58.000,00	1,15	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	5.006.000,00	100,00	98,85	Anggaran yang tersedia dibulan Desember merupakan anggaran slipa dari sisa hasil negosiasi kontrak/ pesanan	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi triwulan ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Penyediaan Perabot Kantor (Paket)		100,00	1,00	61.118.000,00	10,00	0,00	540.512,00	10,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00	1,00	60.577.488,00	10,00	99,12	Anggaran yang tersedia dibulan Desember merupakan anggaran sipa dari sisa hasil negosiasi kontrak/ pesanan	-
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jamika, SE, M. Di		4,00	78.380.000,00	40,25	4,00	31.538.800,00	40,25	0,00	13.631.880,00	100,00	43,22	96,99	1,00	60.473.080,00		77,15		
	Bahan Logistik Kantor Pakai Habis (Paket)		100,00	1,00	25.804.000,00	17,61	1,00	4.546.800,00	17,61	0,00	4.531.880,00	100,00	99,67	100,00	0,00	25.789.080,00	100,00	99,94	Target sudah selesai dilaksanakan	-
	Bahan logistik kantor Makanan dan Minuman Rapat (Paket)		100,00	1,00	28.800.000,00	34,47	1,00	9.920.000,00	34,47	0,00	4.720.000,00	100,00	47,58	91,81	0,00	23.600.000,00	91,81	81,94	realisasi keuangan belum terhitung di bulan desember	koordinasi dengan sub bagian keuangan DLHK
	Bahan logistik kantor Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Paket)		100,00	2,00	23.776.000,00	71,81	2,00	17.072.000,00	71,81	0,00	4.380.000,00	100,00	25,66	100,00	0,00	11.084.000,00	100,00	46,62	realisasi keuangan belum terhitung di bulan Desember	Koordinasi dengan sub bagian keuangan
	Bahan logistik kantor extra fooding Jasa tenaga Administrasi lapangan (Paket)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	1,00	0,00	NaN	NaN	tidak ada target	-
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Ligar Jamika, SE, M. Di		1,00	4.564.000,00	9,95	0,00	454.000,00	9,95	0,00	0,00	100,00	0,00	9,95	1,00	4.110.000,00		90,05		
	Cetak Kartu Tiket Masuk wisatawan dan Pas masuk Kendaraan (Paket)		100,00	1,00	4.564.000,00	9,95	0,00	454.000,00	9,95	0,00	0,00	100,00	0,00	9,95	1,00	4.110.000,00	9,95	90,05	Anggaran yang tersedia dibulan Desember merupakan anggaran dari sisa negosiasi Pesanan barang	-
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jamika, SE, M. Di		12,00	21.240.000,00	63,75	3,00	13.540.000,00	63,75	0,00	5.950.000,00	100,00	43,94	100,00	9,00	13.650.000,00		64,27		
	Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (Laporan)		100,00	12,00	21.240.000,00	63,75	3,00	13.540.000,00	63,75	0,00	5.950.000,00	100,00	43,94	100,00	9,00	13.650.000,00	100,00	64,27	tidak ada target dikarenakan kegiatan sudah selesai dilaksanakan	-
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan Tawara Banten (Persen)		100,00		2.201.938.000,00	100,00		2.201.938.000,00	94,79		255.773.003,00	94,79	11,62	94,79		255.773.003,00	94,79	11,62		
2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan: Paket)			1,00	162.017.600,00	100,00	1,00	162.017.600,00	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	0,00		0,00		
	Pengadaan Mebel (Paket)		100,00	1,00	162.017.600,00	100,00	1,00	162.017.600,00	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	Fisk sudah selesai dilaksanakan, akan tetapi realisasi keuangan belum terhitung di bulan Desember	Koordinasi dengan Sub Bagian keuangan DLHK
2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)			152,00	456.899.000,00	100,00	152,00	456.899.000,00	74,87	83,00	255.773.003,00	74,87	55,98	74,87	83,00	255.773.003,00		55,98		
	Pengadaan Peralatan kantor Lainnya (Unit)		100,00	10,00	47.681.000,00	100,00	10,00	47.681.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	Target sudah tercapai	-
	Pengadaan Alat Pendingin (Unit)		100,00	23,00	117.274.000,00	100,00	23,00	117.274.000,00	100,00	0,00	115.940.003,00	100,00	98,86	100,00	0,00	115.940.003,00	100,00	98,86	Target fisk sudah tercapai akan tetapi realisasi keuangan belum terhitung di bulan Desember	Koordinasi dengan sub bagian keuangan
	Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya (Unit)		100,00	36,00	140.469.000,00	100,00	36,00	140.469.000,00	100,00	0,00	139.833.000,00	100,00	99,55	100,00	0,00	139.833.000,00	100,00	99,55	Target fisk sudah tercapai akan tetapi realisasi keuangan belum terhitung di bulan Desember	Koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan DLHK
	Pengadaan Perabot Kantor (Unit)		100,00	75,00	48.593.000,00	100,00	75,00	48.593.000,00	100,00	75,00	0,00	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	100,00	0,00	Fisk sudah selesai dilaksanakan aka tetapi realisasi keuangan belum terhitung di bulan Desember	Koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan DLHK

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Isi Program/Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Unit)		100,00	2,00	16.614.000,00	100,00	2,00	16.614.000,00	100,00	2,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2,00	0,00	100,00	0,00	Target sudah Tercapai	-
	Pengadaan Personal Komputer (Unit)		100,00	6,00	86.268.000,00	100,00	6,00	86.268.000,00	16,67	6,00	0,00	16,67	0,00	16,67	6,00	0,00	16,67	0,00	Target Sudah Tercapai	
2.11.01.1.07.00.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Haris Mulyana, A.Md		10,00	1.583.021.400,00	100,00	8,00	1.583.021.400,00	100,00	8,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00		0,00		
	Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)		100,00	1,00	192.411.500,00	100,00	0,00	192.411.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	Pembangunan Masih dalam proses finishing	Koordinasi dengan jasa Konsultan pengawas dan Pejabat Pengadaan
	Pembangunan Gedung Kantor Tahura Banten (Unit)		100,00	1,00	350.000.000,00	100,00	1,00	350.000.000,00	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	Sudah selesai dilaksanakan, akan tetapi realisasi keuangan belum terhitung dibulan berjalan	koordinasi dengan sub bagian keuangan DLHK
	Pembangunan Fasilitas Umum (Unit)		100,00	7,00	889.609.900,00	100,00	7,00	889.609.900,00	100,00	7,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,00	0,00	100,00	0,00	Flak sudah dilaksanakan masih dalam proses Finishing kurang lebih 85 %, kendalaanya cuaca dikarenakan intensitas curah hujan tinggi sehingga menjadi penghambat pekerjaan.	Koordinasi dengan Sub Bagian keuangan dan pejabat pengadaan DLHK
	Pembangunan Tempat Peristirahatan (Unit)		100,00	1,00	151.000.000,00	100,00	0,00	151.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	Pembangunan masih dalam proses Finishing	Koordinasi dengan jasa konsultan pengawas dan pejabat pengadaan
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten) (Persen)		100,00		195.469.000,00	73,77		144.172.430,00	73,77		64.734.970,00	100,00	9,32	100,00		64.734.970,00	100,00	33,12		
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Edwin Ligar Jabrika, SE, M.Si		12,00	195.469.000,00	73,77	3,00	144.172.430,00	73,77	3,00	13.438.400,00	100,00	9,32	100,00	9,00	64.734.970,00		33,12		
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)		100,00	12,00	195.469.000,00	73,77	3,00	144.172.430,00	73,77	3,00	13.438.400,00	100,00	9,32	100,00	9,00	64.734.970,00	100,00	33,12	Realisasi Keuangan belum terhitung dibulan Desember	Koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan DLHK
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH (Persen)		100,00		2.225.173.000,00	93,62		2.083.229.946,00	93,62		178.210.251,00	100,00	2,31	99,92		178.210.251,00	99,92	8,01		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jabrika, SE, M.Si		12,00	205.516.000,00	44,67	1,00	91.788.946,00	44,67	1,00	43.924.200,00	100,00	47,85	100,00	20,00	157.651.254,00		76,71		
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Roda Empat (Unit)		100,00	5,00	169.716.000,00	49,50	1,00	84.002.276,00	49,50	1,00	41.310.600,00	100,00	49,18	100,00	5,00	127.024.324,00	100,00	74,85	Flak sudah selesai dilaksanakan akan tetapi realisasi keuangan belum terhitung dibulan Desember	Koordinasi dengan Sub Bagian keuangan DLHK
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua (Unit)		100,00	7,00	36.800.000,00	21,76	0,00	7.786.670,00	21,76	0,00	2.613.600,00	100,00	33,57	100,00	15,00	30.626.930,00	100,00	85,55	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan sudah mencapai target	-
2.11.01.1.09.00.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Ahmad Rusnandar, S.Sos., M.Si		37,00	2.019.657.000,00	98,60	8,00	1.991.441.000,00	98,60	8,00	4.198.997,00	100,00	0,21	99,92	24,00	20.558.997,00		1,02		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga (Unit)		100,00	25,00	41.316.601,00	49,57	2,00	20.480.601,00	49,57	2,00	4.198.997,00	100,00	20,50	100,00	10,00	7.948.997,00	100,00	19,24	Fisik Sudah selesai dilaksanakan akan tetapi realisasi keuangan belum terhitung dibulan Desember	Koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan DLHK
	Jasa Pemeliharaan Kebersihan Angkutan Sampah (Unit)		100,00	5,00	35.416.000,00	79,17	2,00	28.036.000,00	79,17	2,00	0,00	100,00	0,00	95,27	5,00	12.610.000,00	95,27	35,51	Target sudah selesai dilaksanakan	-
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Unit)		100,00	2,00	925.118.999,00	100,00	0,00	925.118.999,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2,00	0,00	100,00	0,00	Demua Pekerjaan masih dalam proses finishing	Koordinasi dengan jasa konsultan pengawas dan pejabat pengadaan
	Pemeliharaan kamar Penginapan (Unit)		100,00	5,00	1.017.805.400,00	100,00	4,00	1.017.805.400,00	100,00	4,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,00	0,00	100,00	0,00	Pembangunan Masih dalam proses Finishing	Koordinasi dengan jasa konsultan pengawas dan pejabat pengadaan
	Pemeliharaan Jaringan Listrik (Unit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	2,00	0,00	NaN	NaN	Tidak ada target	-
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					736.442.000,00	48,43		356.690.450,00	48,43		90.844.000,00	100,00	25,47	96,95		471.045.554,00		63,96		
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		736.442.000,00	48,43		356.690.450,00	48,43		90.844.000,00	100,00	25,47	96,95		471.045.554,00		63,96		
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (Persen)		100,00		736.442.000,00	48,43		356.690.450,00	48,43		471.045.554,00	100,00	25,47	96,95		471.045.554,00	96,95	63,96		
3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjut (Satuan: Permohonan)	Edwin Nugraha,S Hut, MP		30,00	12.740.000,00	9,33	0,00	1.188.000,00	9,33	0,00	0,00	100,00	0,00	64,68	0,00	12.002.000,00		94,21		
	pemanfaatan jasa lingkungan di Tahura Banten (Permohonan)		100,00	30,00	12.740.000,00	9,33	0,00	1.188.000,00	9,33	0,00	0,00	100,00	0,00	64,68	0,00	12.002.000,00	64,68	94,21		
3.28.04.1.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi (Satuan: Dokumen)	Edwin Nugraha,S Hut, MP		1,00	10.000.000,00	3,98	0,00	398.000,00	3,98	0,00	0,00	100,00	0,00	71,09	0,00	9.602.000,00		96,02		
	Kerjasama kemitraan di Tahura Banten (Dokumen)		100,00	1,00	10.000.000,00	3,98	0,00	398.000,00	3,98	0,00	0,00	100,00	0,00	71,09	0,00	9.602.000,00	71,09	96,02		
3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Satuan: Desa)	Romi,SE		4,00	48.310.000,00	56,94	0,00	27.510.100,00	56,94	0,00	0,00	100,00	0,00	79,96	4,00	20.799.900,00		43,06		
	Desa yang diberdayakan melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)		100,00	4,00	48.310.000,00	56,94	0,00	27.510.100,00	56,94	0,00	0,00	100,00	0,00	79,96	4,00	20.799.900,00	79,96	43,06	Realisasi Fisik sesuai dengan target capaian kinerja, sedangkan realisasi anggaran telah dilaksanakan sebelum target bulan ini	kekurangan dalam realisasi fisik dan anggaran pada sub kegiatan ini perlu diperbaiki pada tahun anggaran yang akan datang
3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan (Satuan: Dokumen)	Edwin Nugraha,S Hut, MP		2,00	53.510.000,00	62,47	1,00	33.420.000,00	62,47	0,00	19.396.000,00	100,00	58,04	96,92	1,00	39.486.000,00		73,79		
	Penyusunan rencana pengelolaan Tahura Banten (Dokumen)		100,00	2,00	53.510.000,00	62,47	1,00	33.420.000,00	62,47	0,00	19.396.000,00	100,00	58,04	96,92	1,00	39.486.000,00	96,92	73,79		tidak ada output
3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem (Satuan: Ha)	Romi,SE		12,50	10.000.000,00	64,46	12,50	6.446.000,00	64,46	0,00	790.000,00	100,00	12,10	80,06	0,00	4.334.000,00		43,34		
	Areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem (Ha)		100,00	12,50	10.000.000,00	64,46	12,50	6.446.000,00	64,46	0,00	790.000,00	100,00	12,10	80,06	0,00	4.334.000,00	80,06	43,34	Realisasi fisik telah dilaksanakan sesuai target capaian kinerja, namun realisasi anggaran telah dilaksanakan sebelum bulan ini.	kekurangan dalam realisasi fisik dan anggaran pada sub kegiatan ini perlu diperbaiki pada tahun anggaran yang akan datang
3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan (Satuan: Operasi)	Romi,SE		48,00	406.680.000,00	27,72	12,00	112.738.000,00	27,72	12,00	70.668.000,00	100,00	62,68	100,00	48,00	364.610.000,00		89,66		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	20	21
	Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi (Operasi)		100,00	48,00	406.680.000,00	27,72	12,00	112.738.000,00	27,72	12,00	70.668.000,00	100,00	62,68	100,00	48,00	364.610.000,00	100,00	89,66	Realisasi Fisik telah dilaksanakan sesuai target capaian kinerja. Bulan ini, namun realisasi anggaran masih dalam proses di Keuangan	kekurangan dalam realisasi fisik dan anggaran pada sub kegiatan ini perlu diperbaiki pada tahun anggaran yang akan datang
3.28.04.1.01.0016 Penataan kawasan Tahura Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi (Satuan: Dokumen)	Edwin Nugraha,G.Hut, MP		1,00	195.202.000,00	89,64	1,00	174.990.350,00	89,64	1,00	0,00	100,00	0,00	99,09	1,00	20.211.654,00		10,35		
	Penataan batas kawasan Tahura Banten (Dokumen)		100,00	1,00	195.202.000,00	89,64	1,00	174.990.350,00	89,64	1,00	0,00	100,00	0,00	99,09	1,00	20.211.654,00	99,09	10,35	Kegiatan rapat pembahasan sedang proses pelaksanaan dan anggaran belum terealisasi	melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja yang ditentukan
SUB JUMLAH				344,50	5.630.158.500,00	88,84	206,50	4.872.339.673,00	84,80	117,00	438.438.680,00	97,65	9,00	86,82	217,00	1.184.851.511,00		21,04		
JUMLAH				254.371,50	69.838.668.805,00	37,03	147.297,50	25.847.868.229,00	35,66	1.093,00	14.403.466.556,00	96,30	55,72	96,06	37.990,66	55.220.609.855,40		79,07		

D. Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Perubahan Anggaran Tahun 2025

Dalam pencapaian target Pendapatan Dinas Lingkungan hidup Provinsi Banten tahun 2025 belum melampaui target yang telah ditetapkan dari target Sebesar Rp 335.420.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 312.141.500,00,- atau sebesar 93,1% dari target yang telah ditetapkan. Seperti terlihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Realisasi Target Pendapatan Tahun 2025

No	Kode rek	Uraian Pendapatan	Target APBD Murni (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		Lebih/(kurang) (Rp)	Pemasalahan	Tindak Lanjut
					(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	316.120.000	335.420.000	312.141.500	93,1%	-Rp23.278.500,00		
1	4.1.02.02.12.0001	Kantin	6.120.000	6.120.000	6.120.000	100,0%	Rp0,00		
2	4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	38.000.000	49.500.000	51.233.000	103,5%	Rp1.733.000,00		
	4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah							
3	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemakaian Laboratorium	270.000.000	270.000.000	246.512.500	91,3%	-Rp23.487.500,00	a. Alokasi anggaran pengadaan bahan kimia pada tahun 2025 belum memadai dengan jumlah Parameter Kualitas Lingkungan yang telah terakreditasi dan teregistrasi (89 Parameter) sehingga ada beberapa parameter yang tidak bisa dilayani karena keterbatasan bahan kimia pada tahun berjalan sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target Retribusi Pendapatan Laboratorium. b. Alokasi anggaran maintenance peralatan laboratorium dan Peralatan Sampling Kualitas Air dan Udara Ambien belum memadai dengan jumlah peralatan laboratorium dan peralatan sampling yang dimiliki sehingga ada beberapa peralatan laboratorium dan peralatan sampling yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki tidak dapat dipelihara dengan baik pada tahun berjalan sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target Retribusi Pendapatan Laboratorium c. Jumlah Peralatan Sampling yang dimiliki khususnya Peralatan Sampling Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan sangat kurang hanya 1 (Satu) Set, dimana Permintaan sampling kualitas udara ambien dan Kebisingan pada bulan Desember tidak bisa terlayani semua karena keterbatasan Peralatan Sampling sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target Retribusi Pendapatan Laboratorium.	Perlunya peningkatan anggaran pengadaan bahan kimia dan maintenance peralatan laboratorium dan Peralatan Sampling Kualitas Air dan Udara Ambien serta pengadaan sarana dan prasarana Peralatan Sampling yang dimiliki khususnya Peralatan Sampling Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan
4	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemakaian Gedung Perkantoran/ Ruang Serba Guna/ aula (TAHURA)	2.000.000	9.800.000	8.276.000	84,4%	-Rp1.524.000,00	Karena di perubahan Anggaran baru dilaksanakan rehabilitasi pembangunan gedung dan sarana (cottage penginapan, camping ground, café)	

E. Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam merealisasikan capaian kinerjanya. Adapun Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Kehutanan adalah sebagai berikut :

a) Permasalahan

1. Target IKU tercapai meskipun aktivitas industri dan kendaraan tinggi, angka IKU tetap mencapai target karena rata-rata tahunan parameter Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂) berhasil dijaga agar tidak melampaui ambang batas nasional namun masih diperlukan Pengawasan Terpadu Pembakaran Terbuka
2. Target IKA tercapai karena merupakan hasil dari pengendalian beban pencemaran yang sistematis. Berbeda dengan indeks udara, IKA sangat dipengaruhi oleh parameter seperti *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *Dissolved Oxygen* (DO). Namun untuk mempertahankan masih diperlukan Pengendalian Limbah domestik (masih rendahnya cakupan fasilitas (IPAL) komunal di kawasan perkotaan dan pedesaan dan pengendalian Limbah Industri (masih kurangnya pengawasan dan penegakan hukum)
3. Target IKAL tercapai namun masih perlu peningkatan koordinasi multistekholder (pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota terhadap pengendalian pencemaran Air laut dan pengawasan serta pemantauan pembuangan limbah ke laut.
4. Target IKTL tercapai namun untuk mempertahankan capaian masih perlu adanya rehabilitasi lahan karena masih luasnya lahan kritis, peningkatan ruang terbuka hijau serta penguatan data penanaman (dalam bentuk peta) untuk dilaporkan kedalam sistem pelaporan
5. Target Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah tercapai namun masih perlu peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu karena tanpa TPST yang memadai, seluruh beban

sampah lari ke TPA. TPST berfungsi memisahkan sampah organik (yang menghasilkan emisi gas metana tinggi) untuk diolah menjadi kompos atau biogas sebelum mencapai TPA, tidak hanya itu Revitalisasi Bank Sampah juga perlu ditingkatkan karena Bank sampah berperan besar dalam memilah sampah anorganik (plastik, kertas). Penguatan IPAL juga diperlukan karena Banyak pemukiman padat di Banten belum terhubung ke IPAL komunal yang standar. Limbah cair yang tergenang di drainase menjadi sumber emisi GRK yang "tersembunyi".

6. Target Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor *Forestry And Other Land Use (Folu)* tidak tercapai karena :
 - a. Kurangnya Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan, Banyak ekosistem mangrove berada di lahan milik perorangan atau area penggunaan lain (APL) yang bukan kawasan hutan negara. Karena statusnya "di luar kawasan", intervensi pemerintah sering kali terbentur regulasi anggaran dan pengawasan
 - b. Kurangnya Pemberian Bibit untuk Pemeliharaan Mata Air, Lahan di sekitar mata air yang gundul tidak hanya menurunkan kualitas air, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk menyerap CO₂ Tanpa bibit yang cukup, tidak ada penambahan stok karbon baru di area-area krusial ini.
 - c. Masalah pada Program Penanaman Pohon, Program penanaman pohon di Banten sering kali menghadapi tantangan keberlanjutan Seringkali fokus hanya pada jumlah pohon yang ditanam (seremonial), namun rendah dalam aspek pemeliharaan. Banyak bibit yang mati sebelum mencapai usia dewasa untuk dapat menyerap karbon secara optimal.
7. Beberapa Cabang Dinas (CDLHK Lebak Tangerang, CDLHK Pandeglang Serang dan Cilegon) belum memiliki gedung kantor sendiri.
8. Target Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas tercapai namun perlu adanya peningkatan kualitas dokumen KLHS Kab/Kota melalui optimalisasi kompetensi tenaga ahli
9. Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan agar seluruh rencana bisa dieksekusi dengan baik, Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia baik tingkat lokal/daerah maupun nasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

10. Persetujuan Lingkungan belum terintegrasi (semula kewenangan Kab/Kota menjadi Provinsi) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum optimalnya Pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam Pelaporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Banten belum optimal
11. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS serta minimnya pemahaman dan kesadaran lingkungan sehingga menjadi kendala dalam keberhasilan pengelolaan DAS.

b) Solusi/Tindaklanjut

1. Peningkatan Pengelolaan Emisi dari Kendaraan Pengendalian Emisi Industri Penanganan Sampah Penghijauan dan Pengurangan Polusi Mengkampanyekan gerakan tanam pohon di masyarakat Penggunaan Teknologi dan Pemantauan Kualitas Udara Edukasi dan Kesadaran Publik Kerjasama Lintas Sektor
2. Peningkatan Pengelolaan Limbah Domestik Penegakan Hukum terhadap Limbah Industri Pengelolaan Sedimentasi Peningkatan Praktik Pertanian Ramah Lingkungan Penanganan Sampah Infrastruktur dan Teknologi Edukasi dan Kampanye Publik Kolaborasi Lintas Sektor
3. Upaya tindaklanjut yang perlu dilakukan antara lain : 1). Pengendalian Limbah Laut: Peningkatan pengawasan terhadap pembuangan limbah domestik dan industri ke perairan laut. 2). Pembersihan Laut dan Pantai: Pelaksanaan program bersih pantai secara berkala melibatkan masyarakat dan komunitas lokal. 3). Penegakan Hukum Lingkungan: Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut, termasuk dari sektor perkapalan.

4. Perlu peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Peningkatan Revitalisasi Bank Sampah serta Penguatan IPAL
5. Perlunya Optimalisasi Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan, Pemberian Bibit untuk Pemeliharaan Mata Air, Lahan di sekitar mata air yang gundul dan Program Penanaman Pohon yang berfokus pada aspek pemeliharaan.
6. Meningkatkan luas areal penanaman pada lahan kritis- meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat- memberikan pelatihan pemetaan dan cara pelaporan sesuai dengan ketentuan
7. Mengusulkan Pengadaan /Pembangunan Gedung Kantor
8. Optimalisasi Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota
9. Peningkatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui strategi pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
10. Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Persetujuan Lingkungan serta optimalisasi Pembinaan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban Pelaporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
11. Meningkatkan kapasitas pendamping KTH khususnya bagi PKSM. serta mengusulkan penambahan jumlah Pendamping Perhutanan Sosial
12. Peningkatan kesadaran masyarakat dan keterlibatan dalam pengelolaan DAS dengan melakukan pelatihan serta penuluhan secara berkelanjutan

F. Analisis Kesesuaian dengan Target Kinerja Program

Analisis kesesuaian dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Kesesuaian dengan Target Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang berkualitas = Σ dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun yang sudah menintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) + Σ dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang divalidasi yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dibagi jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan yang divalidasi dikali 100%	Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100%	1. Dokumen Rekomendasi Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 2. Dokumen Rekomendasi Validasi KLHS RPJMD Kota Tangerang tahun 2025-2029 3. Dokumen Rekomendasi Validasi KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2029 4. Dokumen Rekomendasi Validasi KLHS RTRW Kota Tangerang Selatan 5. Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Banten terdapat 5 Dokumen	= 5/5 x 100%	100	100
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup = Σ lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dibagi target lokasi 4 tahun	Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah persentase dari pencapaian upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	BIDANG PSLB3PP	KEPALA BIDANG PSLB3PP	71%	1. Realisasi upaya adaptasi perubahan iklim melalui pembinaan program komunitas iklim di 30 lokasi. 2. Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Provinsi Tingkat sebanyak 52 Lokasi 3. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebanyak 100 Lokasi Total capaian realisasi = 30+52+100 = 182 Lokasi Target Lokasi 4 tahun adalah : 1. Target pencegahan pencemaran 220 lokasi 2. Target penanggulangan pencemaran 13 titik 3. Target Pemulihan Pencemaran/proklam 60 titik jadi total target 275 Lokasi	= (182/275) x 100 = 66,66%	66,66%	93,49%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
2a	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	Indikator Kerja peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan IK = (% IK Peningkatan Kompetensi + % IK Pelayanan) / (Total % IK) x 100%	Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan adalah Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Parameter Kualitas Lingkungan dan Pelayanan Pengujian Parameter Lingkungan Kepada Masyarakat	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	22,50%	IK Peningkatan Kompetensi terdiri dari : - IK Lingkup Akreditasi = (5parameter / 8parameter) x 21,8 = 1,36 - IK Pembinaan Mutu = (6 orang / 100 Orang) x 21,8 =1,30 IK Pelayanan terdiri dari : - IK Pengujian Internal = (25 sampel / 600 sampel) x 21,8 = 0,90 - IK Pengujian Eksternal = (50 Sampel / 1000 Sampel) x 21,8 = 1,09	IK = (1,36+1,30+0,90+1,09) / 21,8 x 100% IK = 4,65/21,8 IK = 21,33%	21,33%	94,80%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati = (Σ rencana induk pengelolaan kehati yang disusun + Σ jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitasnya dalam pengelolaan kehati + Σ dokumen laporan sarana dan prasarana pengelolaan kehati yang dikelola) tahun berjalan dibagi target pengelolaan 14 dokumen dalam 4 tahun dikali 100%	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah presentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun	BIDANG PSLB3PP	KEPALA BIDANG PSLB3PP	14%	1. Subkegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi sebanyak 2 Dokumen Target 14 Dokumen dalam 4 tahun	= 2/14 *100% = 14,28%	14,28%	100%
4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (%)	= Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100%	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah presentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun	BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	11,76%	1. MHA Cibedug 2. MHA Cisungsang 3. MHA Cirompang 4. MHA Citorek 5. MHA Cisit Target Realisasi 2 MHA Jumlah MHA Potensial sebanyak 17	= 2/17 x 100% = 11,76%	11,76%	100,00%
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Pnyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentaase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	= Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi jumlah target lembaga tiap tahun yang akan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup x 100%	lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga	BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100%	1. Sub keg Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye LH sebanyak 50 org, berlokasi di Pasar Anyar Kampung Berkilir Kota Tangerang. Realisasi capaian = 50/50 x 100% = 100% 2. Sub Keg Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH dengan realisasi 2 lembaga yaitu Bank Sampah Ciceri Jaya Berseri (Sumurpecung Kec Serang) dan Bank Sampah Al Malik (Kec Pontang, Kab Serang).	= (100% + 100%) / 2 =100%	100%	100%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
								Realisasi Capaian = $2/2 \times 100 = 100\%$			
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga/ Kab.Kota)	= Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga + Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga, Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	68	1. Sekolah adiwiyata provinsi (SAP) sebanyak 56 sekolah 2. sekolah adiwiyata Nasional (SAN) sebanyak 30 Sekolah 3. sekolah adiwiyata mandiri (SAM) sebanyak 13 Sekolah	= 99 Sekolah Adiwiyata	= 99 Sekolah Adiwiyata	145,59%
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	= jumlah pelaku usaha yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH nya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di kali 100%	Banyaknya pelaku usaha /kegiatan yang dilaksanakan pembinaan dan Pengawasan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	90%	Jumlah Persetujuan lingkungan : 82 Jumlah Rincian Teknis B3 : 8 1. Terdapat 90 pelaku usaha yang izin lingkungan dan izin PPLH nya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2. Telah dilakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap 100 pelaku usaha	= $(00/100) \times 100\% = 90\%$	111%	123%
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (%)	= Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan : 1. Pemeriksaan kelengkapan pengaduan 2. Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan 3. Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan 4. Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan	BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100%	1. Jumlah Pengaduan yang masuk = 55 2. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti = 55	= $(55/55) \times 100\% + 35 = 100$	100%	100%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	Persentase Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 = Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan	Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	BIDANG PSLB3PP	KEPALA BIDANG PSLB3PP	100%	1. Jumlah Permohonan fasilitasi pemenuhan komitmen limbah B3 - Yang Masuk : 4 perusahaan - Yang ditindaklanjuti : 4 perusahaan Realisasi capaian = $4/4 \times 100\% = 100\%$ 2. Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 - Target koordinasi : 4 kali - Jumlah sinkronisasi yang dilaksanakan : 4 perusahaan Realisasi capaian = $4/4 \times 100\% = 100\%$	$= 100\% + 100\% / 2 = 100\%$	100%	100%
10	Program Pengelolaan Persampahan	prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi (%)	Jumlah sampah kerjasama tahun n dibagi Jumlah target volume sampah yang ditingani tahun n x 100%	Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang ditingani x 100%	BIDANG PSLB3PP	KEPALA BIDANG PSLB3PP	100%	Jumlah sampah kerjasama pada tahun 2025 adalah sebanyak : - Sampah d tangani Banten Lama 116,18 ton - Sampah d tangani di Teluk Labuan 537,76 ton Total Realisasi Capaian = 653,94 Ton Target Volume sampah yang ditangani pada tahun 2025 adalah sebanyak 365 Ton	$= (653,94 \text{ Ton} / 365 \text{ Ton}) \times 100\% = 179,16\%$	179,16%	179,16%
11	Program Pengelolaan Hutan	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (%)	Jumlah dokumen perencanaan hutan tahun ke n + jumlah dokumen pemanfaatan hutan tahun ke n + jumlah unit manajemen HHK tahun ke n + Jumlah unit manajemen HHBK tahun ke n dibagi target 4 tahun	Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit management Hasil Hutan Kayu & Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun x 100%	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	25%	1. Realisasi Dokumen perencanaan hutan : 4 Dokumen 2. Realisasi dokumen pemanfaatan hutan : 3. Realisasi unit manajemen HHK : 2 Unit 4. Realisasi Unit Manajemen HHBK : 23 Unit Manajemen Target 4 Tahun 1. Dokumen Perencanaan = 20 Dokumen 2. Dokumen Pemanfaatan Hutan = 16 Dokumen 3. Target Unit Manajemen HHK = 40 Unit Manajemen 4. Target Unit Manajemen HHBK = 16 Unit Manajemen	$= (4+2+23) / (20+16+40+16) \times 100\%$	31,52%	126,08%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
11a	Program Pengelolaan Hutan	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang	Jumlah Lahan yang terehabilitasi = Σ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang terehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Rersapan, Gullyplug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah lebak dan tangerang	CDK LT	KEPALA CDK LT	2500 Ha	Jumlah pohon yang ditanam = 1.645.216 batang atau seluas 4.906,61 Ha	4.906,61 Ha	4.906,61 Ha	196,26%
11b	Program Pengelolaan Hutan	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Jumlah Lahan yang terehabilitasi = Σ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman (vegetatif) dan kegiatan penunjangnya wilayah pandeglang serang cilegon	CDK PSC	KEPALA CDK PSC	2500 Ha	Jumlah Bibit tertanam seluas 1945,55 Ha	1945,55 Ha	1945,55 Ha	77,82%
11c	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat = $\frac{\text{Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat}}{\text{Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia dikali 100\%}}$	Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	UPTD SPTH	KEPALA UPTD SPTH	90%	- Jumlah bibit Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat sebanyak 208.502 batang - Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia sebanyak 250.000 batang	$= \frac{208.502}{250.000} \times 100\% = 83,4\%$	83,40%	92,67%
12	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	Jumlah DAS yang ditangani Tahun N dibagi Jumlah Keseluruhan DAS Prioritas dikali 100%	Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi 5 DAS Prioritas di Provinsi Banten	BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20%	Jumlah DAS yang ditangani : DAS Ciujung, Cidanau dan Cibanten DAS Prioritas yaitu : Cidurian, Ciujung, Cidanau, Cibanten, Cisadane	$= \frac{3}{5} \times 100 = 60\%$	60%	300%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
13	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Meningkatnya Fungsi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %	Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang ditangani setiap tahun dibagi 14 kawasan ekosistem bernilai penting di provinsi banten	BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	28,57%	Jumlah lokasi yang ditangani sebanyak 4 KEE (Taman Kehati Kaduberem, Lokasi mangrove center banten, Taman kehati Maja, Hutan Adat Meranti kesepuhan kurangi) = $4/14 \times 100\%$ = 28.57% Target Lokasi : 14 Lokasi (kawasan daerah penyangga ekosistem penting di provinsi banten)	= $4/14 \times 100\%$ = 28,57%	28,57%	100%
13a	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura	Pengelolaan tahura meliputi pengelolaan hutan konservasi untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, pelestarian budaya dan potensi flora, fauna serta sarana prasarana penunjangnya.	TAHURA	KEPALA UPTD TAHURA BANTEN	100%	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura = $50\% + 50\%$ = 100%	= $50\% + 50\%$ = 100%	100%	100%
13b	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang	CDK LT	KEPALA CDK LT	12 Kelompok	Pemberdayaan Masyarakat pada kawasan bernilai ekosistem penting: 1. KTH Mulya Tani, Ciakar 2. KTH Alam Jaya, Karoya 3. KTH Bocah Gunung, Cileles 4. KTH Rasamulya, Wanasalam 5. KTH Surya Makmur, Malimping 6. KTH Sumber Asih, Cijaku 7. KTH Muda Mandiri, Malimping 8. KTH Mufakat, Banjarsari 9. KTH Sumber Alam, Cihara 10. KTH Karya Mukti, Cijaku 11. KTH Mulyasari, Wanasalam 12. KTH Bukit Tunas, Panggarangan	12 Kelompok	12 Kelompok	100%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
13c	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	CDK PSC	KEPALA CDK PSC	12 Kelompok	Pemberdayaan Masyarakat pada kawasan bernilai ekosistem penting: 1. KTH Tunas Baru, Anyer 2. KTH Salam Sejahtera, kan. Pandeglang 3. KTH Kopi Batu Lawang 4. KTH Utes Berkah, Kab. Pandeglang 5. KTH Harapan Bangsa, Carita Kab. Pandeglang 6. KTH Sejahtera, Carita 7. KTH Jari Tunggal, Carita 8. KTH Wana Lestari, Labuan 9. KTH Putra Sindang Laya, Labuan 10. KTH Bina Lestari, Panimbang 11. KTH Triguna Laksana, Sobang 12. KPPAD Budi Daya Ikan dan Udang	12 Kelompok	12 Kelompok	100%
14	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok)	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat = Σ KTH + FMU + Σ Penyuluh + Σ Kelompok Perhutanan Sosial	Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan (KTH), Forest Managemen Unit (FMU), Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial	BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	52 Kelompok	1. Jumlah KTH : 47 Kelompok 2. Jumlah FMU : 0 Kelompok 3. Jumlah Penyuluh : 1 Orang 4. Jumlah Kelompok PS : 7 Kelompok Total 55 Kelompok	= 47 + 0 + 1 + 7 = 55 Kelompok	55 Kelompok	105,77%
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	$= \Sigma$ Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi /Jumlah Kegiatan yang diampu	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	DINAS LHK	SEKRETARIS DINAS LHK	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 7 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (7)	= 700/7	100%	100%
						KEPALA CDK LEBAK TANGERANG	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 3 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	= 300/3	100%	100%
						KEPALA CDK PANDEGLANG SERANG CILEGON	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 3 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	= 300/3	100%	100%
						KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 2 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (2)	= 200/2	100%	100%
						KEPALA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 3 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	= 300/3	100%	100%

No	Program	Indikator	Metode / Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian %
								Isian Data	Pembilang / Penyebut	Nilai/ Hasil	
						KEPALA UPTD TAHURA	100%	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100\% \times 4 \text{ Kegiatan})$ dibagi jumlah kegiatan yang diampu (4)	= 400/4	100%	100%

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada Tahun 2025 tidak ada Kebijakan Strategis spesifik yang ditetapkan yang langsung terkait bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 3.5 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	-	-	-

3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada Tahun 2025 tidak ada Tindaklanjut Rekomendasi DPRD dikarenakan pada tahun sebelumnya DPRD Provinsi Banten rapat LKPJ Tahun 2024 tidak memberikan Catatan/Rekomendasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja/serapan anggaran yang dicapai.

Tabel 3.6 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindaklanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
-	-	-	-

PENUTUP

LKPJ TA-2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN 2025**

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka memberikan keterangan yang akuntabel dan memberikan gambaran kinerja DLHK Provinsi Banten yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2025 berjalan dengan baik.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.